



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI CABANG DINAS, UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH DAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa susunan organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 176 Tahun 2021;
- b. bahwa dengan ditetapkannya kebijakan penyederhanaan birokrasi, berimplikasi pada perubahan struktur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, sehingga Peraturan Gubernur Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 239);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penjabaran Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 169 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penjabaran Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 169);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI CABANG DINAS, UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat.

6. Dinas Daerah Provinsi adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7. Badan Daerah Provinsi adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
10. Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, serta kehutanan yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit kerja yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas/Badan.
12. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Cabang Dinas atau UPTD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
13. Satuan Pelayanan adalah Satuan Pelayanan non struktural pada Cabang Dinas atau UPTD yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Cabang Dinas atau UPTD.
14. Tenaga Fungsional adalah tenaga teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Cabang Dinas atau UPTD.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk Cabang Dinas dan UPTD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Cabang Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1), melaksanakan urusan pemerintahan yang diberikan kepada Daerah Provinsi, meliputi:
 - a. sub urusan pemerintahan bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
 - b. urusan pemerintahan bidang kehutanan;
 - c. urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral; dan
 - d. sub urusan pemerintahan bidang kelautan.

- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk pada Dinas atau Badan melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dari Urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dan menjadi tanggung jawab dari Dinas/Badan instansi induknya.
- (4) Selain UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk:
 - a. UPTD di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah Provinsi, yang merupakan satuan pendidikan formal; dan
 - b. rumah sakit Daerah Provinsi sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional;
- (5) Bagan struktur organisasi Cabang Dinas dan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tercantum pada Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Cabang Dinas dan UPTD pada masing-masing Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

- a. Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
 1. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Bogor;
 2. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Bogor dan Daerah Kota Depok;
 3. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Bekasi dan Daerah Kabupaten Bekasi;
 4. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Karawang, Daerah Kabupaten Purwakarta, dan Daerah Kabupaten Subang;
 5. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Sukabumi dan Daerah Kabupaten Sukabumi;
 6. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Cianjur dan Daerah Kabupaten Bandung Barat;
 7. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Bandung dan Daerah Kota Cimahi;
 8. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Bandung dan Daerah Kabupaten Sumedang;
 9. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Indramayu dan Daerah Kabupaten Majalengka;

10. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Kuningan, Daerah Kabupaten Cirebon dan Daerah Kota Cirebon;
 11. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Garut;
 12. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Daerah Kota Tasikmalaya;
 13. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Ciamis, Daerah Kota Banjar dan Daerah Kabupaten Pangandaran;
 14. UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, Kelas A; dan
 15. UPTD berupa Satuan Pendidikan Daerah Provinsi, sesuai dengan kewenangan Provinsi yang tersebar pada Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
- b. Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas :
1. UPTD Laboratorium Kesehatan, Kelas A;
 2. UPTD Pelatihan Kesehatan, Kelas A;
 3. Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Jiwa, rumah sakit khusus Kelas A, membawahkan Satuan Pelayanan Kesehatan Jiwa Komunitas Provinsi Jawa Barat;
 4. Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Paru, rumah sakit khusus Kelas B, membawahkan Satuan Pelayanan Kesehatan Paru Masyarakat Provinsi Jawa Barat;
 5. Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan, rumah sakit umum Kelas B, membawahkan Satuan Pelayanan Kesehatan Pegawai Provinsi Jawa Barat;
 6. Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon Sukabumi, rumah sakit umum Kelas C;
 7. Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Pameungpeuk Garut, rumah sakit umum Kelas C;
 8. Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat, rumah sakit umum Kelas D.
- c. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
1. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Kabupaten Bekasi dan Daerah Kota Bekasi, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kota Depok dan Kabupaten Bogor 1;

- b) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bogor 2;
 - c) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi;
 - d) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Cianjur 1; dan
 - e) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Cianjur 2.
2. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II, Kelas A, meliputi wilayah Daerah Kabupaten Sukabumi dan Daerah Kota Sukabumi, membawahkan:
- a) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi 1;
 - b) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sukabumi 2;
 - c) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sukabumi 3;
 - d) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sukabumi 4; dan
 - e) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sukabumi 5.
3. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan III, Kelas A, meliputi wilayah Daerah Kabupaten Bandung, Daerah Kota Bandung, Daerah Kota Cimahi, Daerah Kabupaten Bandung Barat, Daerah Kabupaten Subang, Daerah Kabupaten Purwakarta dan Daerah Kabupaten Karawang, membawahkan:
- a) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kota Bandung;
 - b) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bandung;
 - c) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat;
 - d) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Subang 1;
 - e) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Subang 2;
 - f) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Purwakarta; dan
 - g) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Karawang.
4. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV, Kelas A, meliputi wilayah Daerah Kabupaten Garut dan Daerah Kabupaten Sumedang, membawahkan:

- a) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sumedang 1;
 - b) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sumedang 2;
 - c) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Garut 1;
 - d) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Garut 2; dan
 - e) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Garut 3.
5. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V, Kelas A, meliputi wilayah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Kota Tasikmalaya, Daerah Kabupaten Ciamis, Daerah Kabupaten Kuningan, Daerah Kota Banjar, dan Daerah Kabupaten Pangandaran, membawahkan:
- a) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya 1;
 - b) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya 2;
 - c) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran; dan
 - d) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Kuningan.
6. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI, Kelas A, meliputi wilayah Daerah Kabupaten Indramayu, Daerah Kabupaten Cirebon, Daerah Kota Cirebon, dan Daerah Kabupaten Majalengka, membawahkan :
- a) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon;
 - b) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Indramayu 1;
 - c) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Indramayu 2;
 - d) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Majalengka 1; dan
 - e) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Majalengka 2 .
7. UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi, Kelas B.
- d. Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
1. UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup, Kelas A; dan
 2. UPTD Pengelolaan Sampah Tempat Pemrosesan Akhir /Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPA/TPST) Regional, Kelas A membawahkan:

- a) Satuan Pelayanan TPA/TPST Regional Wilayah Metropolitan Bandung;
 - b) Satuan Pelayanan TPA/TPST Regional Wilayah Bogor dan Depok;
 - c) Satuan Pelayanan TPA /TPST Regional Wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan; dan
 - d) Satuan Pelayanan TPA/TPST Regional Wilayah Bekasi, Karawang, dan Purwakarta.
- e. Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
1. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, kelas A, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Cimanceri-Cisadane;
 - b) Satuan Pelayanan Kali Angke-Pesanggrahan;
 - c) Satuan Pelayanan Ciliwung; dan
 - d) Satuan Pelayanan Cikarang-Bekasi.
 2. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno, kelas A, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Cibareno-Cimandiri;
 - b) Satuan Pelayanan Ciletuh-Cikaso;
 - c) Satuan Pelayanan Cibumi; dan
 - d) Satuan Pelayanan Cimapag-Cisadea.
 3. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citarum, kelas A, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Cikondang-Cisokan;
 - b) Satuan Pelayanan Cibeet-Cilamaya;
 - c) Satuan Pelayanan Casem Hilir-Cilalanang;
 - d) Satuan Pelayanan Cimahi-Ciasem;
 - e) Satuan Pelayanan Citarum-Cikeruh; dan
 - f) Satuan Pelayanan Ciwidey-Cirasea.
 4. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung, kelas A, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Cimanuk Hulu-Cipanas;
 - b) Satuan Pelayanan Cimanuk Hilir-Kaliwedi;
 - c) Satuan Pelayanan Ciwaringin-Suba; dan
 - d) Satuan Pelayanan Kalijaga-Cisanggarung.
 5. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citanduy, kelas A, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Citanduy Hulu; dan
 - b) Satuan Pelayanan Citanduy Hilir.
 6. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki, kelas A, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Cikaengan-Ciwulan;

- b) Satuan Pelayanan Cilaki-Cisanggiri; dan
 - c) Satuan Pelayanan Cimedang-Ciputrapinggan.
- f. Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
- 1. UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Remaja, Kelas A, membawahkan Satuan Pelayanan Pemberdayaan Sosial Bina Remaja, Pangandaran;
 - 2. UPTD Pengembangan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, Kelas B;
 - 3. UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa, Kelas A, membawahkan Satuan Pelayanan Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum, Subang;
 - 4. UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Ramah Anak, Kelas A, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Griya Ramah Anak, Bandung;
 - b) Satuan Pelayanan Griya Ramah Anak, Bogor;
 - c) Satuan Pelayanan Griya Ramah Anak Balita, Bandung; dan
 - d) Satuan Pelayanan Griya Ramah Anak, Garut.
 - 5. UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karya, Kelas A, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Sosial Persinggahan;
 - b) Satuan Pelayanan Sosial Bina Mandiri, Cirebon; dan
 - c) Satuan Pelayanan Sosial Rumah Singgah Humanis.
 - 6. UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Harapan Difabel, Kelas A;
 - 7. UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Wanita Mandiri, Kelas A, membawahkan Satuan Pelayanan Panti Rehabilitasi Sosial Karya Wanita; dan
 - 8. UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Lansia, Kelas A, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Griya Lansia, Garut;
 - b) Satuan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Karawang;
 - c) Satuan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Sukabumi; dan
 - d) Satuan Pelayanan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Cikutra-Bandung.
- g. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Jawa Barat.
- h. Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:

1. UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I, Kelas A, dengan wilayah kerja Daerah Kota Bogor, Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kota Sukabumi, Daerah Kabupaten Sukabumi, Daerah Kabupaten Karawang, Daerah Kabupaten Bekasi, dan Daerah Kota Bekasi, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Terminal Leuwiliang di Kabupaten Bogor;
 - b) Satuan Pelayanan Terminal Cileungsi di Kabupaten Bogor;
 - c) Satuan Pelayanan Terminal Palabuhanratu di Kabupaten Sukabumi; dan
 - d) Satuan Pelayanan Terminal Cikarang di Kabupaten Bekasi.
2. UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II, Kelas A, dengan wilayah kerja Daerah Kota Bandung, Daerah Kabupaten Bandung, Daerah Kabupaten Bandung Barat, Daerah Kota Cimahi, Daerah Kabupaten Sumedang, Daerah Kabupaten Purwakarta, dan Daerah Kabupaten Cianjur, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Terminal ST. Hall di Kota Bandung;
 - b) Satuan Pelayanan Terminal Ciroyom di Kota Bandung; dan
 - c) Satuan Pelayanan Terminal Ledeng di Kota Bandung.
3. UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah III, Kelas A, dengan wilayah kerja Daerah Kabupaten Ciamis, Daerah Kota Tasikmalaya, Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Kota Banjar, Daerah Kabupaten Pangandaran, dan Daerah Kabupaten Garut, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Terminal Singaparna di Kabupaten Tasikmalaya;
 - b) Satuan Pelayanan Terminal Pameungpeuk di Kabupaten Garut; dan
 - c) Satuan Pelayanan Terminal Pangandaran di Kabupaten Pangandaran
4. UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah IV, Kelas A, dengan wilayah kerja Daerah Kota Cirebon, Daerah Kabupaten Cirebon, Daerah Kabupaten Kuningan, Daerah Kabupaten Indramayu, Daerah Kabupaten Majalengka, dan Daerah Kabupaten Subang, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Terminal Sumber di Kabupaten Cirebon;
 - b) Satuan Pelayanan Terminal Losari di Kabupaten Cirebon;
 - c) Satuan Pelayanan Terminal Ciledung di Kabupaten Cirebon; dan

- d) Satuan Pelayanan Terminal Indramayu di Kabupaten Indramayu.
5. UPTD Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Nusawiru, Kelas A, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Bandar Udara Kertajati di Kabupaten Majalengka; dan
 - b) Satuan Pelayanan Bandar Udara Cikembar di Kabupaten Sukabumi.
 6. UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Kelas A, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau Jatiluhur di Kabupaten Purwakarta;
 - b) Satuan Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau Cirata di Kabupaten Cianjur, Bandung Barat, Purwakarta;
 - c) Satuan Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau Saguling di Kabupaten Bandung Barat;
 - d) Satuan Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau Jatigede di Kabupaten Sumedang;
 - e) Satuan Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Muara Gembong di Kabupaten Bekasi;
 - f) Satuan Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Kalipucang di Kabupaten Pangandaran; dan
 - g) Satuan Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Majingklak di Kabupaten Pangandaran.
 7. UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Pelabuhan Laut, Kelas A, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Pelabuhan Palabuhanratu di Kabupaten Sukabumi;
 - b) Satuan Pelayanan Pelabuhan Bojongsalawe di Kabupaten Pangandaran;
 - c) Satuan Pelayanan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang; dan
 - d) Satuan Pelayanan Pelabuhan Tirtamaya di Kabupaten Indramayu.
 - i. Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu UPTD Pusat Layanan Digital, Data dan Informasi Geospasial, Kelas A.
 - j. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu UPTD Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan Wirausaha, Kelas A.
 - k. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas :
 1. UPTD Balai Latihan Kerja Kompetensi, Kelas A;

2. UPTD Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia, Kelas A;
 3. UPTD Balai Latihan Kerja Mandiri, Kelas A;
 4. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor, kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Kabupaten Sukabumi, Daerah Kota Sukabumi, dan Daerah Kota Depok;
 5. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Karawang, kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Bekasi, Daerah Kabupaten Bekasi, Daerah Kabupaten Karawang, Daerah Kabupaten Purwakarta, dan Daerah Kabupaten Subang;
 6. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III Cirebon, kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Daerah Kabupaten Indramayu, Daerah Kabupaten Majalengka, dan Daerah Kabupaten Kuningan;
 7. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung, kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Bandung, Daerah Kabupaten Bandung, Daerah Kabupaten Bandung Barat, Daerah Kota Cimahi, dan Daerah Kabupaten Sumedang; dan
 8. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V Tasikmalaya, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Garut, Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Kota Tasikmalaya, Daerah Kabupaten Ciamis, Daerah Kota Banjar, dan Daerah Kabupaten Pangandaran.
- l. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat, Kelas A, membawahkan :
 - a) Satuan Pelayanan Pengembangan Rumah Angklung;
 - b) Satuan Pelayanan Pengelolaan Gedung Rumentang Siang;
 - c) Satuan Pelayanan Pengelolaan Pondok Seni;
 - d) Satuan Pelayanan Pengelolaan Gedung Pusat Kebudayaan;
 - e) Satuan Pelayanan Pengelolaan Taman Budaya;
 - f) Satuan Pelayanan Museum Negeri Sri Baduga;
 - g) Satuan Pelayanan Pengelolaan Rumah Bersejarah Inggit Garnasih;
 - h) Satuan Pelayanan Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat; dan
 - i) Satuan Pelayanan Gedung Indonesia Menggugat.
 - m. Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas :

1. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Sukabumi, Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Kabupaten Garut, Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dan Daerah Kabupaten Pangandaran, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Taman Pesisir Pantai Penyus Pangumbahan;
 - b) Satuan Pelayanan Konservasi Perairan Daratan Kokol;
 - c) Satuan Pelayanan Konservasi Perairan Daratan Ciranjang; dan
 - d) Satuan Pelayanan Konservasi Perairan Daratan Pamarican.
2. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Bekasi, Daerah Kabupaten Karawang, Daerah Kabupaten Subang, Daerah Kabupaten Indramayu, Daerah Kota Cirebon, dan Daerah Kabupaten Cirebon, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Konservasi Perairan Daratan Jatisari;
 - b) Satuan Pelayanan Produksi Garam Kapetakan; dan
 - c) Satuan Pelayanan Konservasi Perairan Daratan Wanayasa.
3. UPTD Pelabuhan Perikanan Cilauteureun, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Sukabumi, Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Kabupaten Garut, Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dan Daerah Kabupaten Pangandaran, membawahkan Satuan Pelayanan Pelabuhan Perikanan Rancabuaya;
4. UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Bekasi, Daerah Kabupaten Karawang, Daerah Kabupaten Subang, Daerah Kabupaten Indramayu, Daerah Kota Cirebon, dan Daerah Kabupaten Cirebon, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Pelabuhan Perikanan Ciparage;
 - b) Satuan Pelayanan Pelabuhan Perikanan Blanakan;
 - c) Satuan Pelayanan Pelabuhan Perikanan Eretan; dan
 - d) Satuan Pelayanan Pelabuhan Perikanan Bondet.
5. UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Produk Perikanan, Kelas A, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Pengujian dan Penerapan Mutu Produk Perikanan Palabuhanratu; dan
 - b) Satuan Pelayanan Penyimpanan dan pembekuan ikan Karangsong.

6. UPTD Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Bekasi, Daerah Kabupaten Bekasi, Daerah Kabupaten Karawang, Daerah Kabupaten Purwakarta, Daerah Kabupaten Subang, Daerah Kabupaten Indramayu, Daerah Kabupaten Cirebon, Daerah Kota Cirebon, Daerah Kabupaten Kuningan, dan Daerah Kabupaten Majalengka, membawahkan Satuan Pelayanan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Losari.
7. UPTD Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Sukabumi, Daerah Kabupaten Sukabumi, Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Kabupaten Bandung Barat, Daerah Kota Cimahi, Daerah Kabupaten Bandung, Daerah Kota Bandung, Daerah Kabupaten Sumedang, Daerah Kabupaten Garut, Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Kota Tasikmalaya, Daerah Kabupaten Ciamis, Daerah Kota Banjar, dan Daerah Kabupaten Pangandaran, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cigadog;
 - b) Satuan Pelayanan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Maleber; dan
 - c) Satuan Pelayanan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cijeungjing.
8. UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Selatan, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Sukabumi, Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Kabupaten Garut, Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dan Daerah Kabupaten Pangandaran, membawahkan Satuan Pelayanan Perikanan Air Payau dan Laut Cibalong.
9. UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Utara, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Bekasi, Daerah Kabupaten Karawang, Daerah Kabupaten Subang, Daerah Kabupaten Indramayu, Daerah Kota Cirebon, dan Daerah Kabupaten Cirebon, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Perikanan Air Payau dan Laut Balongan; dan
 - b) Satuan Pelayanan Perikanan Air Payau dan Laut Cilamaya.
- n. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
 1. UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan, Kelas A;
 2. UPTD Balai Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan/Bahan Pakan Cikole Lembang, Kelas A;
 3. UPTD Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Pakan Ternak Cikole Lembang, Kelas A, membawahkan Satuan Pelayanan Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Pakan Ternak Bunihayu Subang;

4. UPTD Balai Pelatihan Peternakan dan Ketahanan Pangan Cikole Lembang, Kelas A;
 5. UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong Ciamis, Kelas A;
 6. UPTD Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas Jatiwangi, Kelas A;
 7. UPTD Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba dan Kambing Margawati, Kelas A, membawahkan Satuan Pelayanan Pengembangan Perbibitan Ternak Domba dan Kambing Tambakmekar Subang;
 8. UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Kelas A, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Laboratorium Veteriner Losari;
 - b) Satuan Pelayanan Pos Pemeriksaan Hewan Losari;
 - c) Satuan Pelayanan Pos Pemeriksaan Hewan Banjar; dan
 - d) Satuan Pelayanan Pos Pemeriksaan Hewan Gunung Sindur.
 9. UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah Bunikasih, Kelas A, dan
 10. UPTD Rumah Sakit Hewan, Kelas A.
- o. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
1. UPTD Balai Benih Kentang, Kelas A, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Balai Benih Kentang Narogtog Bandung; dan
 - b) Satuan Pelayanan Balai Benih Kentang Cikajang Garut.
 2. UPTD Balai Benih Hortikultura, Kelas A, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Balai Benih Hortikultura Margahayu Bandung Barat;
 - b) Satuan Pelayanan Balai Benih Hortikultura Cimangkok Sukabumi;
 - c) Satuan Pelayanan Balai Benih Hortikultura Kasugengan Cirebon;
 - d) Satuan Pelayanan Balai Benih Hortikultura Citatah Bandung Barat;
 - e) Satuan Pelayanan Balai Benih Hortikultura Salebu Tasikmalaya; dan
 - f) Satuan Pelayanan Balai Benih Hortikultura Cikadu Cianjur.
 3. UPTD Balai Benih Padi dan Palawija, Kelas A, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Balai Benih Padi dan Palawija Plumbon, Cirebon;
 - b) Satuan Pelayanan Balai Benih Padi dan Palawija Plumbon, Bojongpicung Cianjur;

- c) Satuan Pelayanan Balai Benih Padi dan Palawija Plumbon Doktormangku Cianjur;
 - d) Satuan Pelayanan Balai Benih Padi dan Palawija Plumbon Cibeber Cianjur;
 - e) Satuan Pelayanan Balai Benih Padi dan Palawija Plumbon Cikarang Bekasi;
 - f) Satuan Pelayanan Balai Benih Padi dan Palawija Plumbon Kawalu Tasikmalaya;
 - g) Satuan Pelayanan Balai Benih Padi dan Palawija Plumbon Panawangan Ciamis;
 - h) Satuan Pelayanan Balai Benih Padi dan Palawija Plumbon Karangpawitan Garut;
 - i) Satuan Pelayanan Balai Benih Padi dan Palawija Plumbon Campaka Purwakarta; dan
 - j) Satuan Pelayanan Balai Benih Padi dan Palawija Plumbon Cikebo Majalengka.
4. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kelas A, membawahkan:
- a) Satuan Pelayanan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah I Cianjur;
 - b) Satuan Pelayanan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah II Karawang;
 - c) Satuan Pelayanan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah III Subang;
 - d) Satuan Pelayanan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah IV Majalengka;
 - e) Satuan Pelayanan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah V Garut;
 - f) Satuan Pelayanan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah VI Pangandaran; dan
 - g) Satuan Pelayanan Laboratorium Kimia Agro Cikole Lembang Bandung Barat.
5. UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kelas A, membawahkan:
- a) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah I, Cianjur;
 - b) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah II, Subang;
 - c) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah III, Indramayu;
 - d) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah IV, Bandung;

- e) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah V, Tasikmalaya; dan
 - f) Satuan Pelayanan Laboratorium Kimia Agro Cikole Lembang Bandung Barat.
6. UPTD Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kelas A;
7. UPTD Balai Pengembangan Mekanisme Pertanian, Kelas A, membawahkan:
- a) Satuan Pelayanan Balai Pengembangan Mekanisme Tanaman Pangan dan Hortikultura, Rengasdengklok Karawang;
 - b) Satuan Pelayanan Balai Pengembangan Mekanisme Tanaman Pangan dan Hortikultura, Plumbon Cirebon; dan
 - c) Satuan Pelayanan Balai Pengembangan Mekanisme Tanaman Pangan dan Hortikultura, Padaherang Pangandaran;
- p. Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
1. UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan, Kelas A, membawahkan:
- a) Satuan Pelayanan Perbenihan Tanaman Perkebunan Gekbrong, Cianjur;
 - b) Satuan Pelayanan Perbenihan Tanaman Perkebunan Cisarungga, Garut;
 - c) Satuan Pelayanan Perbenihan Tanaman Perkebunan Sukahurip, Ciamis;
 - d) Satuan Pelayanan Perbenihan Tanaman Perkebunan Munjul, Majalengka;
 - e) Satuan Pelayanan Perbenihan Tanaman Perkebunan Cipeo, Subang; dan
 - f) Satuan Pelayanan Perbenihan Tanaman Perkebunan Sindanglaut, Cirebon.
2. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan, Kelas A, membawahkan:
- a) Satuan Pelayanan Pengawasan Mutu Benih Wilayah Cianjur, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Kabupaten Sukabumi, Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kabupaten Karawang, dan Daerah Kabupaten Purwakarta;
 - b) Satuan Pelayanan Pengawasan Mutu Benih Wilayah Majalengka, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Majalengka, Daerah Kabupaten Subang, Daerah Kabupaten Kuningan, Daerah Kabupaten Indramayu, dan Daerah Kabupaten Cirebon;

- c) Satuan Pelayanan Pengawasan Mutu Benih Wilayah Tasikmalaya, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Tasikmalaya, Daerah Kota Banjar, Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Kabupaten Ciamis, dan Daerah Kabupaten Pangandaran.
3. UPTD Balai Perlindungan Perkebunan, Kelas A, membawahkan:
- a) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Leuwiliang, Bogor;
 - b) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Baros, Sukabumi;
 - c) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Cibeber, Cianjur;
 - d) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Wanayasa, Purwakarta;
 - e) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Banjaran, Bandung;
 - f) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Cikajang, Garut;
 - g) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Mangkubumi, Tasikmalaya;
 - h) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Rancah, Ciamis;
 - i) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Munjul, Majalengka;
 - j) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Paseh, Sumedang; dan
 - k) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Jalan Cagak, Subang.
- q. Dinas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu UPTD Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Jawa Barat, Kelas A.
- r. Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
1. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi dan Daerah Kota Bekasi, membawahkan Satuan Pelayanan Kehutanan Bekasi.
 2. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah II, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Karawang, Daerah Kabupaten Purwakarta, dan Daerah Kabupaten Subang, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Kehutanan Karawang; dan
 - b) Satuan Pelayanan Kehutanan Subang.
 3. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Sukabumi dan Daerah Kota Sukabumi;

4. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IV, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Kabupaten Bandung Barat dan Daerah Kota Cimahi, membawahkan Satuan Pelayanan Kehutanan Bandung Barat;
 5. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Garut, Daerah Kabupaten Bandung, dan Daerah Kota Bandung, membawahkan Satuan Pelayanan Kehutanan Bandung;
 6. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Daerah Kota Tasikmalaya;
 7. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VII, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Ciamis, Daerah Kota Banjar dan Daerah Kabupaten Pangandaran, membawahkan Satuan Pelayanan Kehutanan Pangandaran;
 8. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Kuningan, Daerah Kabupaten Majalengka, Daerah Kabupaten Cirebon, dan Daerah Kota Cirebon, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Kehutanan Cirebon; dan
 - b) Satuan Pelayanan Kehutanan Majalengka.
 9. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Sumedang dan Daerah Kabupaten Indramayu, membawahkan Satuan Pelayanan Kehutanan Indramayu;
 10. UPTD Tamah Hutan Raya (TAHURA) Ir. H. Djuanda, Kelas A, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Pengelolaan *Resort* Wilayah Maribaya; dan
 - b) Satuan Pelayanan Pengelolaan *Resort* Wilayah Negla.
 11. UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan, kelas A, membawahkan Satuan Pelayanan Hutan Daerah Kiarapayung; dan
 12. UPTD Pelayanan Pengolahan Hasil Hutan, Kelas B.
- s. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
1. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral wilayah I Bogor, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Bogor, Daerah Kabupaten Bogor, dan Daerah Kota Depok;
 2. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral wilayah II Purwakarta, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Purwakarta, Daerah Kabupaten Bekasi, Daerah Kota Bekasi, dan Daerah Kabupaten Karawang;
 3. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral wilayah III Cianjur, Kelas A, meliputi wilayah Kerja Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Kota Sukabumi, dan Daerah Kabupaten Sukabumi;

4. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral wilayah IV Bandung, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Bandung, Daerah Kota Cimahi, Daerah Kabupaten Subang, dan Daerah Kabupaten Bandung Barat;
 5. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral wilayah V Sumedang, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Sumedang, Daerah Kabupaten Bandung, dan Daerah Kabupaten Garut;
 6. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral wilayah VI Tasikmalaya, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Tasikmalaya, Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Kota Banjar, Daerah Kabupaten Ciamis, dan Daerah Kabupaten Pangandaran;
 7. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral wilayah VII Cirebon, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Cirebon, Daerah Kabupaten Cirebon, Daerah Kabupaten Majalengka, Daerah Kabupaten Kuningan, dan Daerah Kabupaten Indramayu; dan
 8. UPTD Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral, Kelas A.
- t. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
1. UPTD Industri Logam, Kelas A, membawahkan:
 - a. Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Logam Bandung;
 - b. Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Logam Sukabumi; dan
 - c. Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Logam Bogor.
 2. UPTD Industri Pangan, Olahan dan Kemasan, Kelas A, membawahkan:
 - a. Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Persepatuan Bandung;
 - b. Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Pertekstilan Bandung;
 - c. Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Perkulitan Garut;
 - d. Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Kerajinan Tasikmalaya;
 - e. Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Rotan Cirebon;
 - f. Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Perkayuan Sumedang; dan
 - g. Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Kemasan Bandung.
 3. UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika Karawang, Kelas A;
 4. UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas Bogor, Kelas A;

5. UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Air Minum dalam Kemasan Cirebon, Kelas A; dan
 6. UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro Bandung, Kelas A, membawahkan Satuan Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro Tasikmalaya.
- u. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu UPTD Pengamanan dan Pemanfaatan Aset, Kelas A.
- v. Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
1. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok I, Kelas A;
 2. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok II Cinere, Kelas A;
 3. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bogor, Kelas A;
 4. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor, Kelas A;
 5. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi, Kelas A;
 6. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak, Kelas A;
 7. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi II Palabuhan Ratu, Kelas A;
 8. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur, Kelas A;
 9. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi, Kelas A;
 10. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi, Kelas A;
 11. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang, Kelas A;
 12. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta, Kelas A;
 13. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Subang, Kelas A;
 14. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon, Kelas A;
 15. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber, Kelas A;
 16. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug, Kelas A;
 17. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu I, Kelas A;
 18. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis, Kelas A;
 19. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kuningan, Kelas A;

20. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka, Kelas A;
21. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran, Kelas A;
22. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan, Kelas A;
23. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta, Kelas A;
24. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat, Kelas A;
25. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek, Kelas A;
26. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang, Kelas A;
27. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang, Kelas A;
28. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut, Kelas A;
29. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya, Kelas A;
30. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Kelas A;
31. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis, Kelas A;
32. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Pangandaran, Kelas A;
33. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi, Kelas A; dan
34. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Banjar, Kelas A.

BAB III

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 4

- (1) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang kepala, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang diselenggarakan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang kepala, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas/Badan.
- (3) Satuan pendidikan berkedudukan sebagai UPTD pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang melaksanakan kegiatan teknis operasional penyelenggaraan Pendidikan menengah, dipimpin oleh seorang kepala yang merupakan jabatan fungsional guru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

- (4) Rumah sakit berkedudukan sebagai unit organisasi bersifat khusus pada Dinas Kesehatan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional, bersifat otonom dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian, dipimpin oleh seorang direktur, serta berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (5) Rumah sakit dipimpin oleh seorang Direktur dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian dalam satu tahun satu kali.
- (7) Direktur rumah sakit ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang.

Pasal 5

- (1) Cabang Dinas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi di wilayah kerjanya.
- (2) UPTD mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas/badan.
- (3) Satuan pendidikan Daerah Provinsi mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan Pendidikan menengah.
- (4) Rumah sakit mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam pelayanan Kesehatan, meliputi preventif, promotif dan kuratif.
- (5) Penjabaran tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit, dan tata kerja Cabang Dinas, UPTD, satuan pendidikan, dan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan (4) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Dinas Pendidikan

Paragraf 1

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I

Pasal 6

Susunan organisasi Cabang Dinas pendidikan wilayah I, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II

Pasal 7

Susunan organisasi Cabang Dinas pendidikan wilayah II, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III

Pasal 8

Susunan organisasi Cabang Dinas pendidikan wilayah III, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV

Pasal 9

Susunan organisasi Cabang Dinas pendidikan wilayah IV, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V

Pasal 10

Susunan organisasi Cabang Dinas pendidikan wilayah V, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 6

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI

Pasal 11

Susunan organisasi Cabang Dinas pendidikan wilayah VI, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 7

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII

Pasal 12

Susunan organisasi Cabang Dinas pendidikan wilayah VII, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 8

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII

Pasal 13

Susunan organisasi Cabang Dinas pendidikan wilayah VIII, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 9

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX

Pasal 14

Susunan organisasi Cabang Dinas pendidikan wilayah IX, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 10

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X

Pasal 15

Susunan organisasi Cabang Dinas pendidikan wilayah X, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 11

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI

Pasal 16

Susunan organisasi Cabang Dinas pendidikan wilayah XI, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 12

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII

Pasal 17

Susunan organisasi Cabang Dinas pendidikan wilayah XII, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 13

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII

Pasal 6

Susunan organisasi Cabang Dinas pendidikan wilayah XIII, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 14

UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan

Pasal 19

Susunan organisasi UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 15

Satuan Pendidikan Daerah Provinsi

Pasal 20

- (1) Susunan organisasi UPTD berbentuk satuan pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Atas Negeri, terdiri atas:
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik;
 - c. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana;
 - d. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan; dan
 - e. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPTD berbentuk satuan pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, terdiri atas:
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik;
 - c. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana;
 - d. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan;
 - e. Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Dunia Usaha dan Dunia Industri; dan
 - f. kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan organisasi UPTD berbentuk satuan pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Luar Biasa Negeri, terdiri atas:
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Wakil Kepala Sekolah; dan
 - c. kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Dinas Kesehatan

Paragraf 1

UPTD Laboratorium Kesehatan

Pasal 21

- Susunan organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan, terdiri atas:
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

UPTD Pelatihan Kesehatan

Pasal 22

Susunan organisasi UPTD Pelatihan Kesehatan, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Jiwa

Pasal 23

Susunan organisasi Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Jiwa, terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur Perencanaan, Keuangan, dan Umum, membawahkan:
 1. Bagian Perencanaan dan Hukum;
 2. Bagian Keuangan; dan
 3. Bagian Umum, membawahkan Subbagian Tata Usaha, Hubungan Masyarakat, dan Pemasaran;
- c. Wakil Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan membawahkan:
 1. Bagian Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 2. Bagian Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian.
- d. Wakil Direktur Medis, Keperawatan, dan Penunjang membawahkan:
 1. Bidang Medis;
 2. Bidang Keperawatan; dan
 3. Bidang Penunjang;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 4

Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Paru

Pasal 24

Susunan organisasi Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Paru, terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Bagian Umum dan Keuangan, membawahkan:
 1. Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Kehumasan; dan
 2. Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Pelaporan.

- c. Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis, membawahkan:
 - 1. Seksi Pelayanan Medis; dan
 - 2. Seksi Penunjang Medis.
- d. Bidang Keperawatan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pelayanan Keperawatan; dan
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Keperawatan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 5

Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan

Pasal 25

Susunan organisasi Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan, terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahkan:
 - 1. Bagian Keuangan dan Akuntansi;
 - 2. Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3. Bagian Umum, Hukum dan Masyarakat dan Pemasaran, membawahkan Subbagian tata usaha.
- c. Wakil Direktur Medis, Penunjang dan Keperawatan, membawahkan:
 - 1. Bidang Medis;
 - 2. Bidang Penunjang; dan
 - 3. Bidang Keperawatan.
- d. Wakil Direktur Sumber Daya Manusia dan Pendidikan, membawahkan:
 - 1. Bagian Sumber Daya Manusia; dan
 - 2. Bagian Pendidikan dan Penelitian.
- e. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 6

Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon Sukabumi

Pasal 26

Susunan Organisasi Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon Sukabumi, terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1. Subbagian Kepegawaian dan Umum;

2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
3. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.
- c. Bidang Pelayanan, membawahkan:
 1. Seksi Pelayanan Medis; dan
 2. Seksi Pelayanan Keperawatan.
- d. Bidang Penunjang, membawahkan:
 1. Seksi Penunjang Medis; dan
 2. Seksi Sarana Prasarana.
- e. Bidang Mutu dan Akreditasi, membawahkan:
 1. Seksi Akreditasi; dan
 2. Seksi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dan Rekam Medis.
- f. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Satuan Pelayanan.

Paragraf 7

Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah
Pameungpeuk Garut

Pasal 27

Susunan organisasi Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Pameungpeuk Garut, terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.
- c. Bidang Pelayanan, membawahkan :
 1. Seksi Pelayanan Medis; dan
 2. Seksi Pelayanan Keperawatan.
- d. Bidang Penunjang, membawahkan :
 1. Seksi Penunjang Medis; dan
 2. Seksi Sarana Prasarana.
- e. Bidang Mutu dan Akreditasi, membawahkan :
 1. Seksi Akreditasi; dan
 2. Seksi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dan Rekam Medis.
- f. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Satuan Pelayanan.

Paragraf 8

Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah
Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat

Pasal 28

Susunan organisasi Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Seksi Penunjang Medis dan Non Medis;
- e. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.

Bagian Ketiga

Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang

Paragraf 1

UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I

Pasal 29

Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 2

UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II

Pasal 30

Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 3

UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan III

Pasal 31

Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I, terdiri atas:

- a. Kepala;

- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 4

UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV

Pasal 32

Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 5

UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V

Pasal 33

Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 6

UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI

Pasal 34

Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 7

UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi

Pasal 35

Susunan organisasi UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi, terdiri atas:

- a. Kepala; dan
- b. Subbagian Tata Usaha; dan

- c. kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Dinas Lingkungan Hidup

Paragraf 1

UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup

Pasal 36

Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup, terdiri atas:

- a. Kepala; dan
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

UPTD Pengelolaan Sampah Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPA/TPST) Regional

Pasal 37

Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Sampah TPA/TPST Regional, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Bagian Kelima

Dinas Sumber Daya Air

Paragraf 1

UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane

Pasal 38

Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 2

UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno

Pasal 39

Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 3

UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citarum

Pasal 40

Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citarum, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 4

UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung

Pasal 41

Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 5

UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citanduy

Pasal 42

Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citanduy, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 6

UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai
Ciwulan-Cilaki

Pasal 43

Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Bagian Keenam

Dinas Sosial

Paragraf 1

UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Remaja

Pasal 44

Susunan organisasi UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Remaja, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 2

UPTD Pengembangan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial

Pasal 45

Susunan organisasi UPTD Pengembangan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa

Pasal 46

Susunan organisasi UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 4

UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Ramah Anak

Pasal 47

Susunan organisasi UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Ramah Anak, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 5

UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karya

Pasal 48

Susunan organisasi UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karya, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 6

UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Harapan Difabel

Pasal 49

Susunan organisasi UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Harapan Difabel, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 7

UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Wanita Mandiri

Pasal 50

Susunan organisasi UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Wanita Mandiri, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 8

UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Lansia

Pasal 51

Susunan Organisasi UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Lansia, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Bagian Ketujuh

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana

Paragraf 1

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Jawa Barat

Pasal 52

Susunan organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Jawa Barat, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapan

Dinas Perhubungan

Paragraf 1

UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I

Pasal 53

Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 2

UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II

Pasal 54

Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 3

UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Wilayah III

Pasal 55

Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah III, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 4

UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Wilayah IV

Pasal 56

Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah IV, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 5

UPTD Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Nusawiru

Pasal 57

Susunan organisasi UPTD Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Nusawiru, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 6

UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas
Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Pasal 58

Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 7

UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Pelabuhan Laut

Pasal 59

Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Pelabuhan Laut, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Bagian Kesembilan

Dinas Komunikasi dan Informatika

Paragraf 1

UPTD Pusat Layanan Digital, Data, dan Informasi Geospasial

Pasal 60

Susunan organisasi UPTD Pusat Layanan Digital, Data, dan Informasi Geospasial, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesepuluh

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil

Paragraf 1

UPTD Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan
Wirausaha

Pasal 61

Susunan organisasi UPTD Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan Wirausaha, terdiri atas:

- a. Kepala;

- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesebelas

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Paragraf 1

UPTD Balai Latihan Kerja Kompetensi

Pasal 62

Susunan organisasi UPTD Balai Latihan Kerja Kompetensi, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

UPTD Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia

Pasal 63

Susunan organisasi UPTD Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

UPTD Balai Latihan Kerja Mandiri

Pasal 64

Susunan organisasi UPTD Balai Latihan Kerja Mandiri, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4

UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor

Pasal 65

Susunan organisasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5

UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Karawang

Pasal 66

Susunan organisasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Karawang, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 6

UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III Cirebon

Pasal 67

Susunan organisasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III Cirebon, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 7

UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung

Pasal 68

Susunan organisasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 8

UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V Tasikmalaya

Pasal 69

Susunan organisasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V Tasikmalaya, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keduabelas**Dinas Pariwisata dan Kebudayaan****Paragraf 1****UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat****Pasal 70**

Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Bagian Ketigabelas**Dinas Kelautan dan Perikanan****Paragraf 1****Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan****Pasal 71**

Susunan organisasi Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 2**Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara****Pasal 72**

Susunan organisasi Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 3**UPTD Pelabuhan Perikanan Cilauteureun****Pasal 73**

Susunan organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan Cilauteureun, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;

- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 4

UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem

Pasal 74

Susunan organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 5

UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Produk Perikanan

Pasal 75

Susunan organisasi UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Produk Perikanan, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 6

UPTD Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara

Pasal 76

Susunan organisasi UPTD Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 7

UPTD Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan

Pasal 77

Susunan organisasi UPTD Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;

- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 8

UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Selatan

Pasal 78

Susunan organisasi UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Selatan, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 9

UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Utara

Pasal 79

Susunan organisasi UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Utara, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Bagian Keempatbelas

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Paragraf 1

UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan

Pasal 80

Susunan organisasi UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

UPTD Balai Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan/Bahan Pakan Cikole Lembang

Pasal 81

Susunan organisasi UPTD Balai Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan/Bahan Pakan Cikole Lembang, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

UPTD Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan
Pakan Ternak Cikole Lembang

Pasal 82

Susunan organisasi UPTD Balai Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan/Bahan Pakan Cikole Lembang, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 4

UPTD Balai Pelatihan Peternakan dan Ketahanan Pangan
Cikole Lembang

Pasal 83

Susunan organisasi UPTD Balai Pelatihan Peternakan dan Ketahanan Pangan Cikole Lembang, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5

UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi
Buatan Ternak Sapi Potong Ciamis

Pasal 84

Susunan organisasi UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong Ciamis, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 6

UPTD Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas
Jatiwangi

Pasal 85

Susunan organisasi UPTD Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas Jatiwangi, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 7

UPTD Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba dan Kambing Margawati

Pasal 86

Susunan organisasi UPTD Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba dan Kambing Margawati, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 8

UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 87

Susunan organisasi UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 9

UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah Bunikasih

Pasal 88

Susunan organisasi UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah Bunikasih, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 10

UPTD Rumah Sakit Hewan

Pasal 89

Susunan organisasi UPTD Rumah Sakit Hewan, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelimabelas
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Paragraf 1

UPTD Balai Benih Kentang

Pasal 90

Susunan organisasi UPTD Balai Benih Kentang, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 2

UPTD Balai Benih Hortikultura

Pasal 91

Susunan organisasi UPTD Balai Benih Hortikultura, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 3

UPTD Balai Benih Padi dan Palawija

Pasal 92

Susunan organisasi UPTD Balai Benih Padi dan Palawija, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 4

UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan
dan Hortikultura

Pasal 93

Susunan organisasi UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 5

UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 94

Susunan organisasi UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 6

UPTD Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 95

Susunan organisasi UPTD Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 7

UPTD Balai Pengembangan Mekanisasi Pertanian

Pasal 96

Susunan organisasi UPTD Balai Pengembangan Mekanisasi Pertanian, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Bagian Keenambelas

Dinas Perkebunan

Paragraf 1

UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan

Pasal 97

Susunan organisasi UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 2

UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan

Pasal 98

Susunan organisasi UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 3

UPTD Balai Perlindungan Perkebunan

Pasal 99

Susunan organisasi UPTD Balai Perlindungan Perkebunan, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Bagian Ketujuhbelas

Dinas Perumahan dan Permukiman

Paragraf 1

UPTD Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Jawa Barat

Pasal 100

Susunan organisasi UPTD Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Jawa Barat, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapanbelas

Dinas Kehutanan

Paragraf 1

Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I

Pasal 101

Susunan organisasi Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 2

Cabang Dinas Kehutanan Wilayah II

Pasal 102

Susunan organisasi Cabang Dinas Kehutanan Wilayah II, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 3

Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III

Pasal 103

Susunan organisasi Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 4

Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IV

Pasal 104

Susunan organisasi Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IV, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 5

Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V

Pasal 105

Susunan organisasi Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 6

Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI

Pasal 106

Susunan organisasi Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 7

Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VII

Pasal 107

Susunan organisasi Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VII, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 8

Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII

Pasal 108

Susunan organisasi Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 9

Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX

Pasal 109

Susunan organisasi Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 10

UPTD Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda

Pasal 110

Susunan Organisasi UPTD Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 11

UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan

Pasal 111

Susunan organisasi UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 12

UPTD Pelayanan Pengolahan Hasil Hutan

Pasal 112

Susunan organisasi UPTD Pelayanan Pengolahan Hasil Hutan, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesembilanbelas

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Paragraf 1

Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I Bogor

Pasal 113

Susunan organisasi Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I Bogor, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah II
Purwakarta

Pasal 114

Susunan organisasi Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah II Purwakarta, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah III
Cianjur

Pasal 115

Susunan organisasi Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah III Cianjur, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4

Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah IV
Bandung

Pasal 116

Susunan organisasi Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah IV Bandung, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5

Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah V
Sumedang

Pasal 117

Susunan organisasi Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah V Sumedang, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 6

Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah VI
Tasikmalaya

Pasal 118

Susunan organisasi Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah VI Tasikmalaya, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 7

Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah VII
Cirebon

Pasal 119

Susunan organisasi Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah VII Cirebon, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 8

UPTD Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 120

Susunan organisasi UPTD Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keduapuluh

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Paragraf 1

UPTD Industri Logam

Pasal 121

Susunan organisasi UPTD Industri Logam, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 2

UPTD Industri Pangan, Olahan, dan Kemasan

Pasal 122

Susunan organisasi UPTD Industri Pangan, Olahan, dan Kemasan, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 3

UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika Karawang

Pasal 123

Susunan organisasi UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika Karawang, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4

UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas Bogor

Pasal 124

Susunan organisasi UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas Bogor, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5

UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Air Minum Dalam Kemasan Cirebon

Pasal 125

Susunan organisasi UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Air Minum Dalam Kemasan Cirebon, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 6

UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro
Bandung

Pasal 126

Susunan organisasi UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro Bandung, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Bagian Keduapuluhsatu

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Paragraf 1

UPTD Pengamanan dan Pemanfaatan Aset

Pasal 127

Susunan organisasi UPTD Pengamanan dan Pemanfaatan Aset, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keduapuluhdua

Badan Pendapatan Daerah

Paragraf 1

UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota
Depok I

Pasal 128

Susunan organisasi UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 2

UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok
II Cinere

Pasal 129

Susunan organisasi UPTD UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok II Cinere, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 3

UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bogor

Pasal 130

Susunan organisasi UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bogor, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 4

UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor

Pasal 131

Susunan organisasi UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 5

UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi

Pasal 132

Susunan organisasi UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 6

UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak

Pasal 133

Susunan organisasi UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 7

UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhanratu

Pasal 134

Susunan organisasi UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhanratu, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 8

UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur

Pasal 135

Susunan organisasi UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 9

UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi

Pasal 136

Susunan Organisasi UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan

d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 10

UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi

Pasal 137

Susunan organisasi UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 11

UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang

Pasal 138

Susunan organisasi UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 12

UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta

Pasal 139

Susunan organisasi UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 13

UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Subang

Pasal 140

Susunan organisasi UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Subang, terdiri atas:

- a. Kepala;

- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 14

UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon

Pasal 141

Susunan organisasi UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 15

UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber

Pasal 142

Susunan organisasi UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 16

UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug

Pasal 143

Susunan organisasi UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 17

UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu I

Pasal 144

Susunan organisasi UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu I, terdiri atas:

- a. Kepala;

- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 18

UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten
Indramayu II Haurgeulis

Pasal 145

Susunan organisasi UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 19

UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten
Kuningan

Pasal 146

Susunan organisasi UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kuningan, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 20

UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten
Majalengka

Pasal 147

Susunan organisasi UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 21

UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota
Bandung I Pajajaran

Pasal 148

Susunan organisasi UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran, terdiri atas:

- a. Kepala;

- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 22

UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan

Pasal 149

Susunan organisasi UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 23

UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta

Pasal 150

Susunan organisasi UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 24

UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat

Pasal 151

Susunan organisasi UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 25

UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek

Pasal 152

Susunan organisasi UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 26

UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang

Pasal 153

Susunan organisasi UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 27

UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang

Pasal 154

Susunan organisasi UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 28

UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut

Pasal 155

Susunan organisasi UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan

d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 29

UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota
Tasikmalaya

Pasal 156

Susunan organisasi UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 30

UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten
Tasikmalaya

Pasal 157

Susunan organisasi UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 31

UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten
Ciamis

Pasal 158

Susunan organisasi UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 32

UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah
Kabupaten Pangandaran

Pasal 159

Susunan organisasi UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah Kabupaten Pangandaran, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;

- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 33

UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota
Cimahi

Pasal 160

Susunan organisasi UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah Kota Cimahi, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

Paragraf 34

UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota
Banjar

Pasal 161

Susunan organisasi UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah Kota Banjar, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Satuan Pelayanan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 162

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama masing-masing.
- (4) Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Jumlah tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- (7) Rincian tugas kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SATUAN PELAYANAN

Pasal 163

- (1) Satuan Pelayanan pada Cabang Dinas dan UPTD merupakan Satuan Pelayanan non struktural sebagai unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Cabang Dinas atau Kepala UPTD.
- (2) Setiap Satuan Pelayanan pada Cabang Dinas dan UPTD dipimpin oleh seorang Pejabat Pelaksana yang ditunjuk oleh Kepala Dinas atau Kepala Badan untuk memimpin pelaksanaan tugas koordinasi diantara Pejabat Pelaksana pada Satuan Pelayanan.
- (3) Pejabat Pelaksana yang ditunjuk untuk memimpin pelaksanaan tugas koordinasi diantara pejabat pelaksana pada Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), minimal golongan III/b dan maksimal golongan IV/b.
- (4) Satuan Pelayanan pada Cabang Dinas atau UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu pada Cabang Dinas atau UPTD.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Pelaksana yang ditunjuk untuk memimpin pelaksanaan tugas koordinasi diantara pejabat pelaksana pada Satuan Pelayanan ditetapkan oleh Kepala Dinas atau Kepala Badan.
- (6) Tunjangan untuk jabatan pelaksana yang ditunjuk untuk memimpin pelaksanaan tugas koordinasi diantara pejabat pelaksana pada Satuan Pelayanan ditetapkan oleh gubernur yang bersumber dari APBD yang dikelola oleh Dinas atau Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 164

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Cabang Dinas, Kepala UPTD, Direktur Rumah Sakit, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Tata Usaha Sekolah, kelompok Jabatan Fungsional, dan Koordinator Satuan Pelayanan, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, dalam lingkungan masing-masing dan antar satuan organisasi di lingkungan Cabang Dinas dan UPTD, Rumah Sakit dan Satuan Pendidikan.

- (2) Kepala Cabang Dinas, Kepala UPTD, Direktur Rumah Sakit dan Kepala Sekolah, wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Cabang Dinas, Kepala UPTD, Direktur Rumah Sakit dan Kepala Sekolah bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Cabang Dinas, Kepala UPTD, Direktur Rumah Sakit dan Kepala Sekolah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Cabang Dinas, Kepala UPTD, Direktur Rumah Sakit dan Kepala Sekolah dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Cabang Dinas, Kepala UPTD dan unit organisasi di bawahnya, wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
- (7) Dalam hal Kepala Cabang Dinas/Kepala UPTD/Direktur Rumah Sakit/Kepala Sekolah berhalangan, maka diwakilkan kepada Kepala Subbagian Tata Usaha/Wakil Direktur Rumah Sakit Daerah yang membidangi Kesekretariatan/Wakil Kepala Sekolah yang membidangi Pendidikan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 165

Pembiayaan Cabang Dinas, UPTD, Rumah Sakit, dan Satuan Pendidikan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
- b. Sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 166

- (1) Hal-hal yang menyangkut pembiayaan, personil, perlengkapan, dan dokumentasi harus sudah diselesaikan paling lambat pada bulan Agustus 2022.
- (2) Rumah Sakit di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), masih menerapkan PPK-BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 167

Pada saat Peraturan Gubernur mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 69);
- b. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 21);
- c. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 62);
- d. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa barat Tahun 2020 Nomor 70);
- e. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa barat Tahun 2021 Nomor 45); dan
- f. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 176 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 176),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 168

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Juli 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 1 Juli 2022

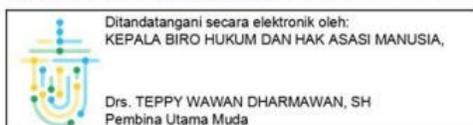
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



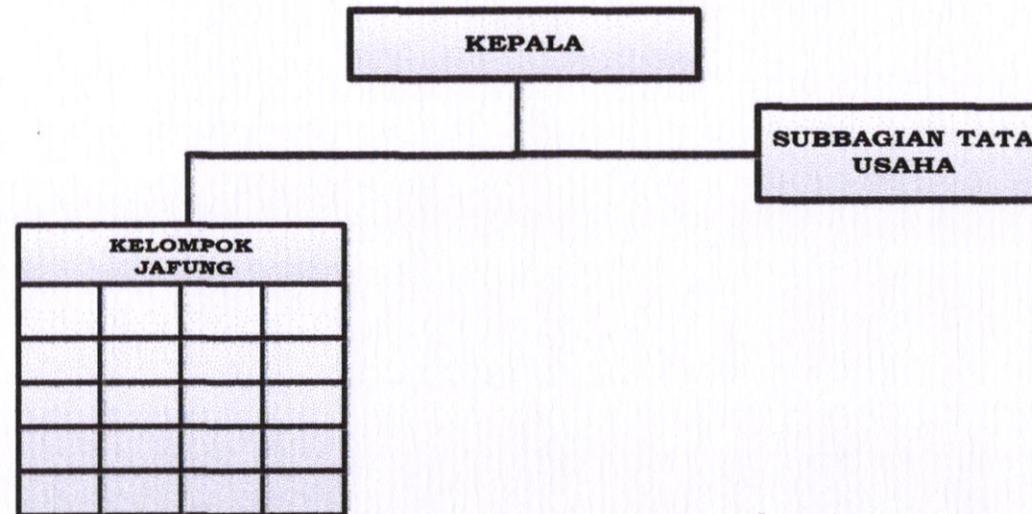
LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 30 TAHUN 2022

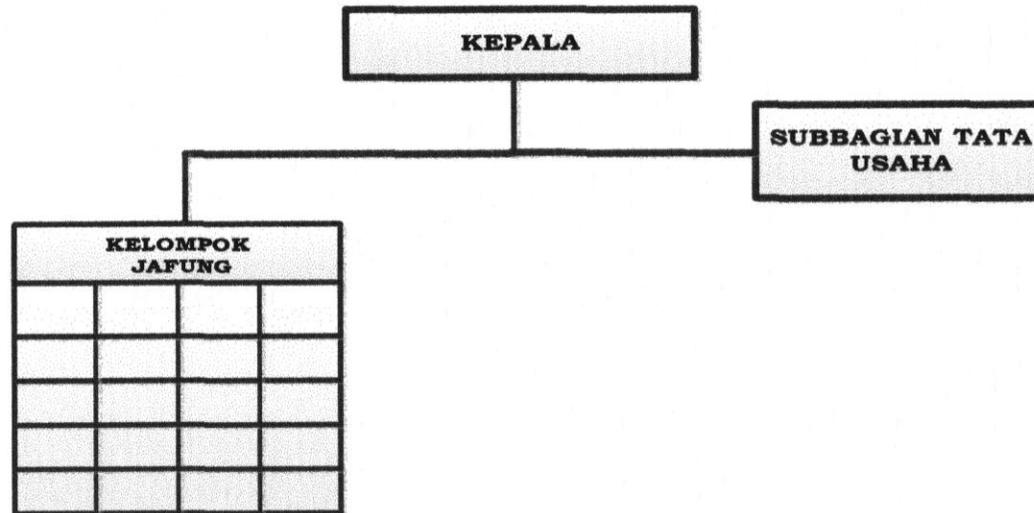
TANGGAL : 1 JULI 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI CABANG DINAS, UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH, DAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

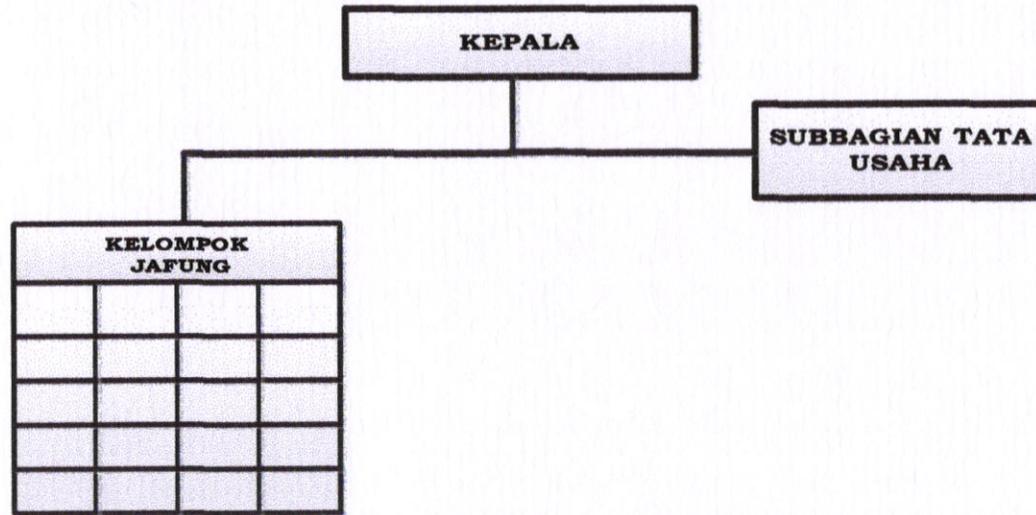
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I



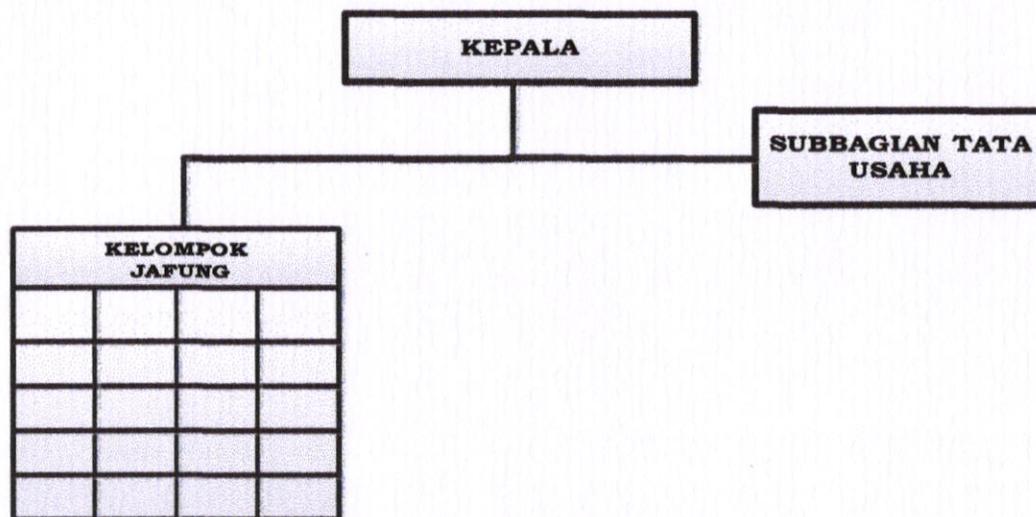
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II



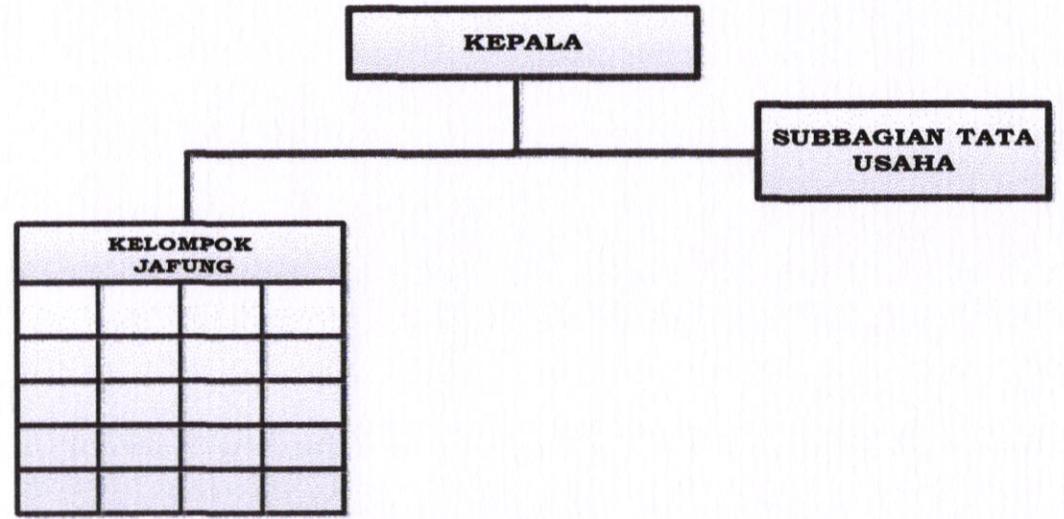
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III



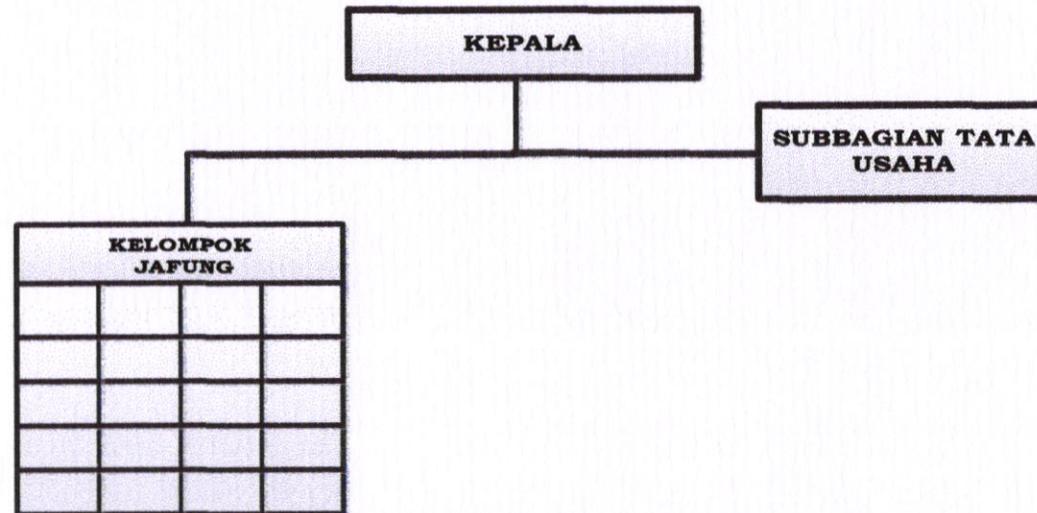
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV



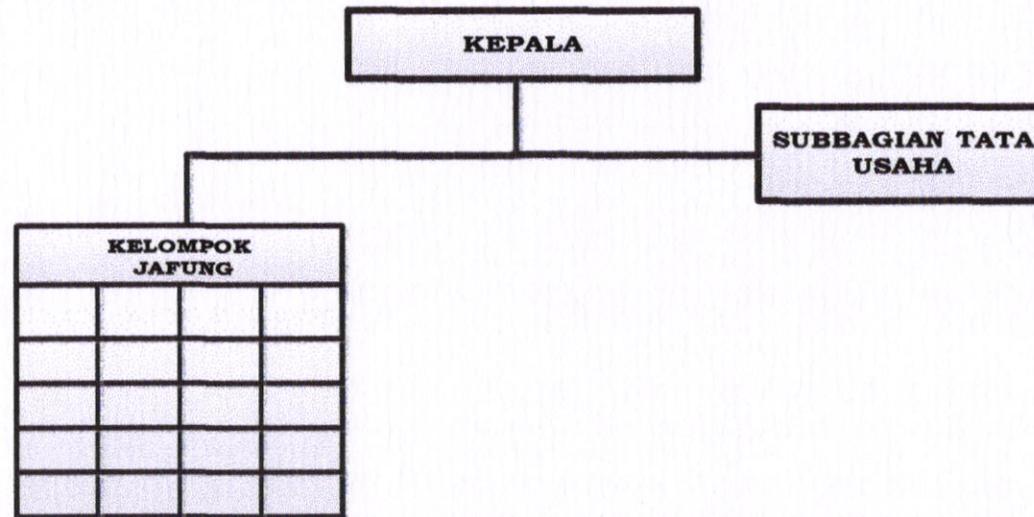
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V



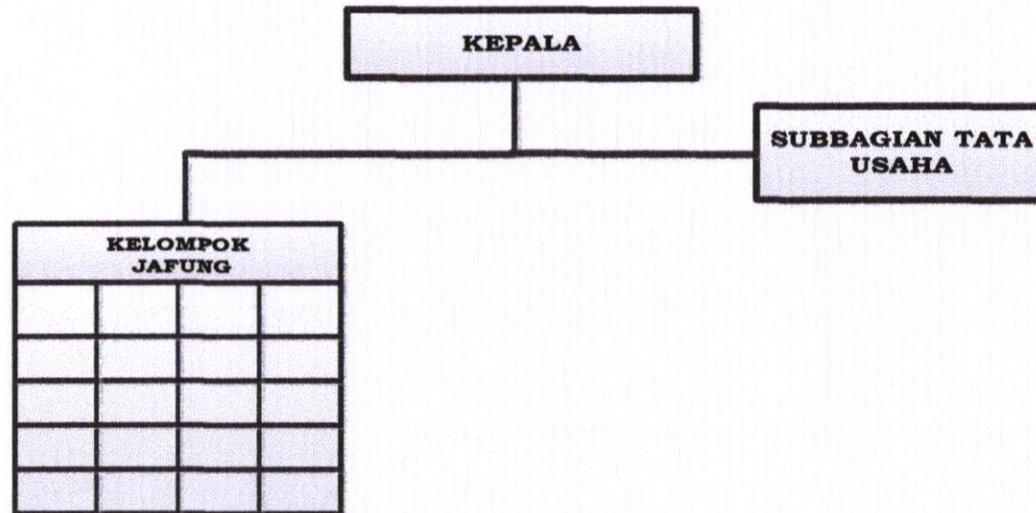
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI



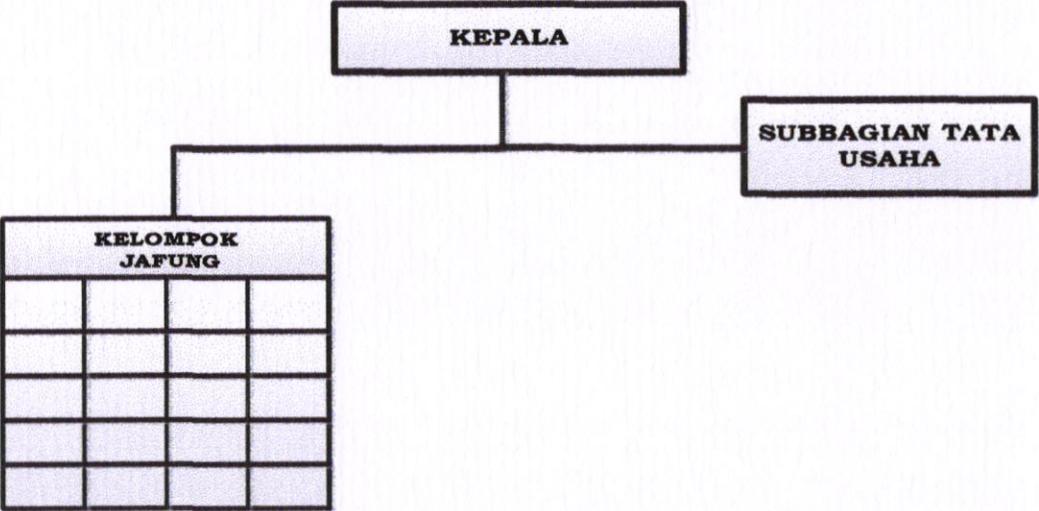
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII



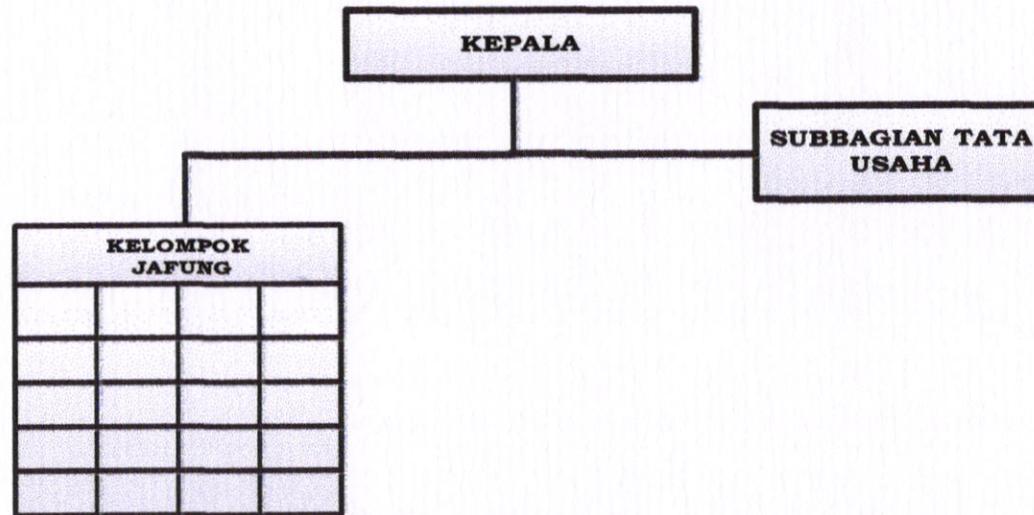
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII



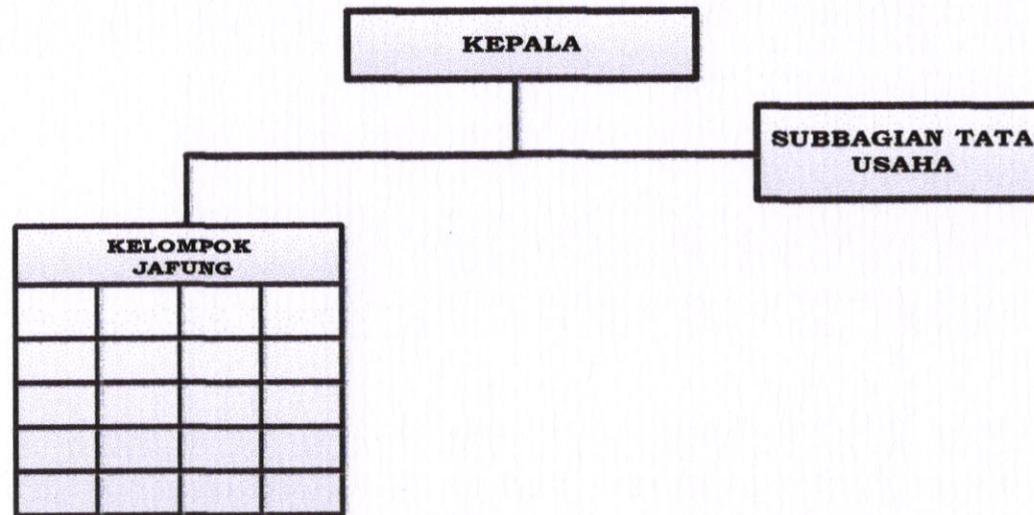
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IX



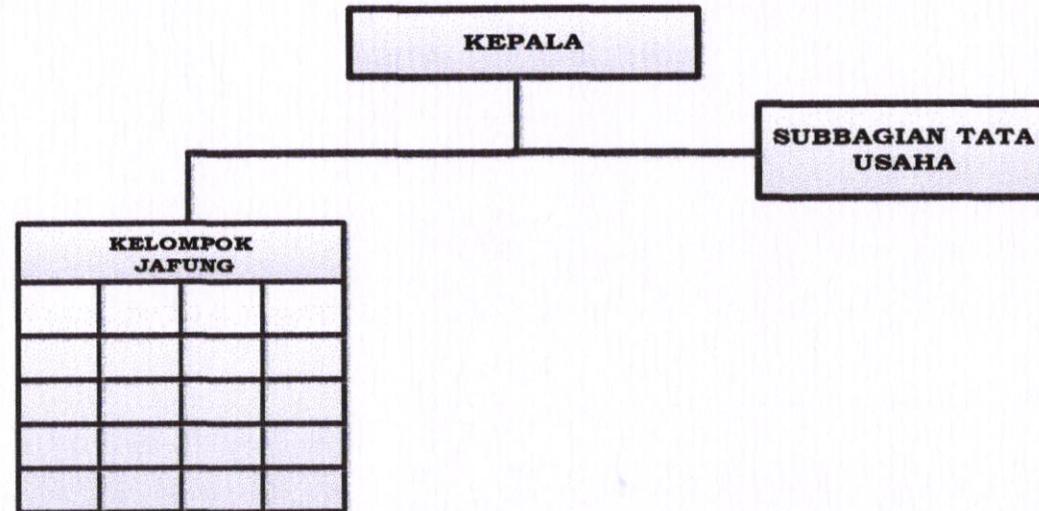
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH X



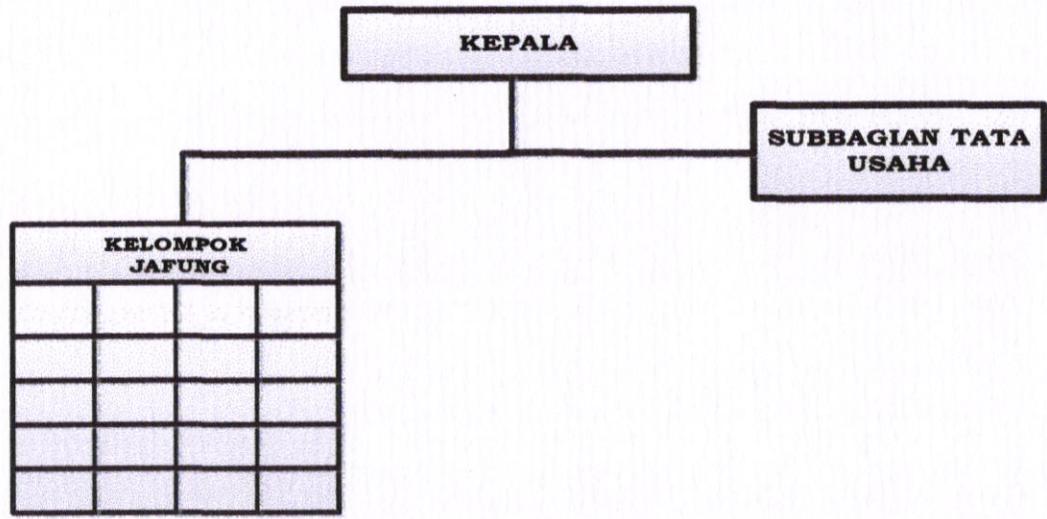
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH XI



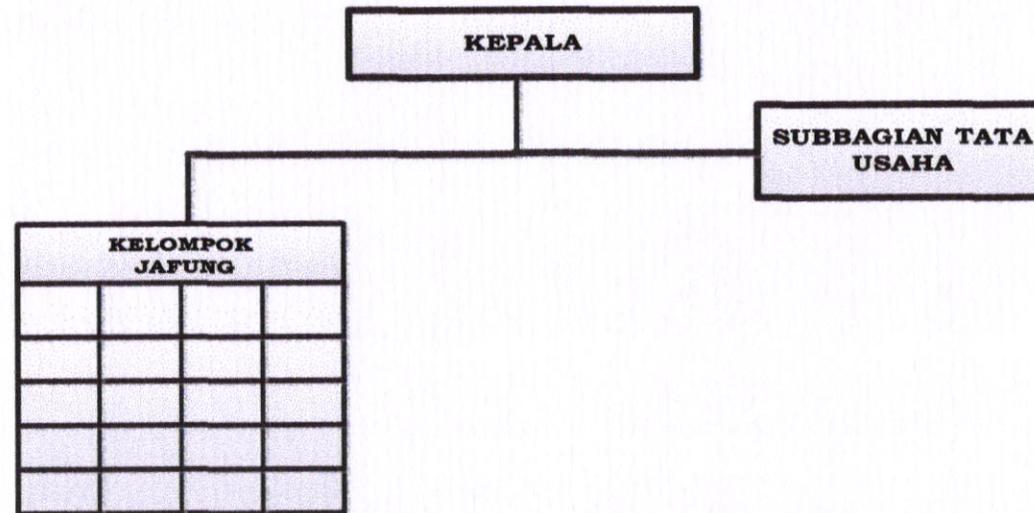
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH XII



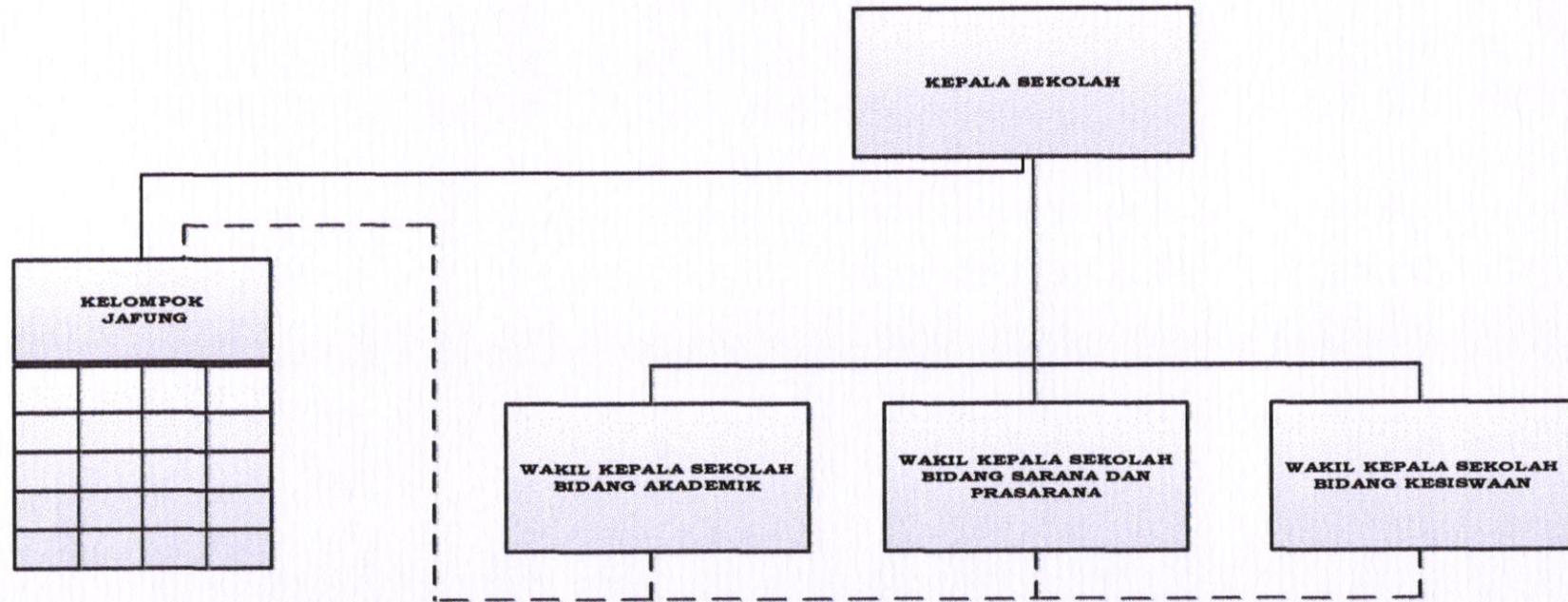
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH XIII



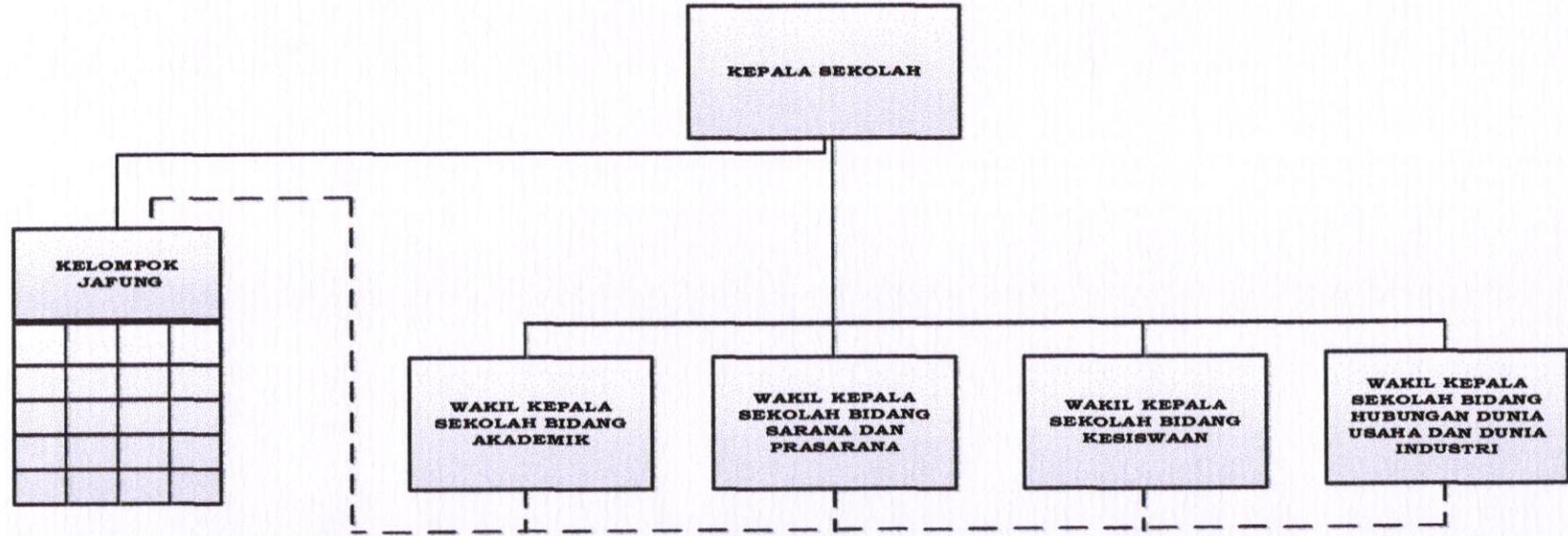
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN



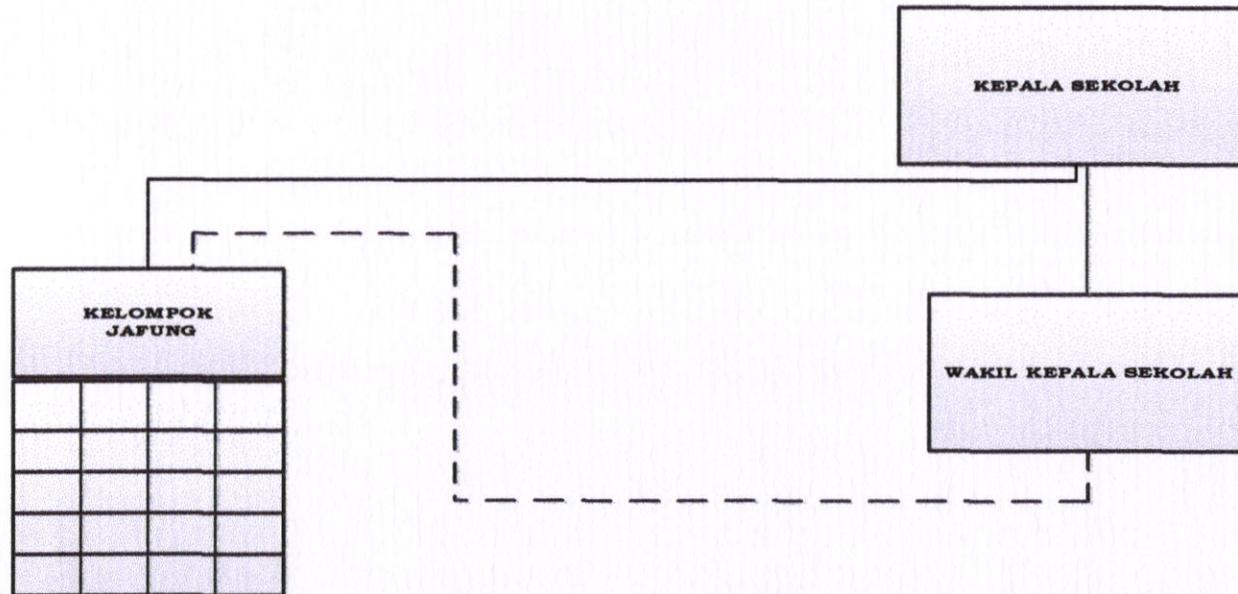
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI



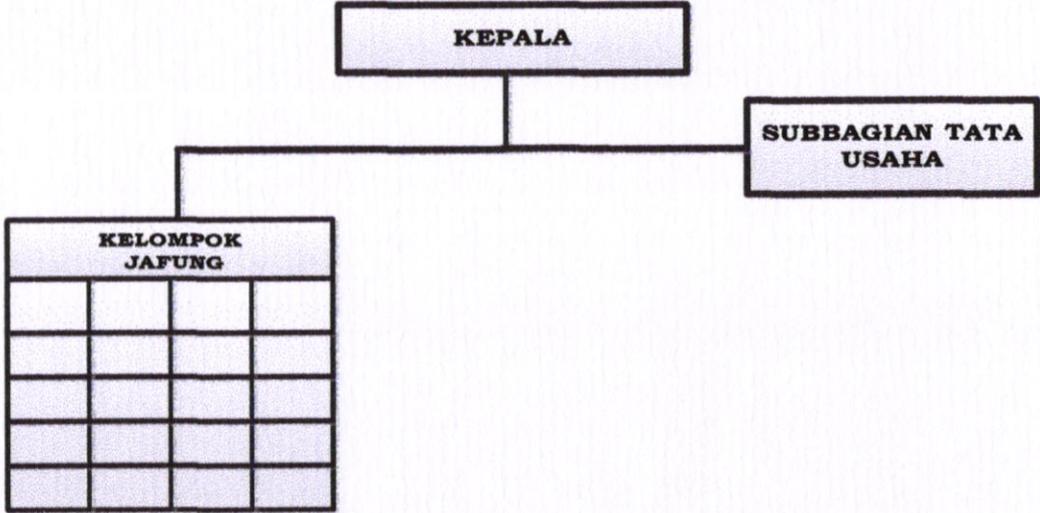
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI



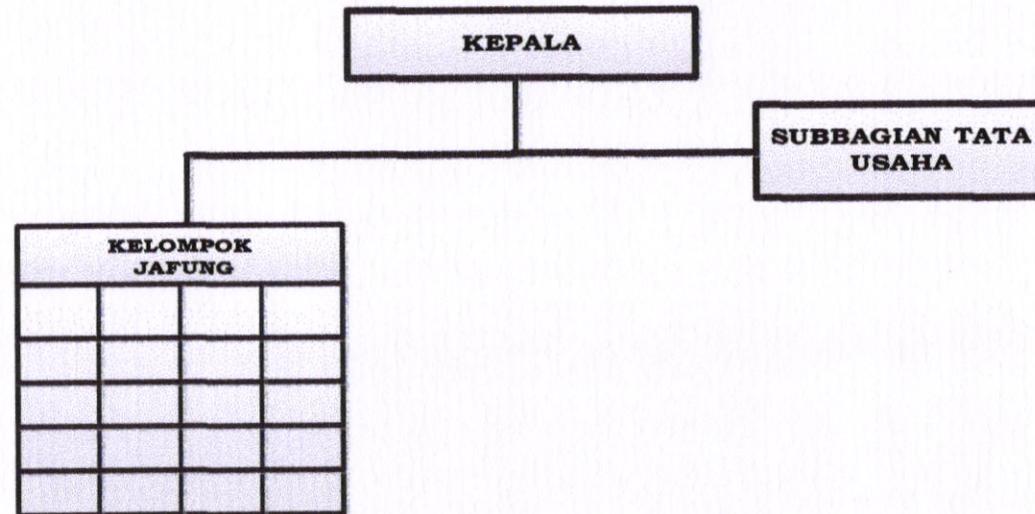
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI
SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI



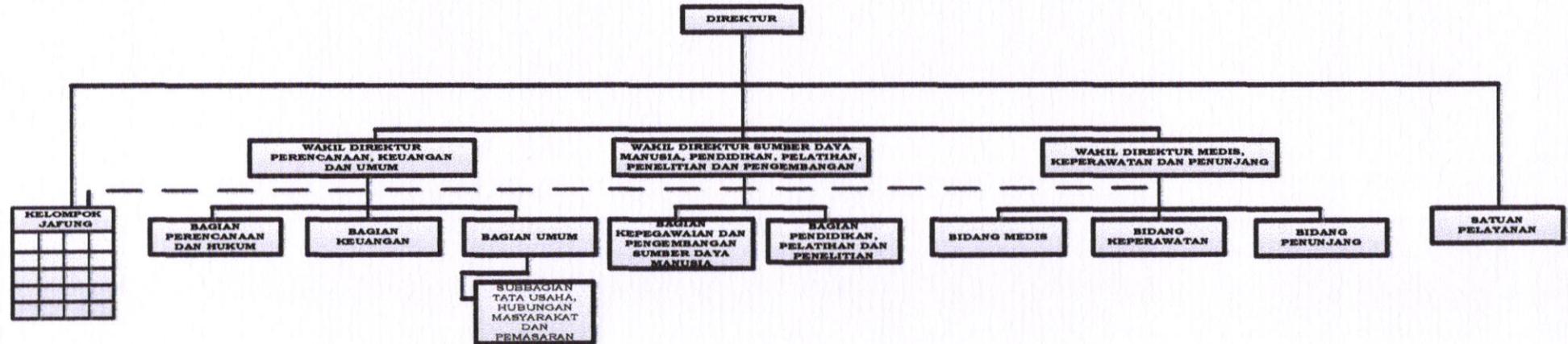
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN



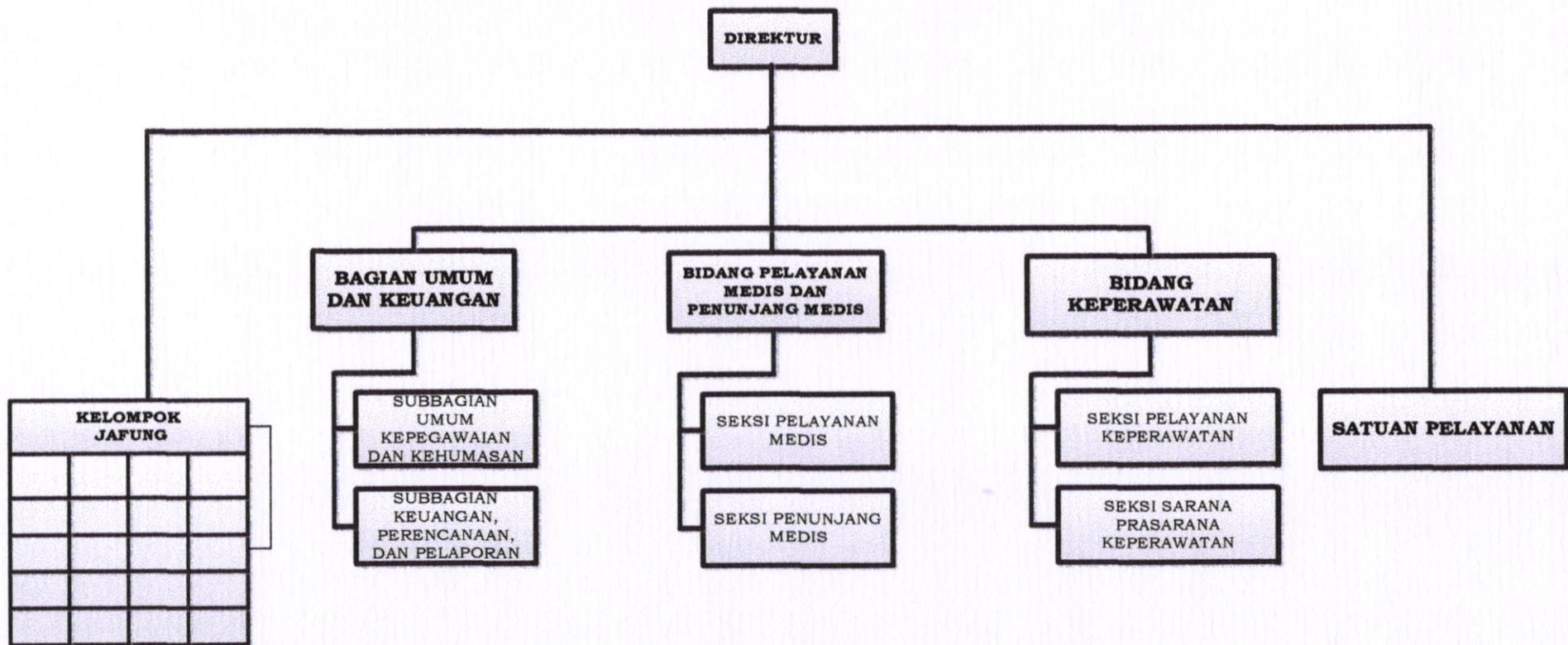
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PELATIHAN KESEHATAN



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA

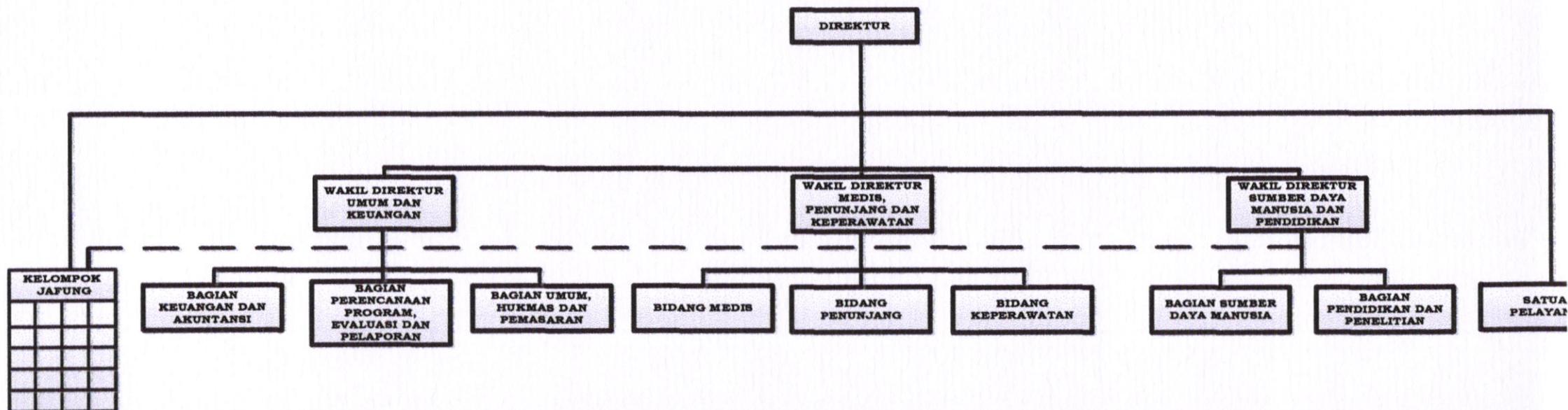


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT PARU



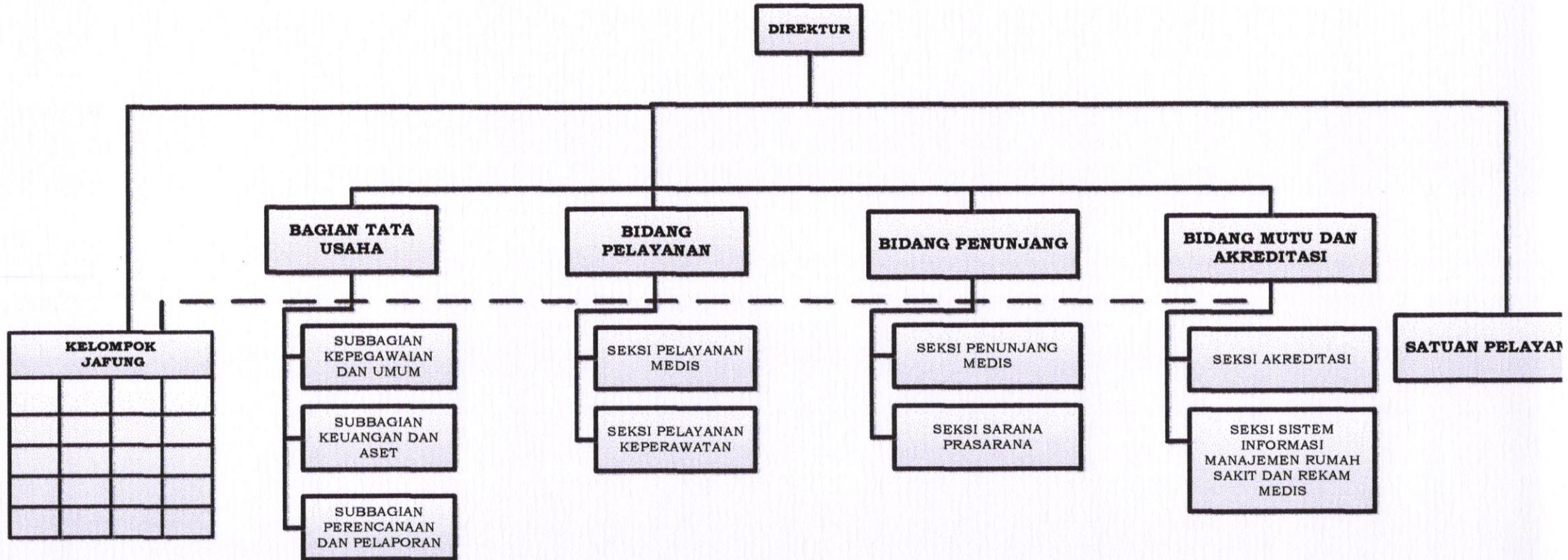
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL IHSAN

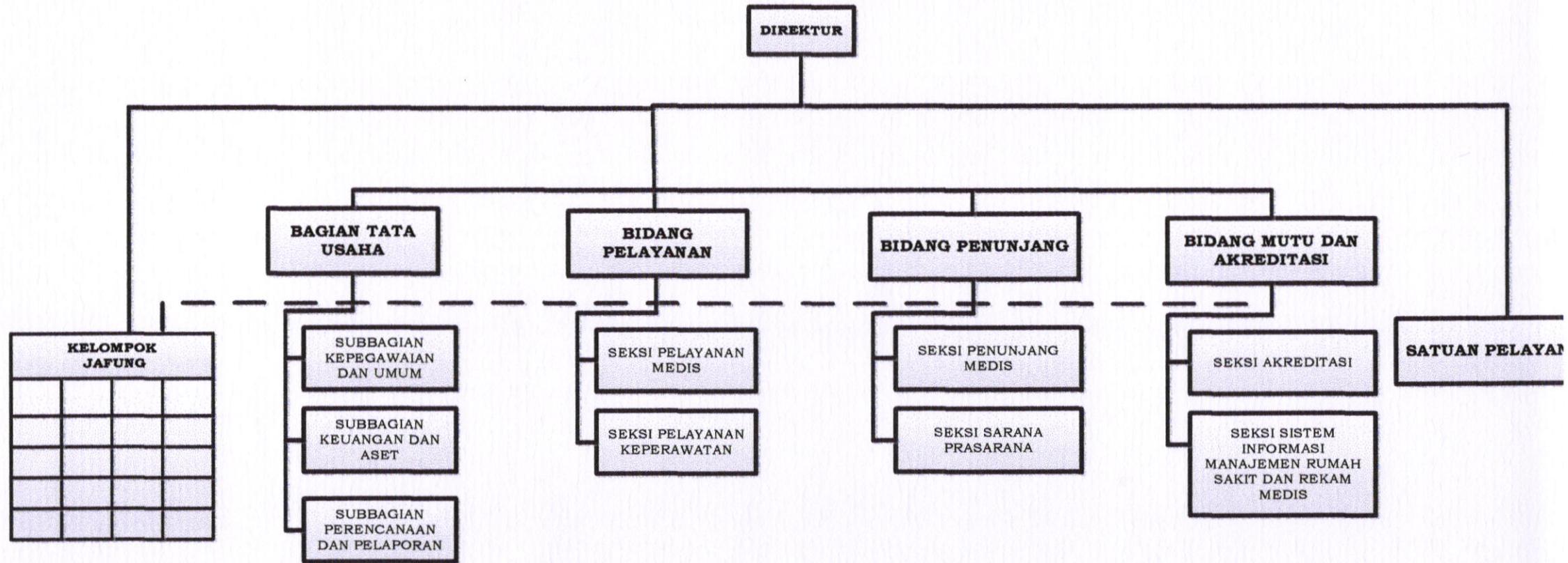


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAMPANG KULON SUKABUMI

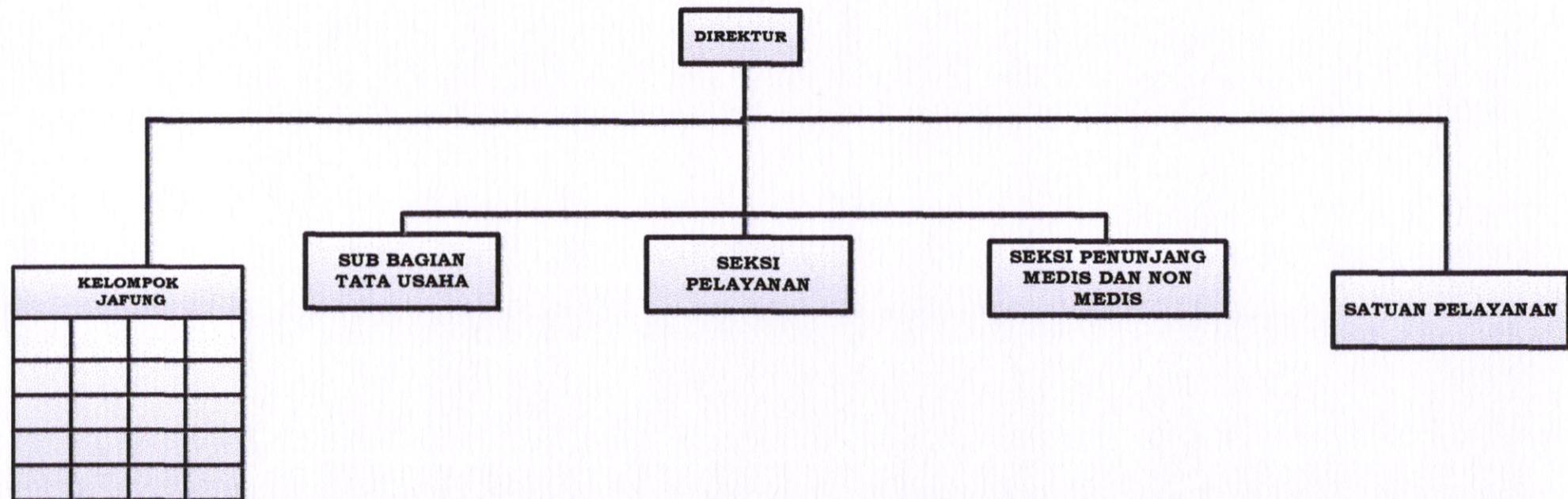


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAMEUNGPEUK GARUT

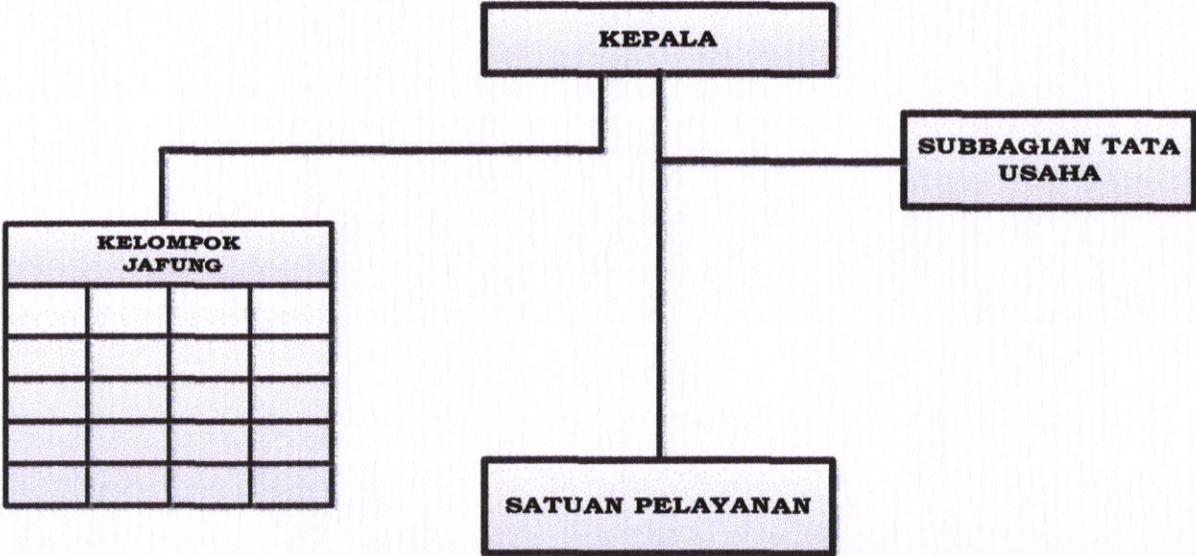


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

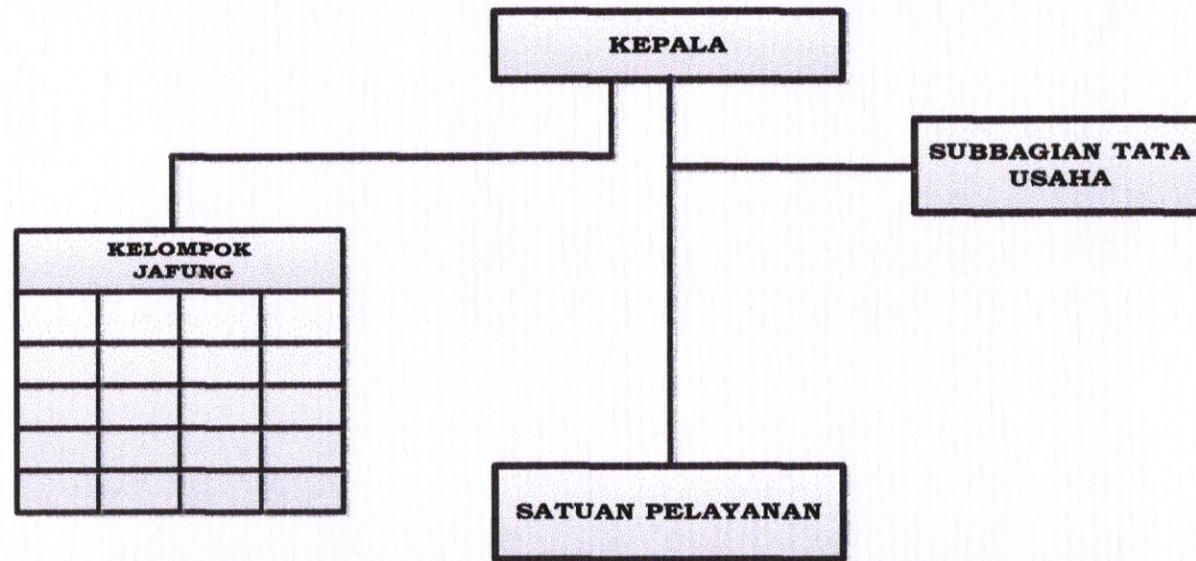
UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KESEHATAN KERJA PROVINSI JAWA BARAT



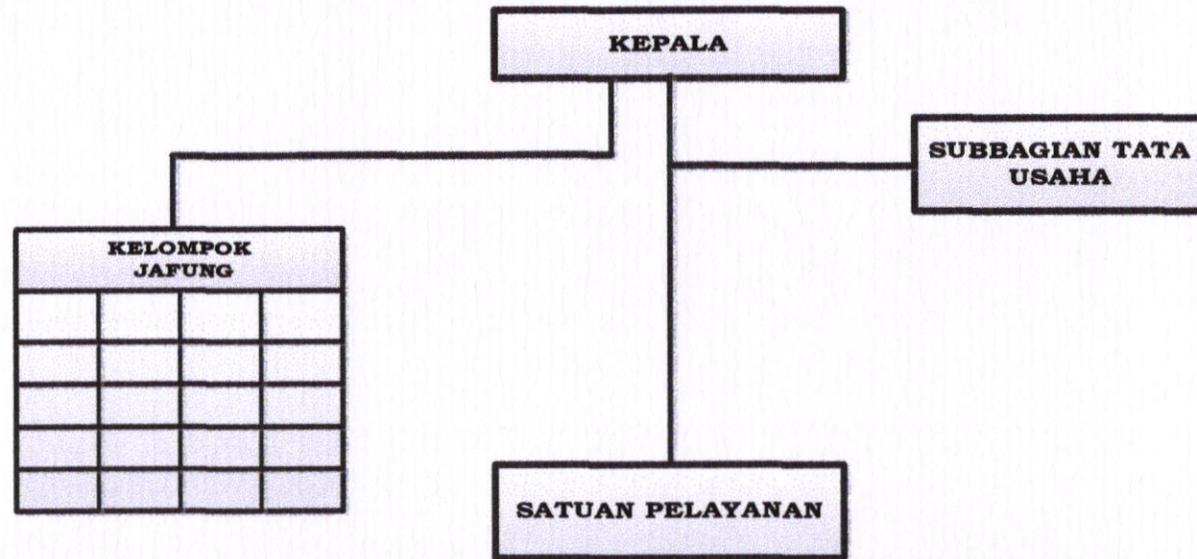
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN I



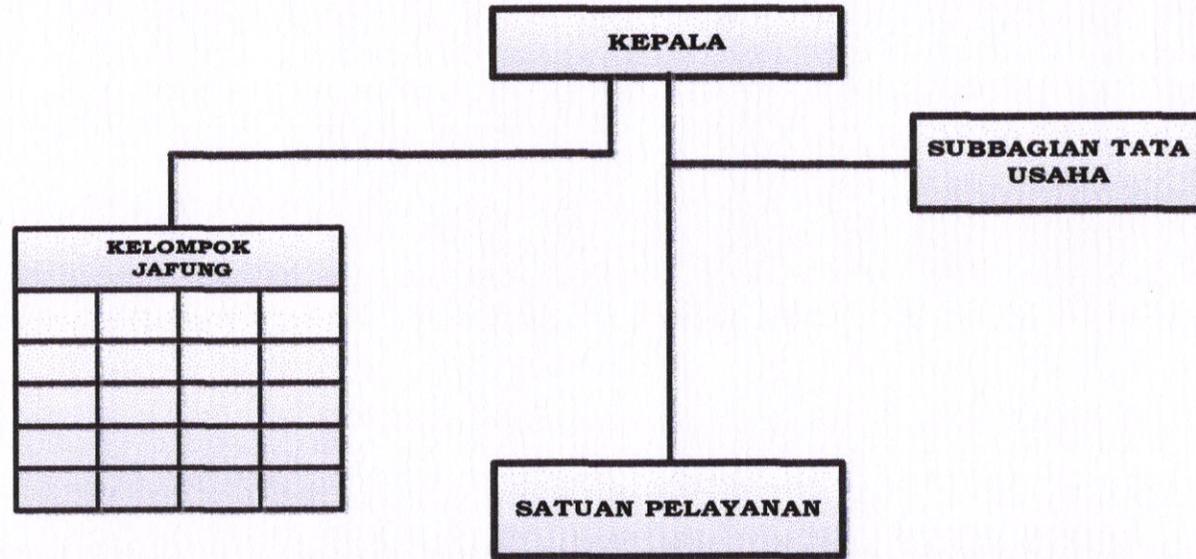
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN II



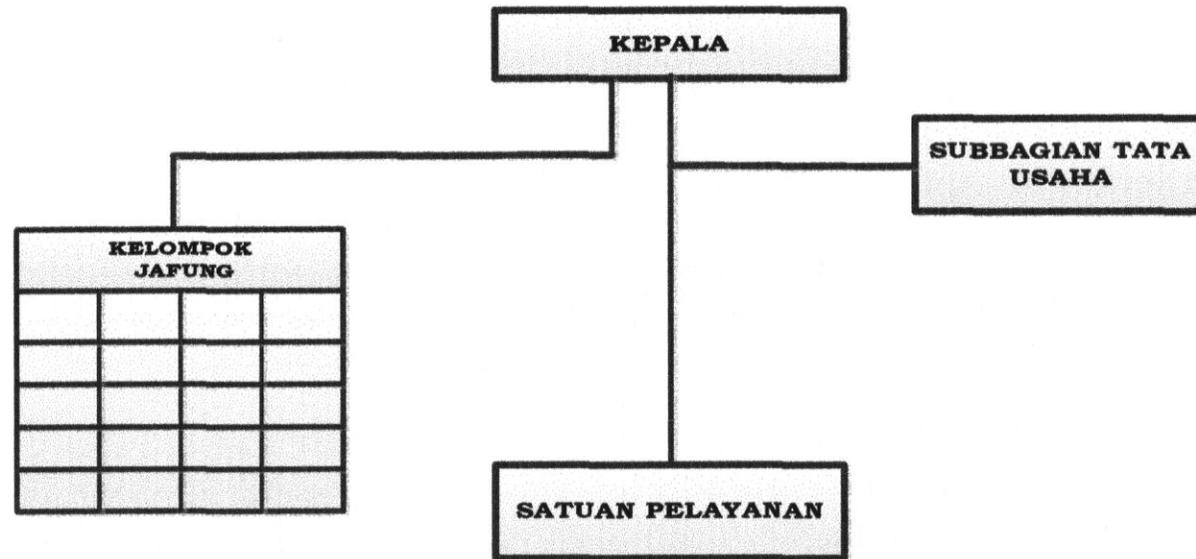
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN III



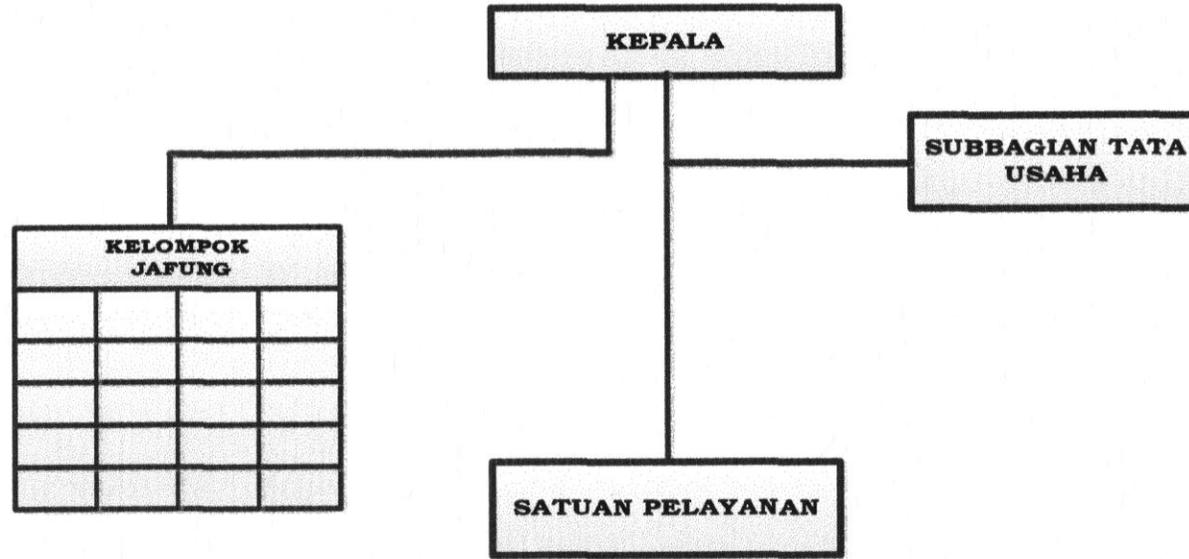
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN IV



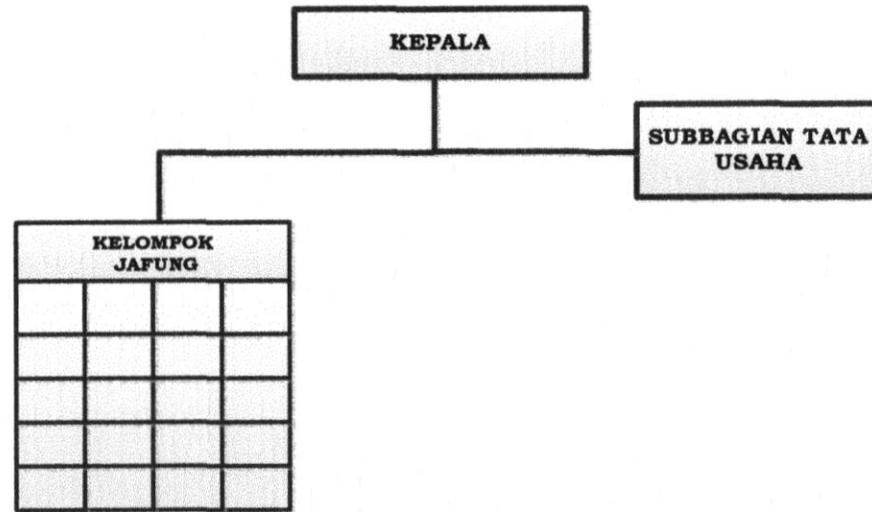
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN V



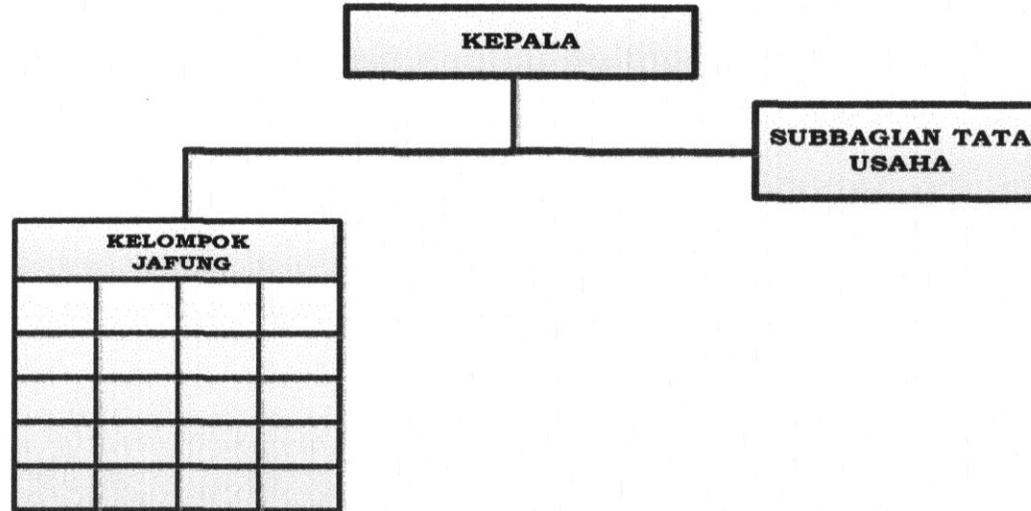
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN VI



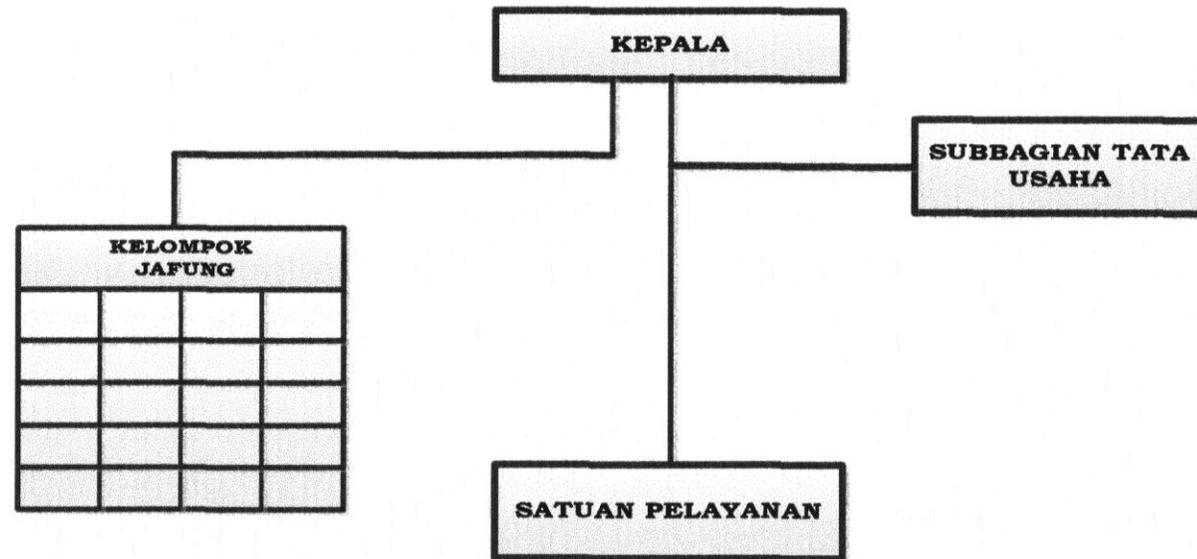
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI



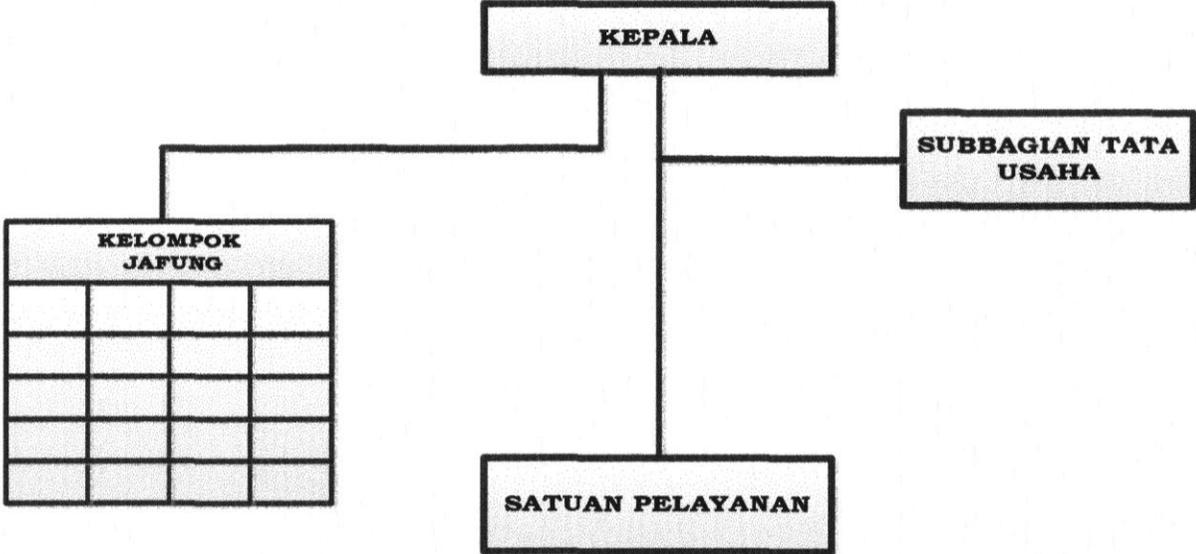
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP



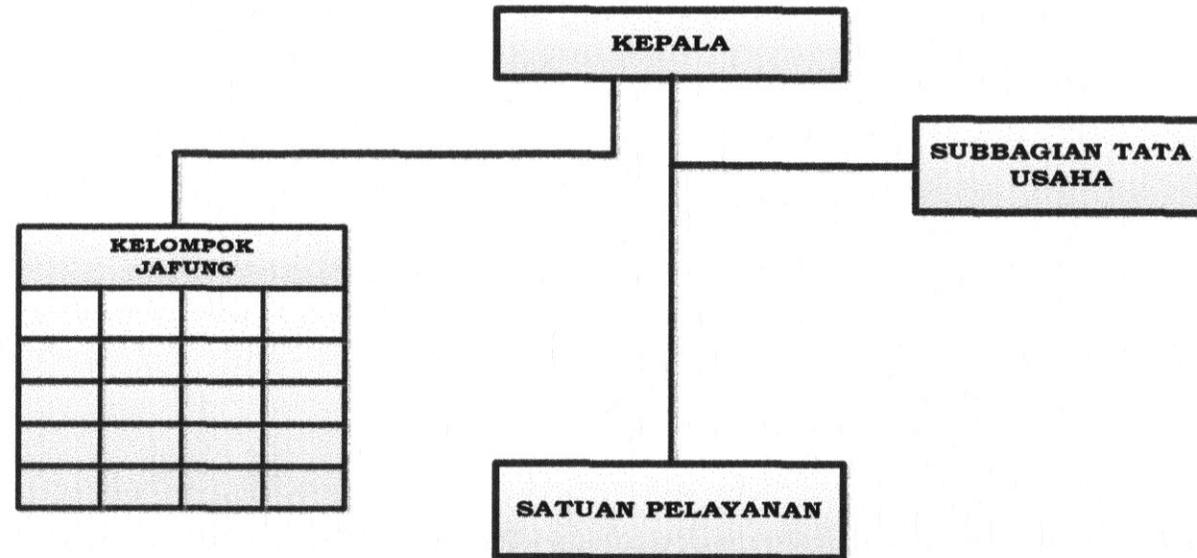
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN SAMPAH TEMPAT PEMROSESAN AKHIR/TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU
REGIONAL



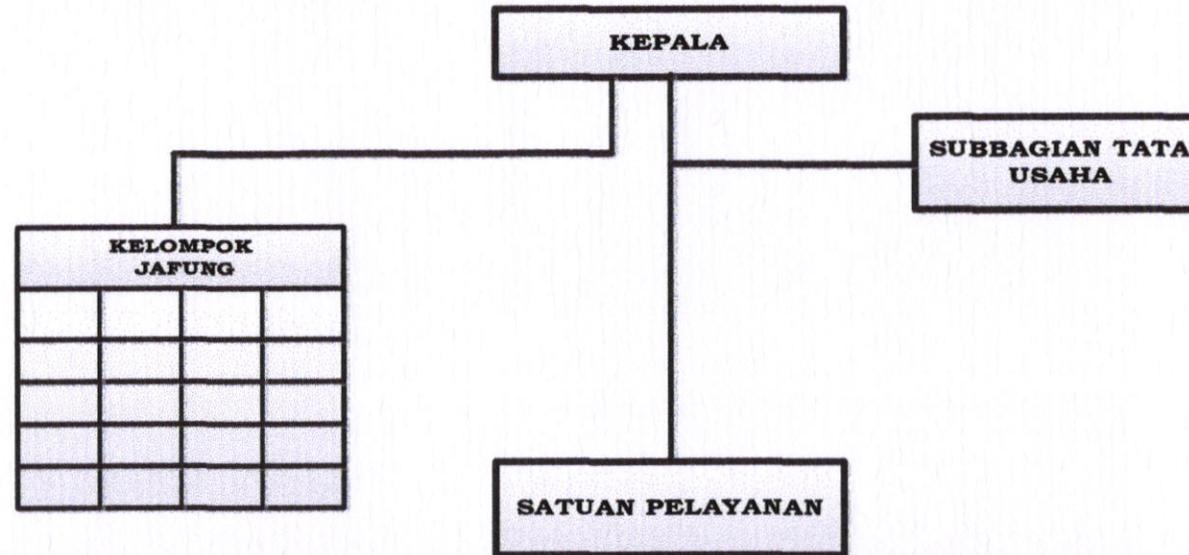
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI CILIWUNG-CISADANE



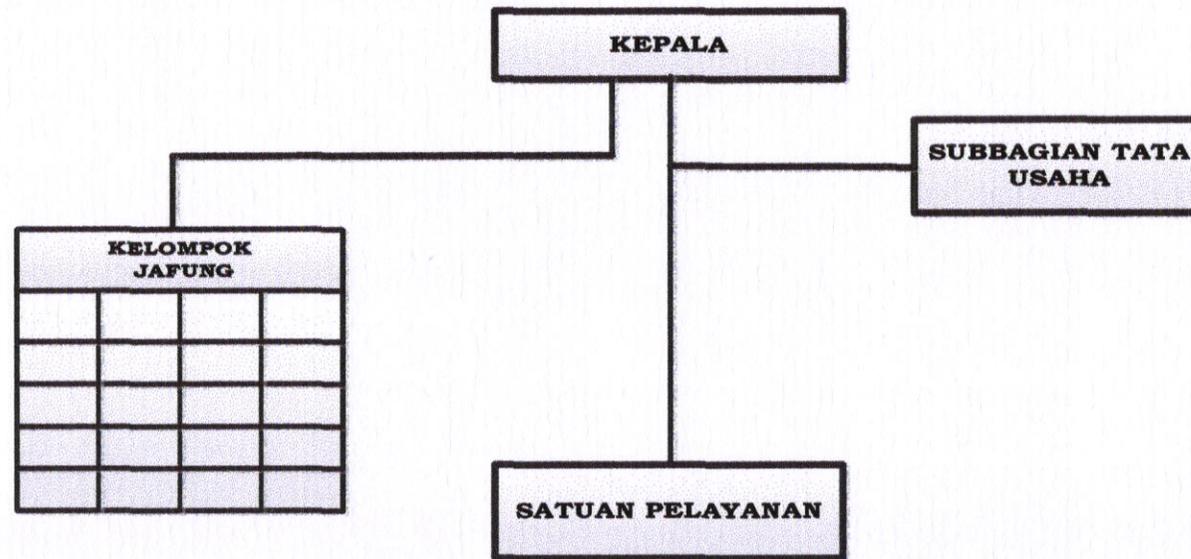
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI CISADEA-CIBARENO



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI CITARUM

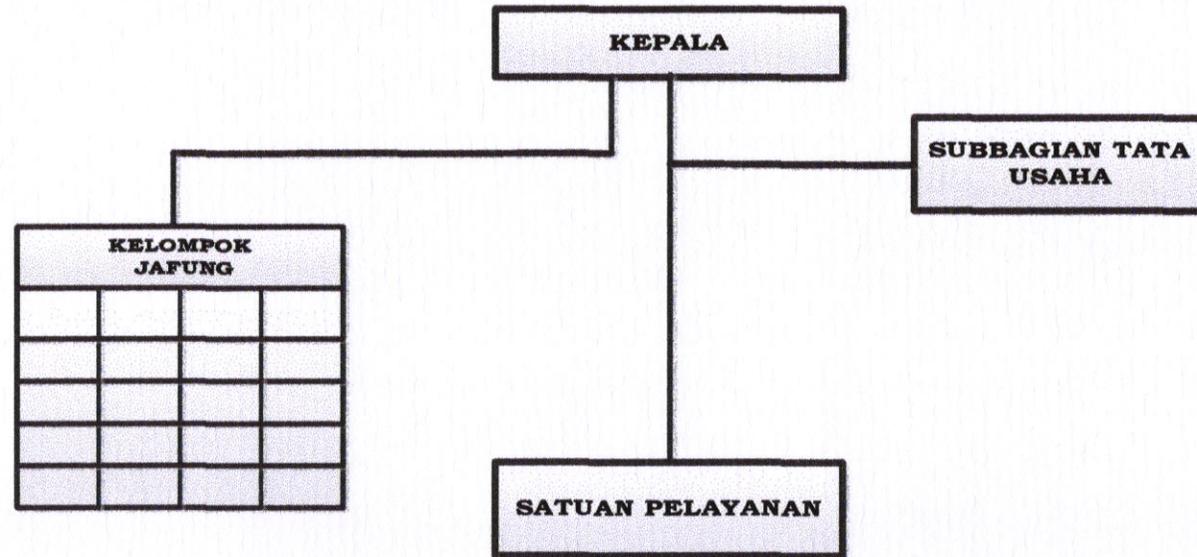


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI CIMANUK-CISANGGARUNG

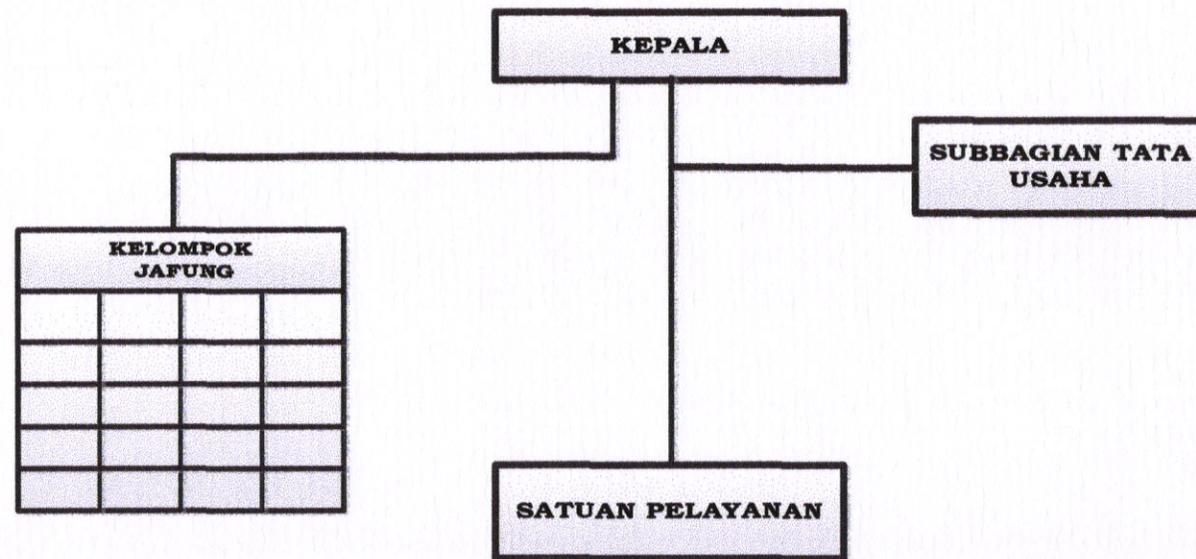


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

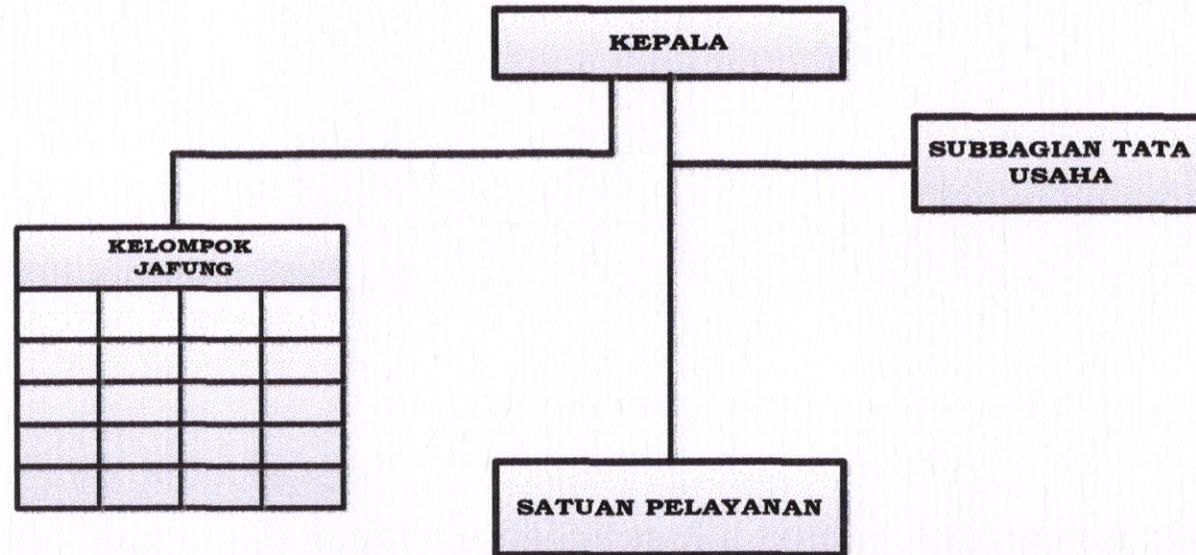
UPTD PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI CITANDUY



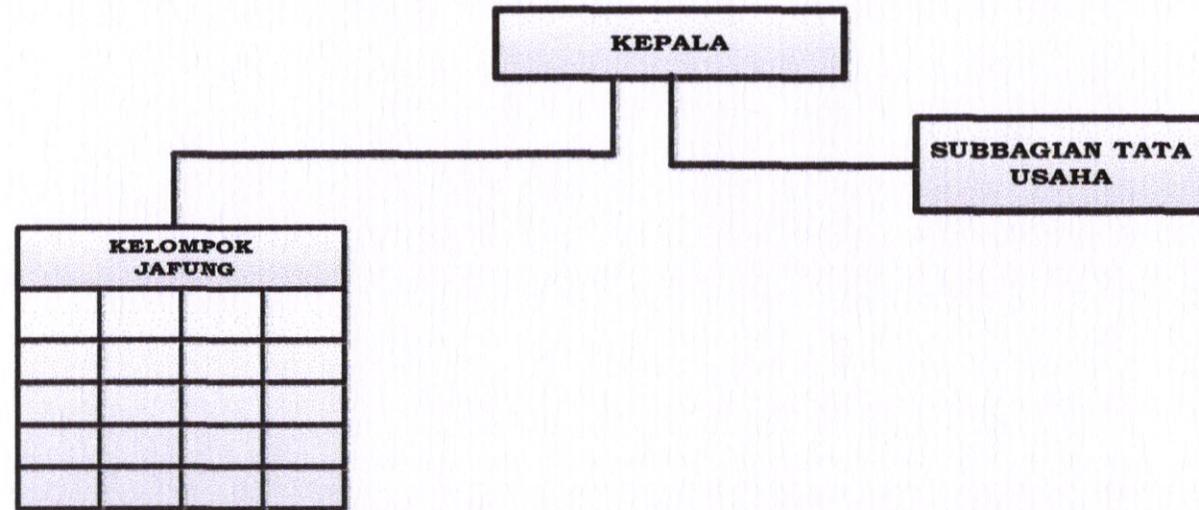
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI CIWULAN-CILAKI



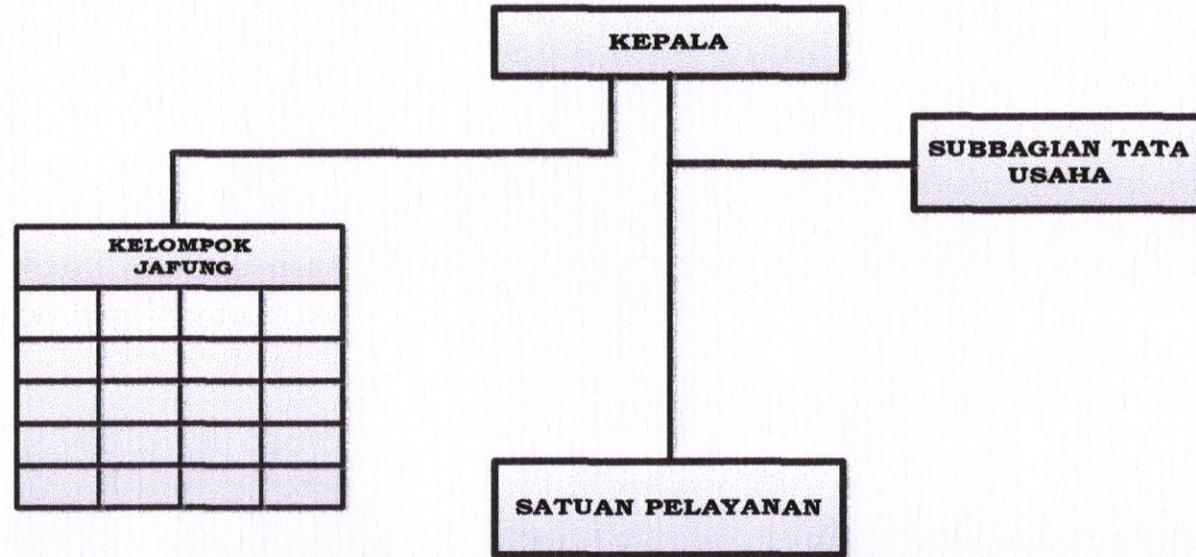
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT PELAYANAN SOSIAL GRIYA BINA REMAJA



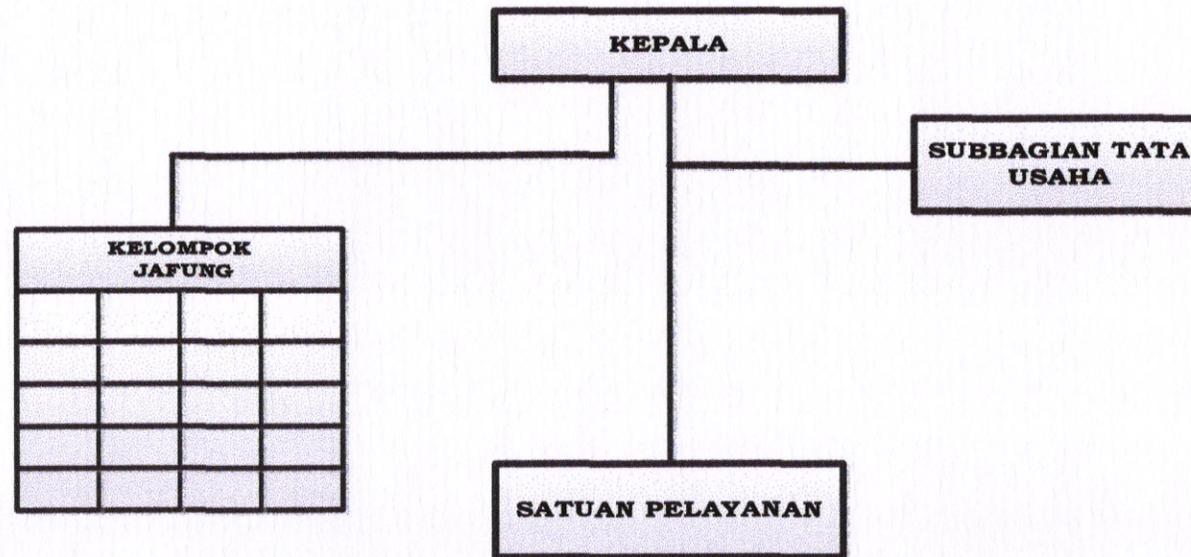
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGEMBANGAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT PELAYANAN SOSIAL GRIYA BINA KARSA

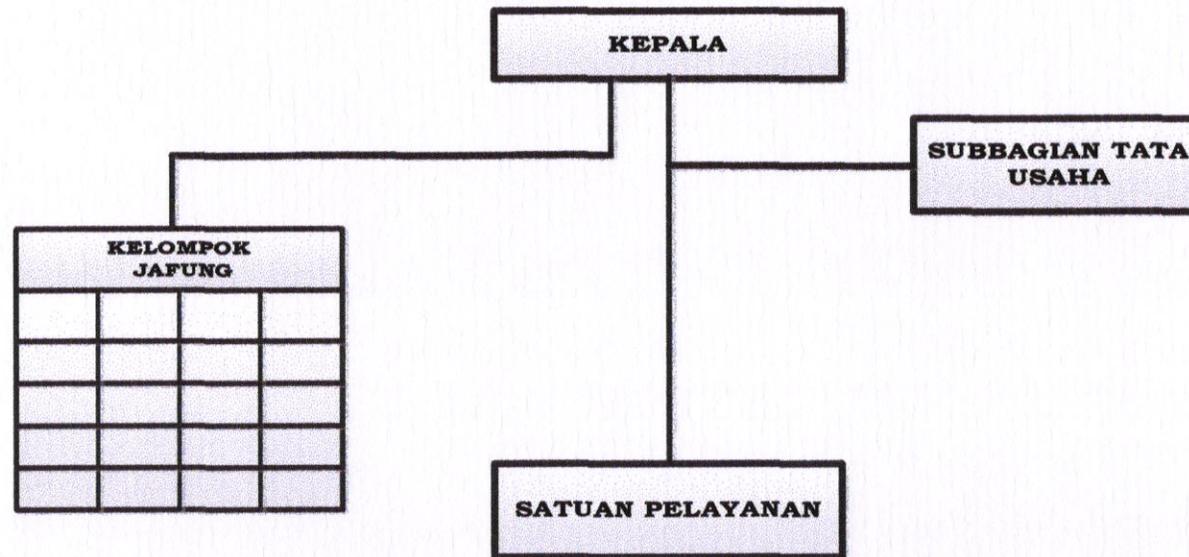


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT PELAYANAN SOSIAL GRIYA RAMAH ANAK

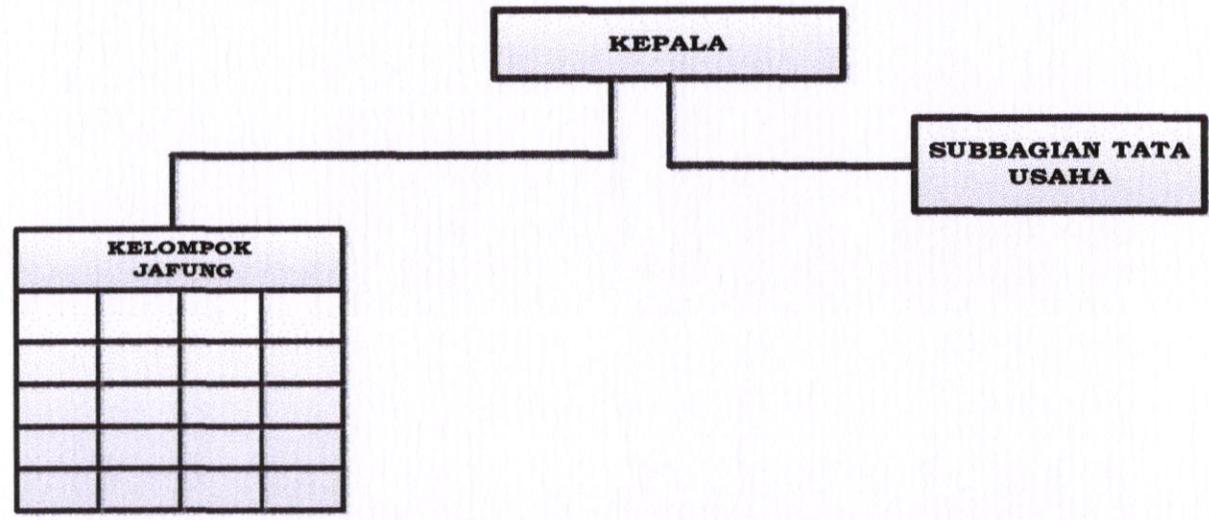


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

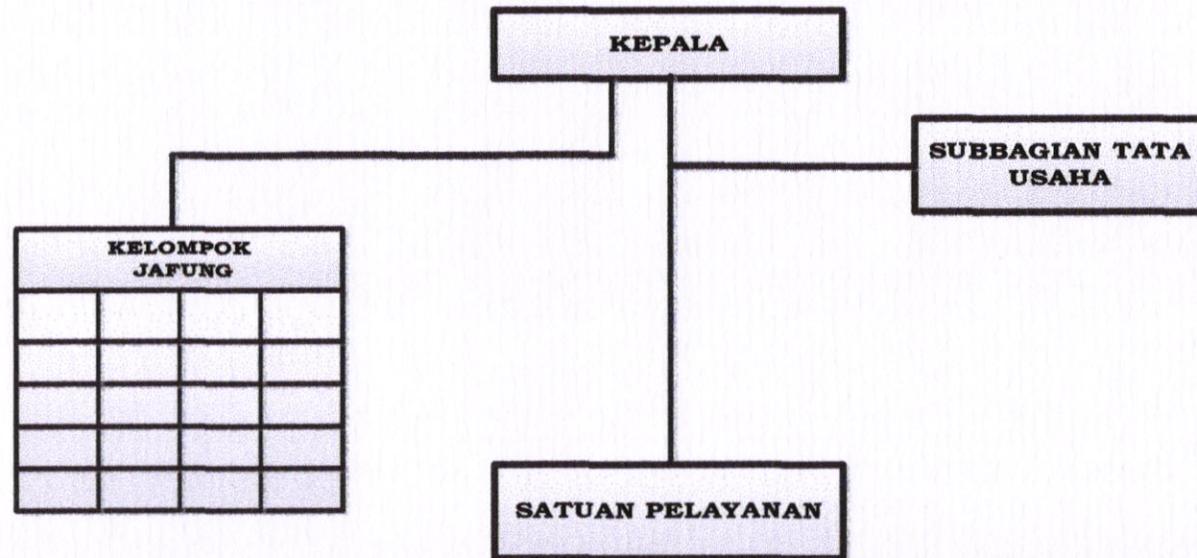
UPTD PUSAT PELAYANAN SOSIAL GRIYA BINA KARYA



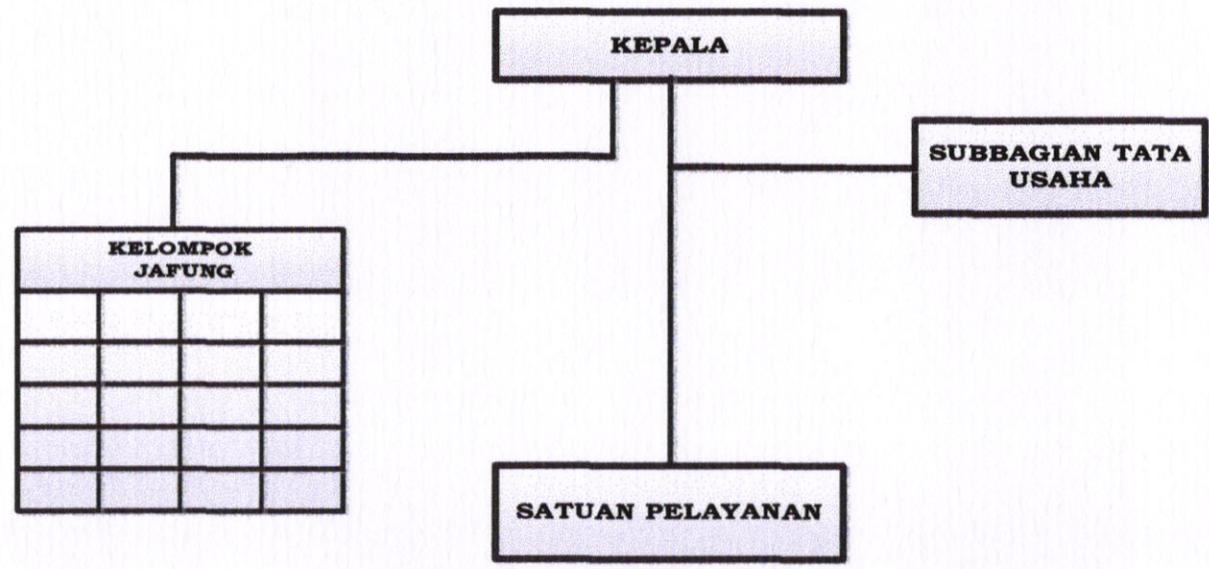
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT PELAYANAN SOSIAL GRIYA HARAPAN DIFABEL



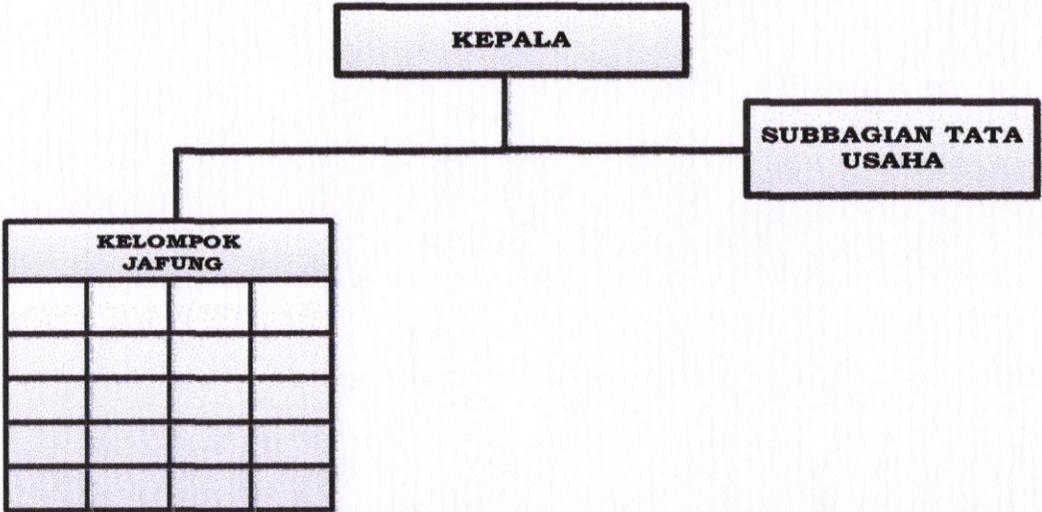
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT PELAYANAN SOSIAL GRIYA WANITA MANDIRI



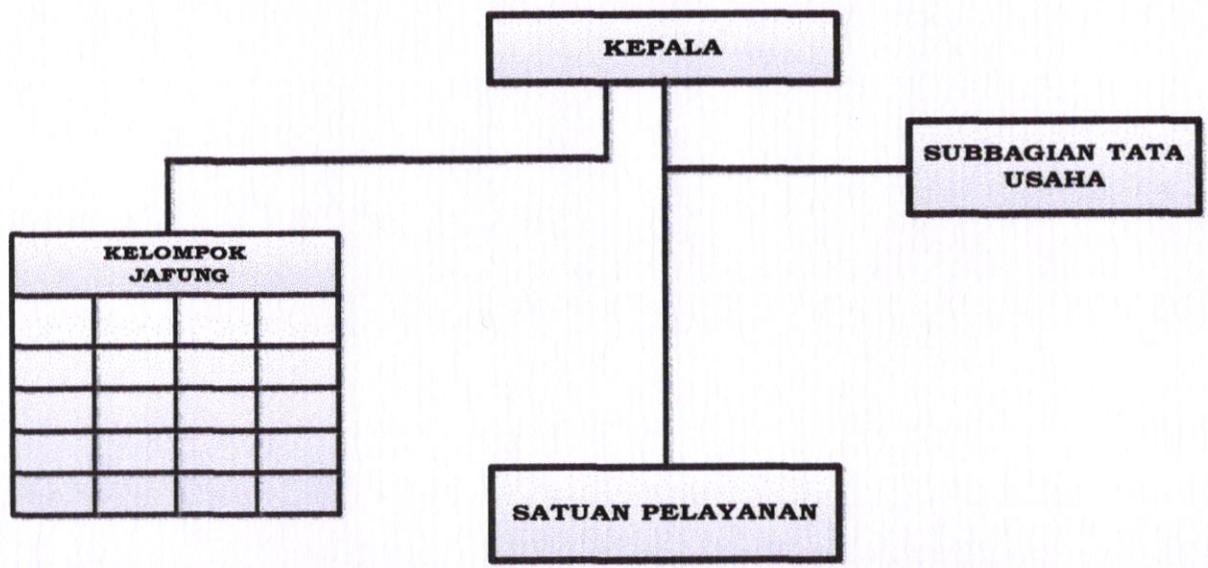
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT PELAYANAN SOSIAL GRIYA LANSIA



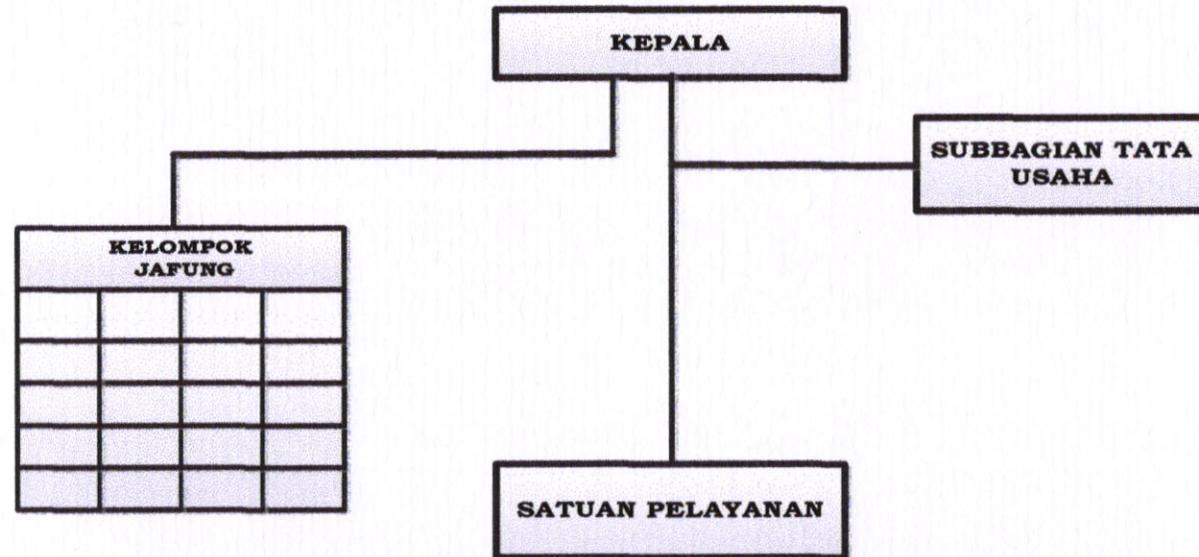
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK JAWA BARAT



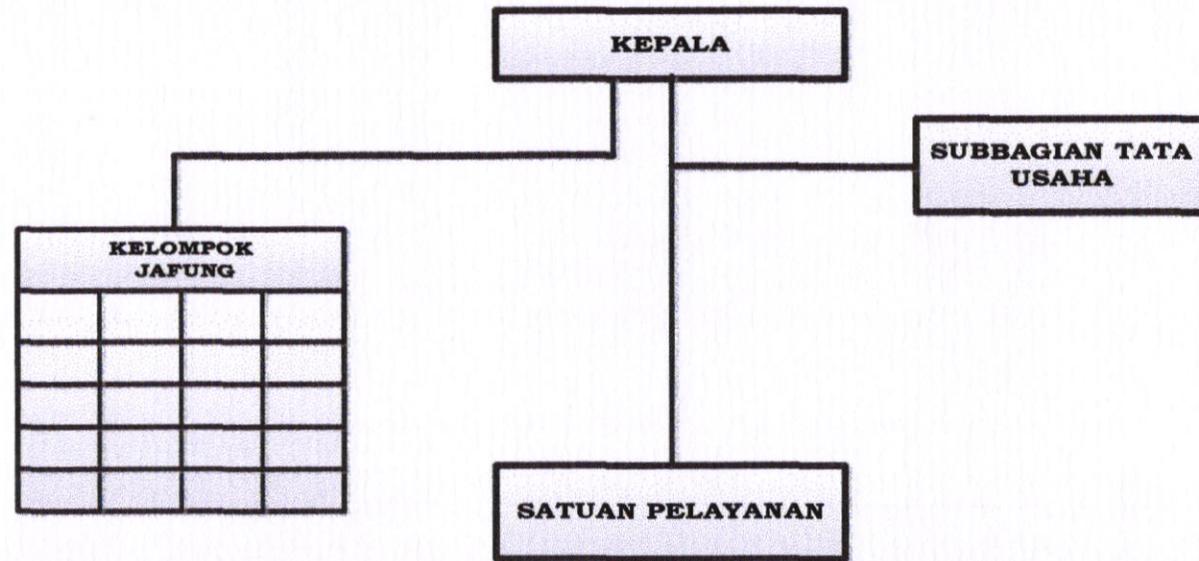
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN WILAYAH I



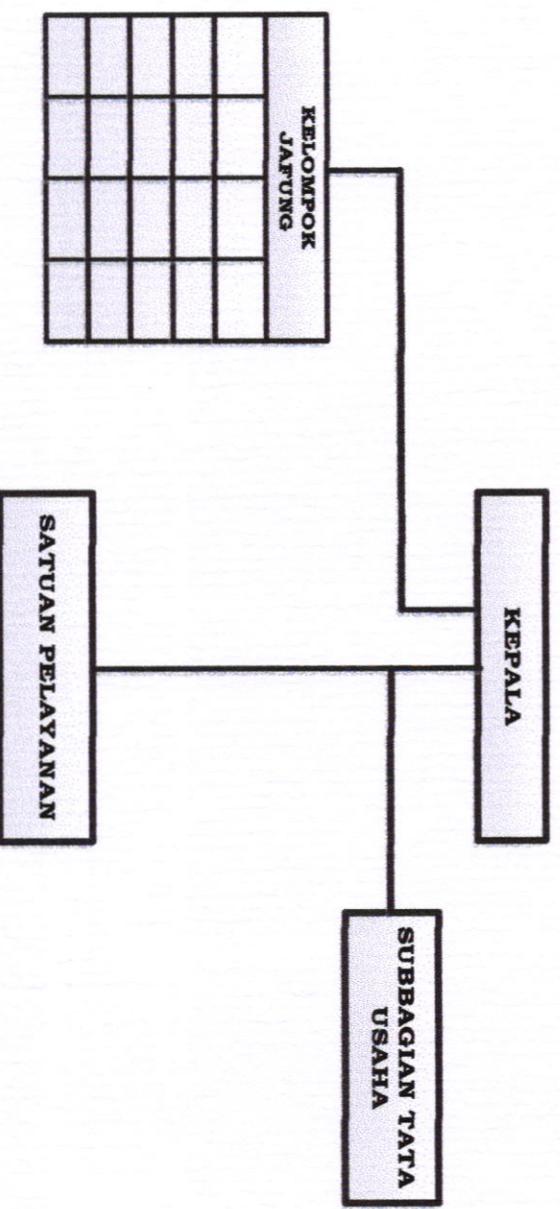
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN WILAYAH II



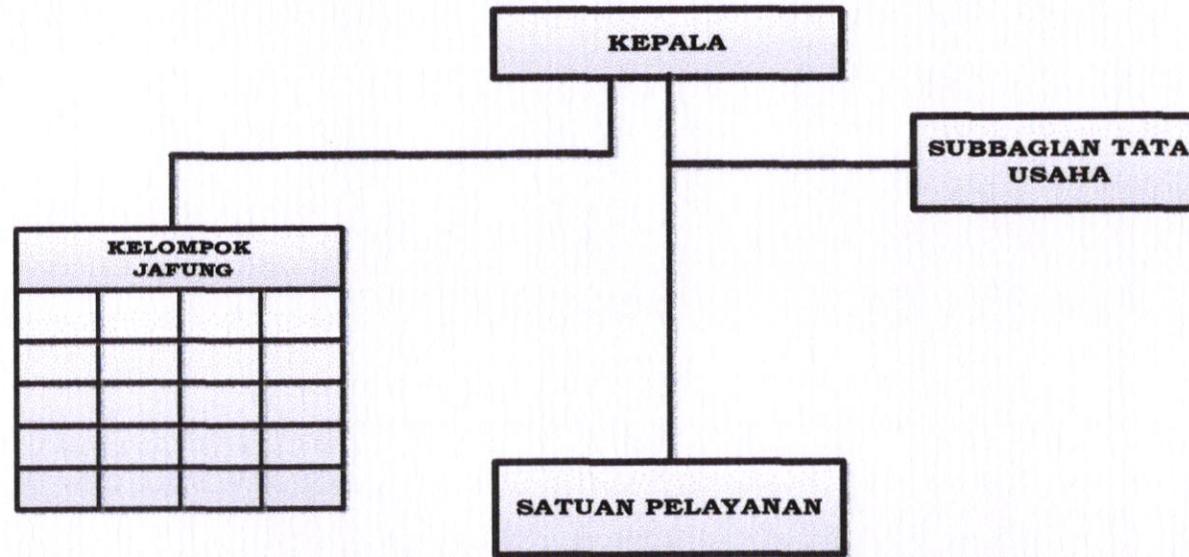
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
U UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN WILAYAH III



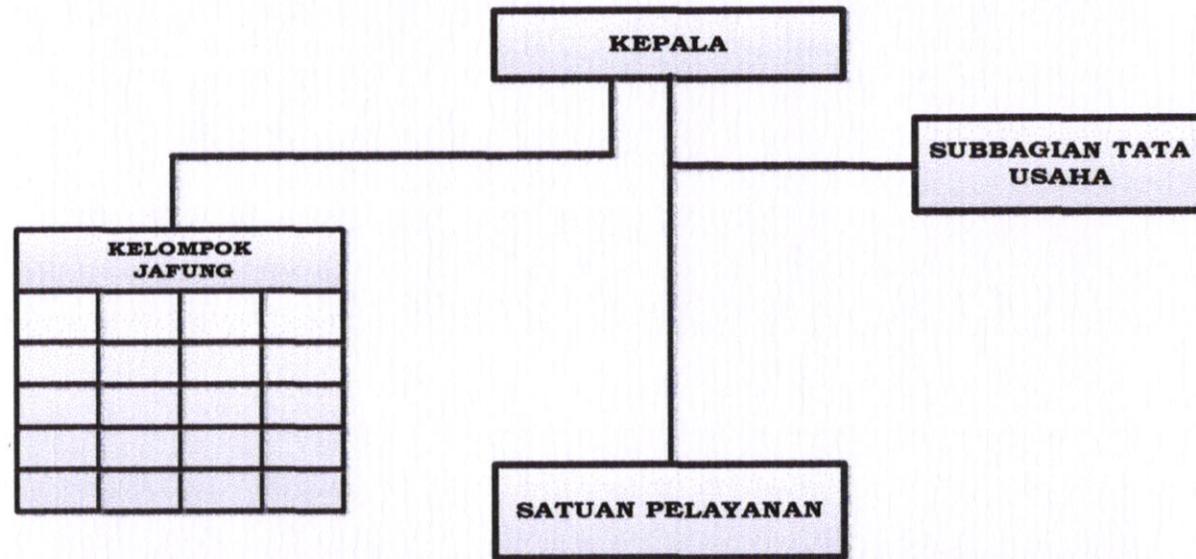
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN WILAYAH IV



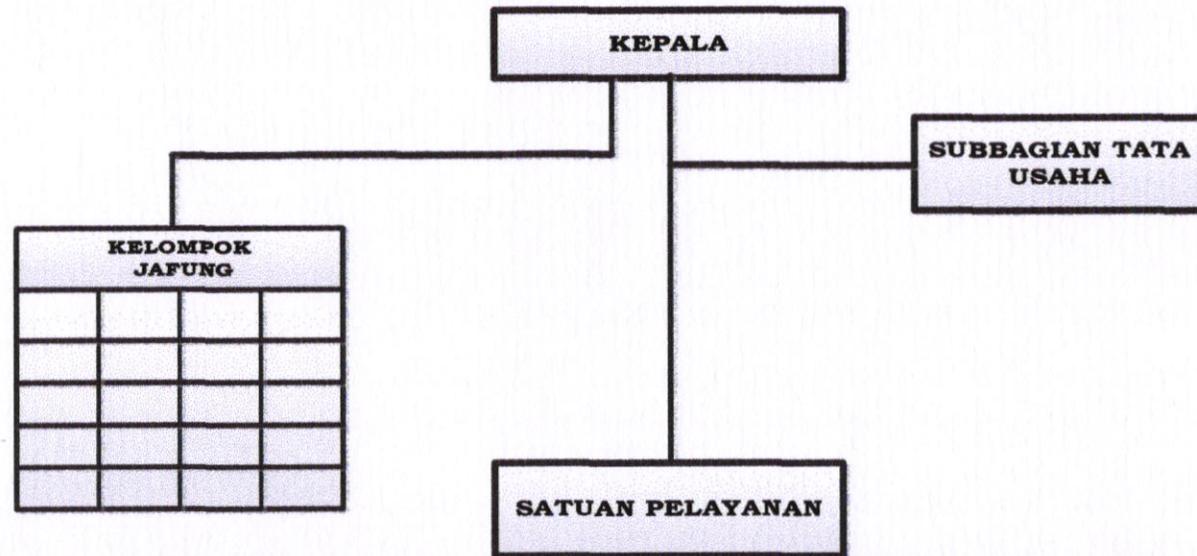
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN NUSAWIRU



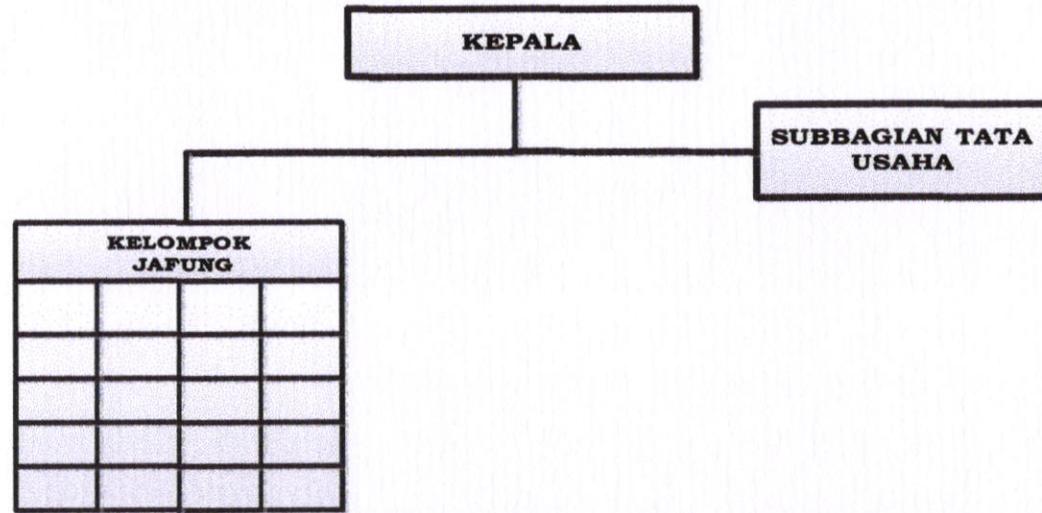
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN



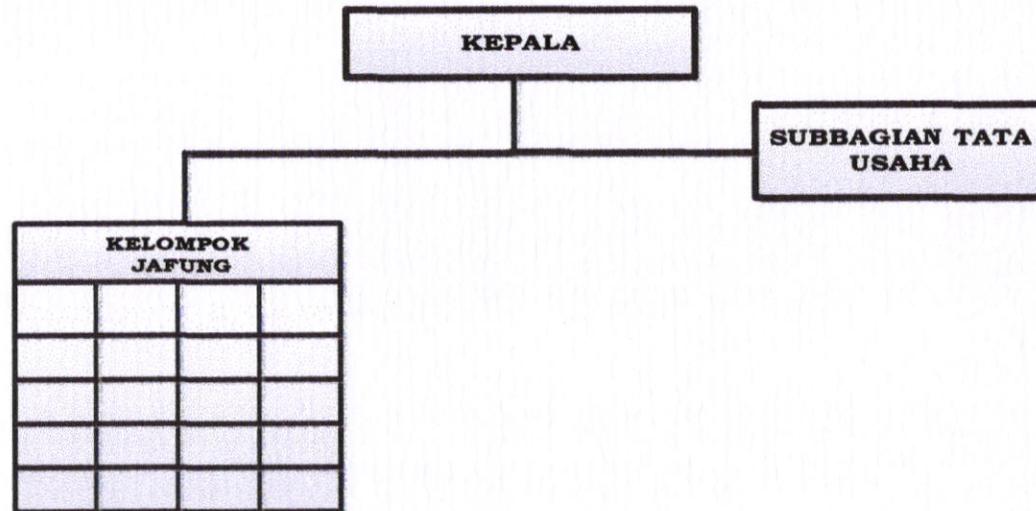
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN PELABUHAN LAUT



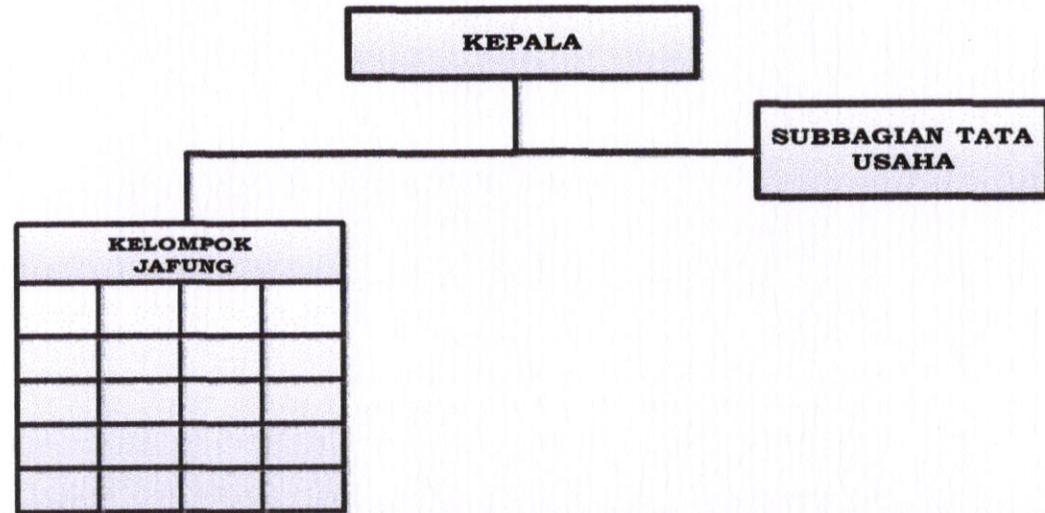
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT LAYANAN DIGITAL, DATA, DAN INFORMASI GEOSPASIAL



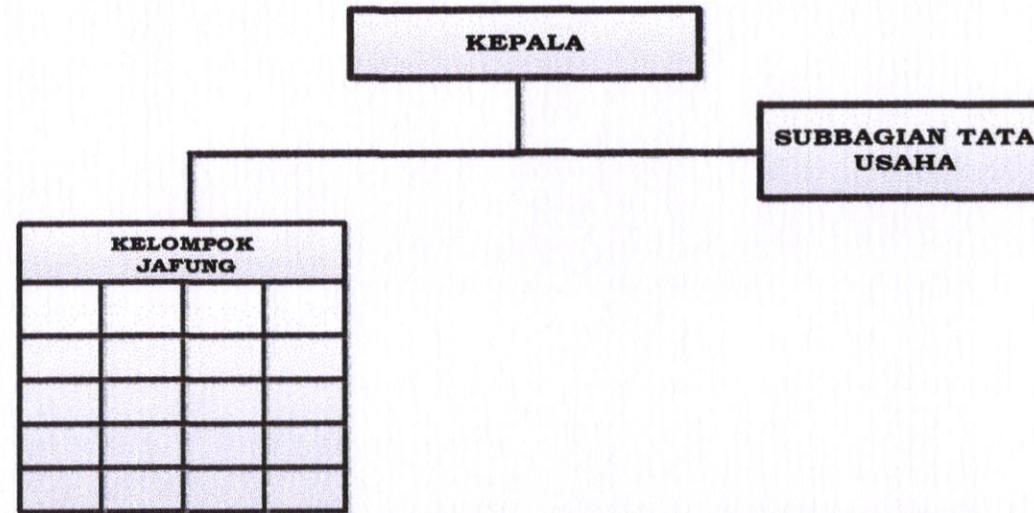
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASIAN DAN WIRAUSAHA



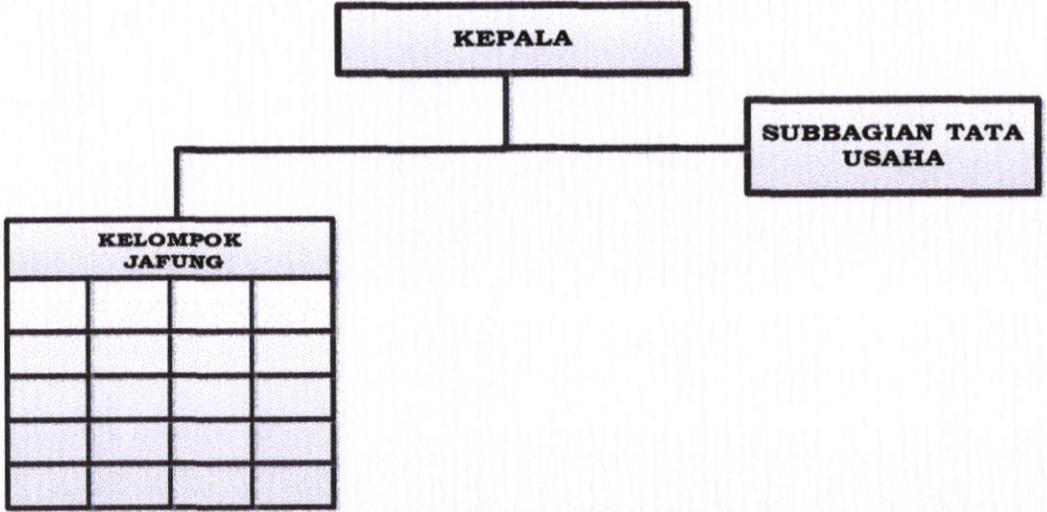
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI LATIHAN KERJA KOMPETENSI



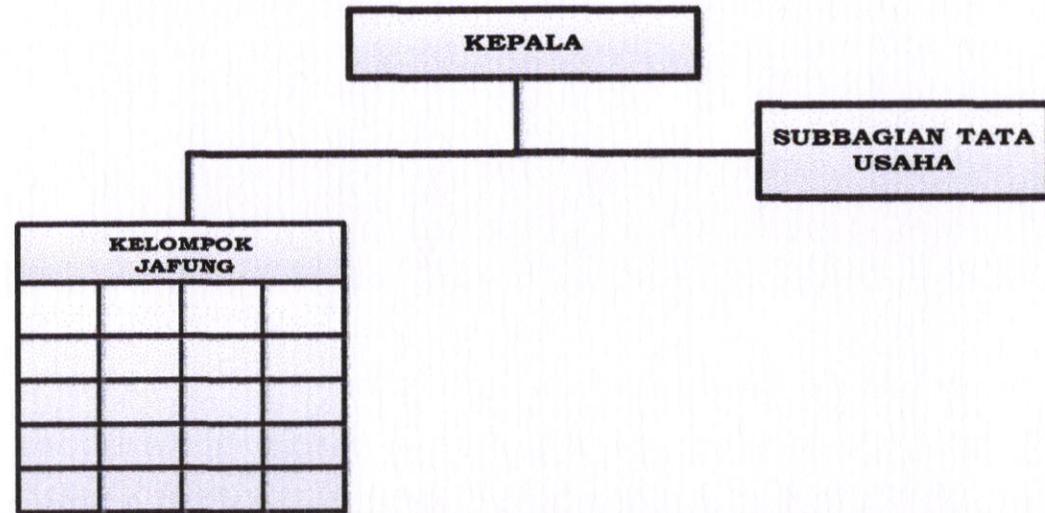
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD LAYANAN TERPADU SATU ATAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA



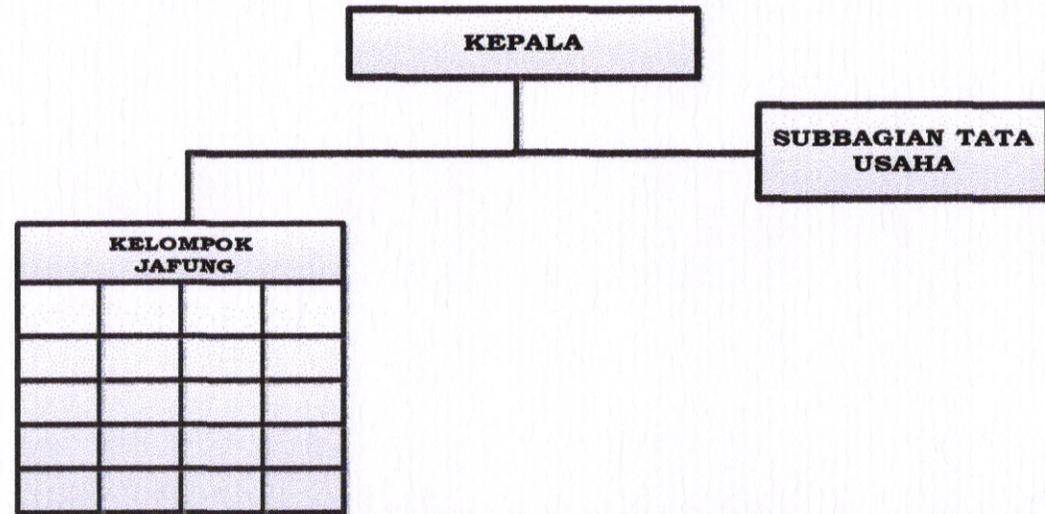
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI LATIHAN KERJA MANDIRI



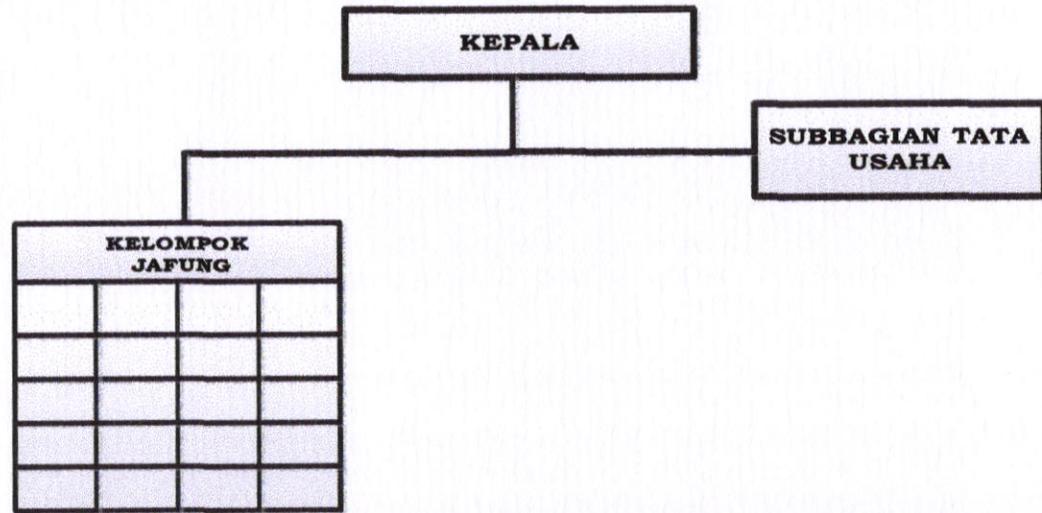
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I BOGOR



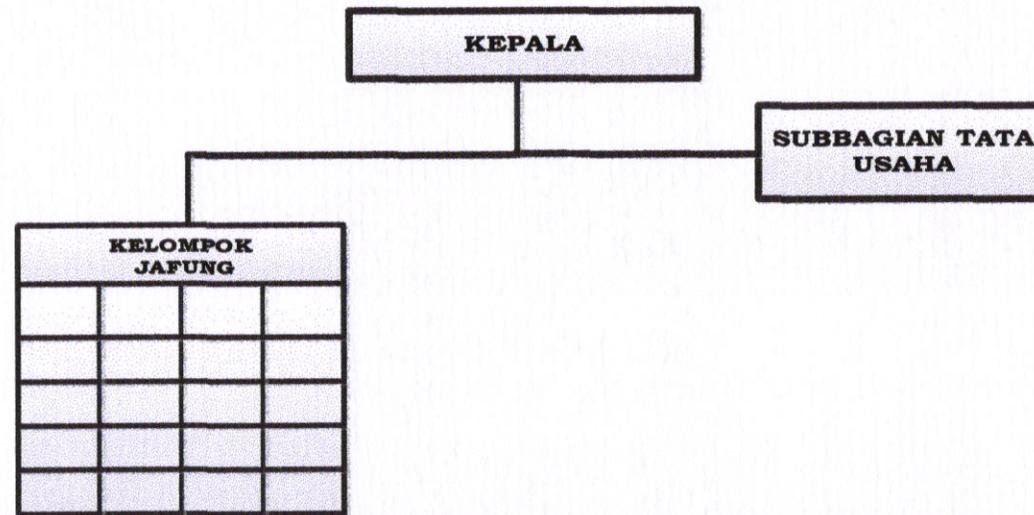
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II KARAWANG



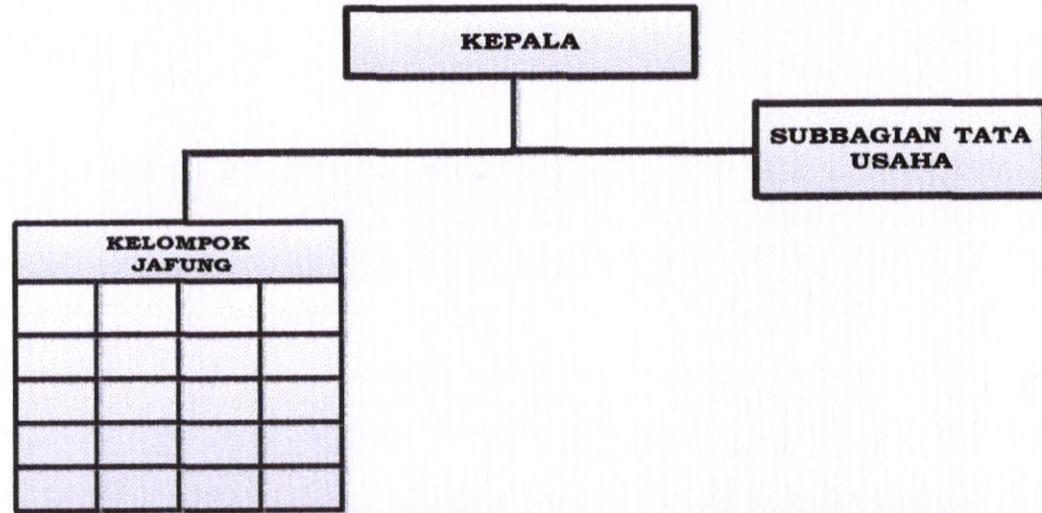
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH III CIREBON



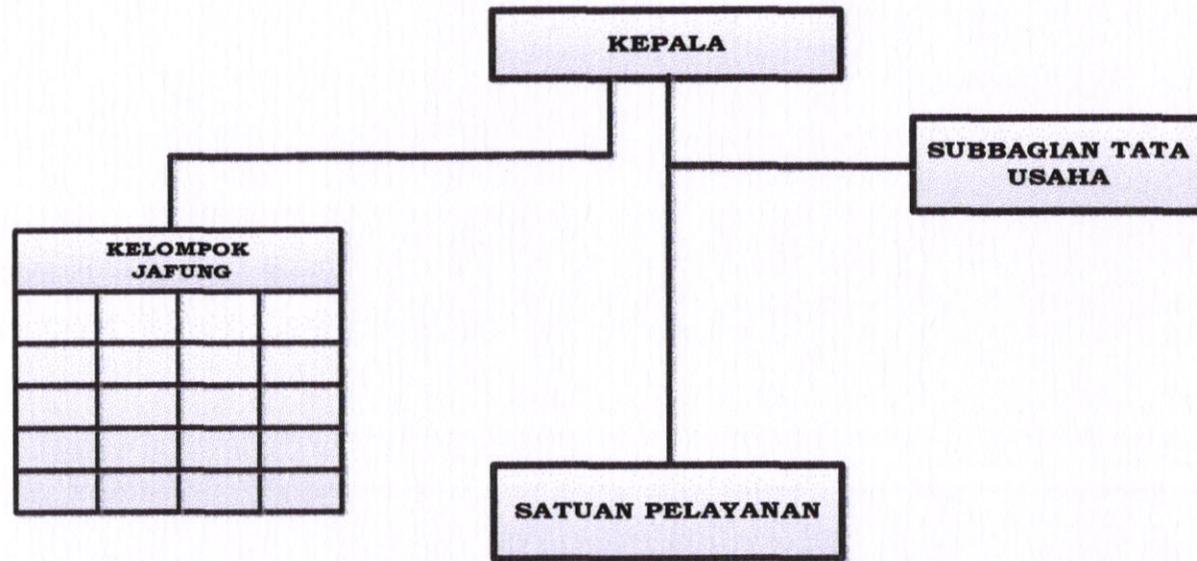
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH IV BANDUNG



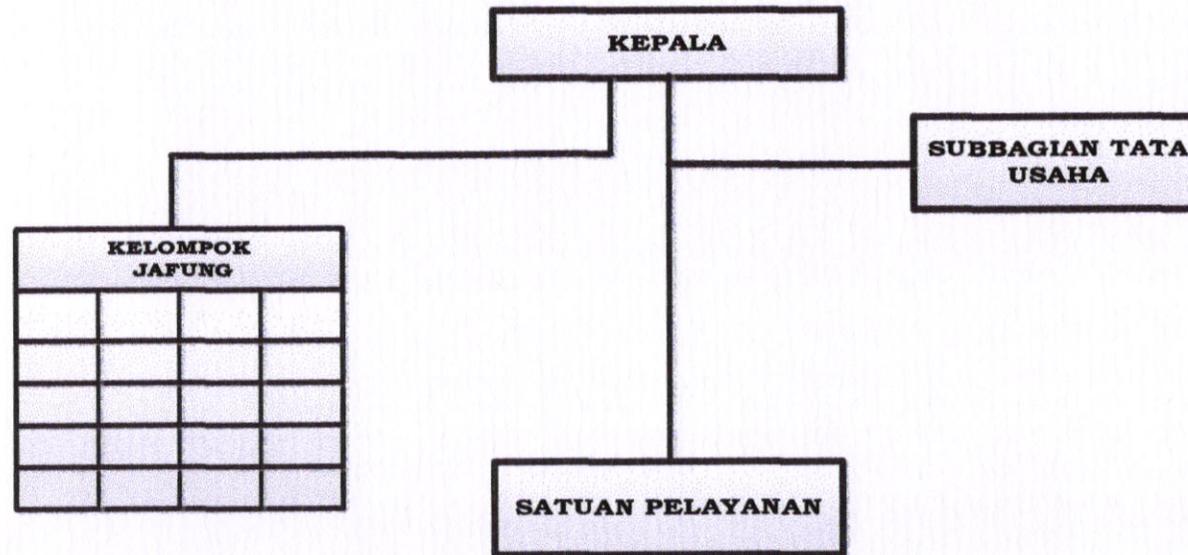
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH V TASIKMALAYA



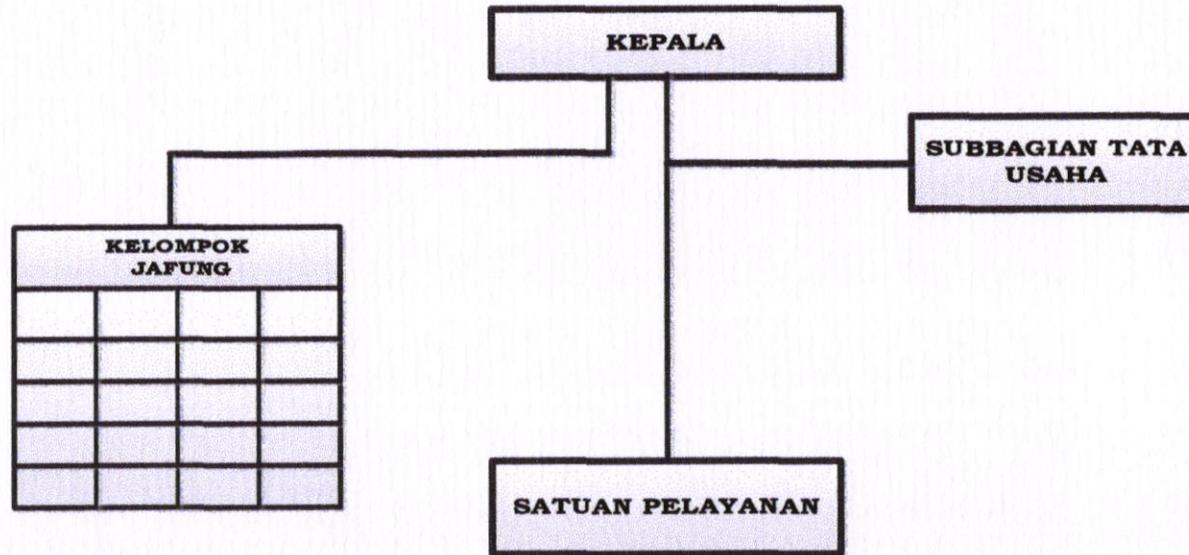
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN KEBUDAYAAN DAERAH JAWA BARAT



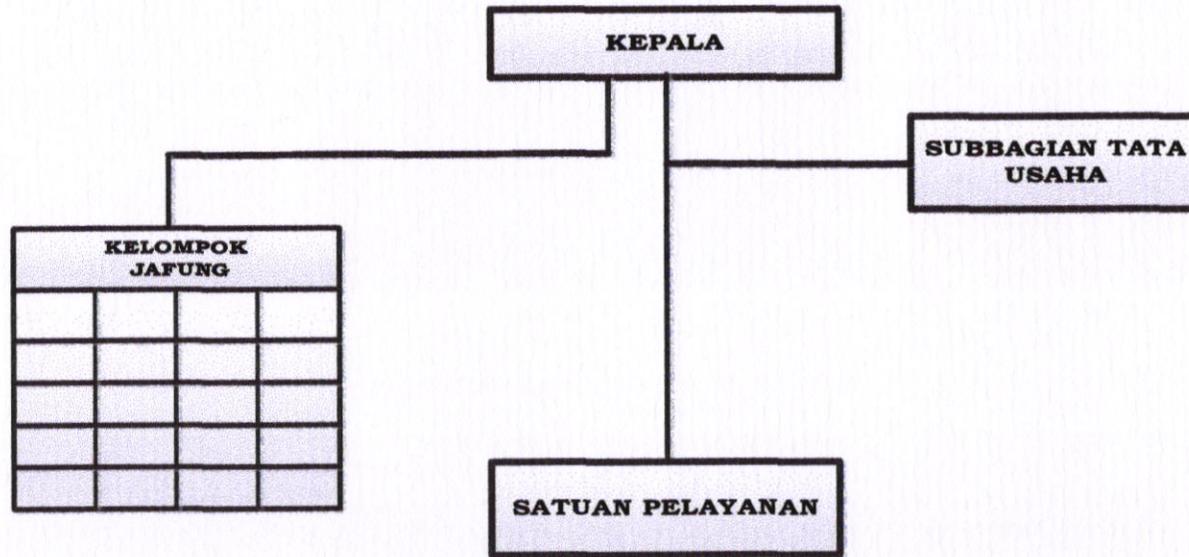
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH SELATAN



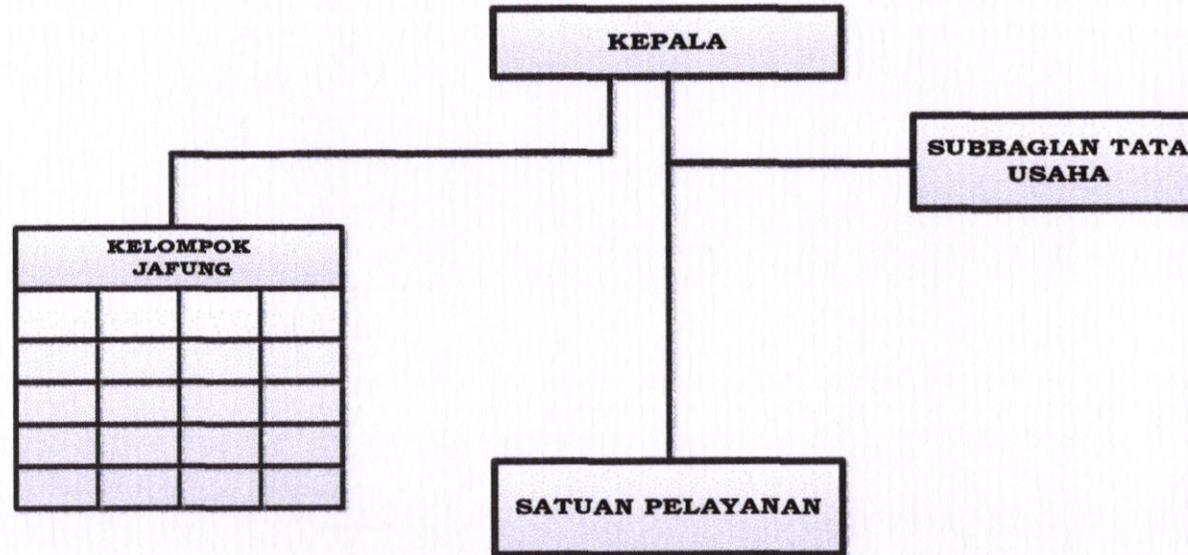
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH UTARA



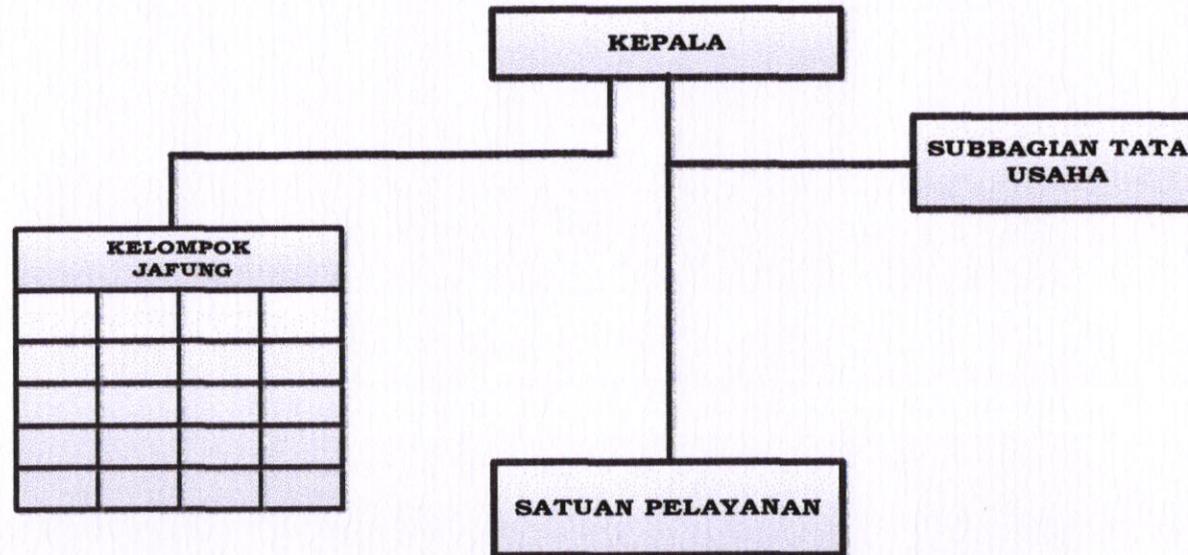
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PELABUHAN PERIKANAN CILAUTEREUN



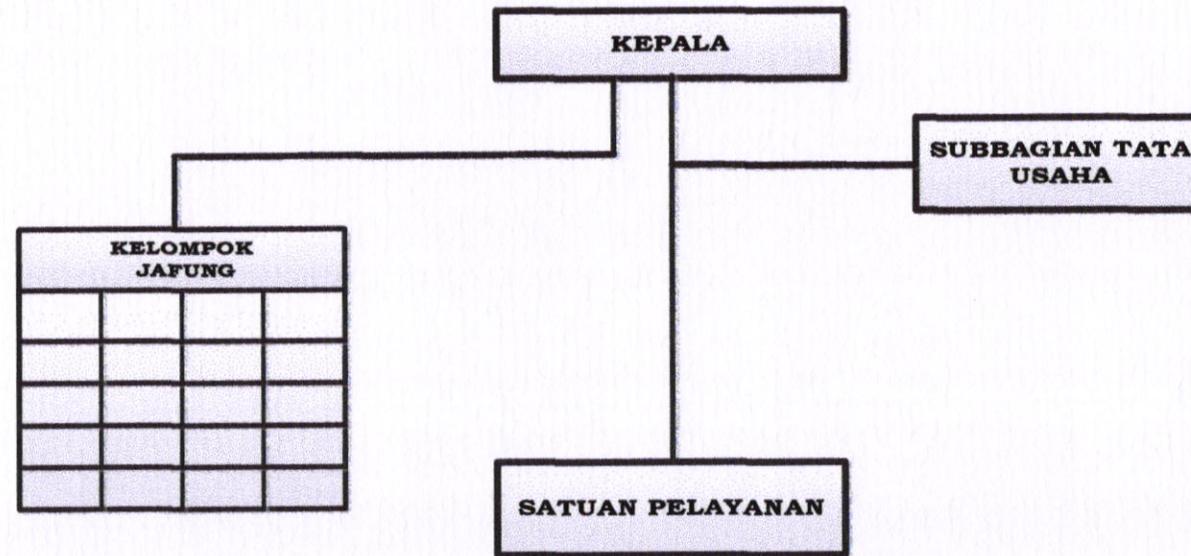
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PELABUHAN PERIKANAN MUARA CIASEM



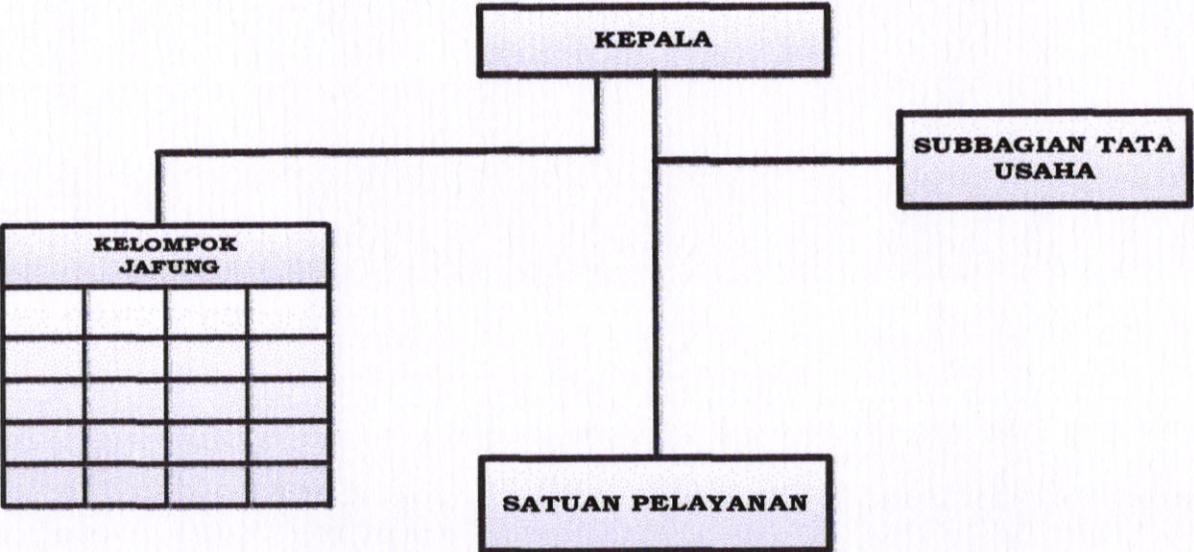
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU PRODUK PERIKANAN



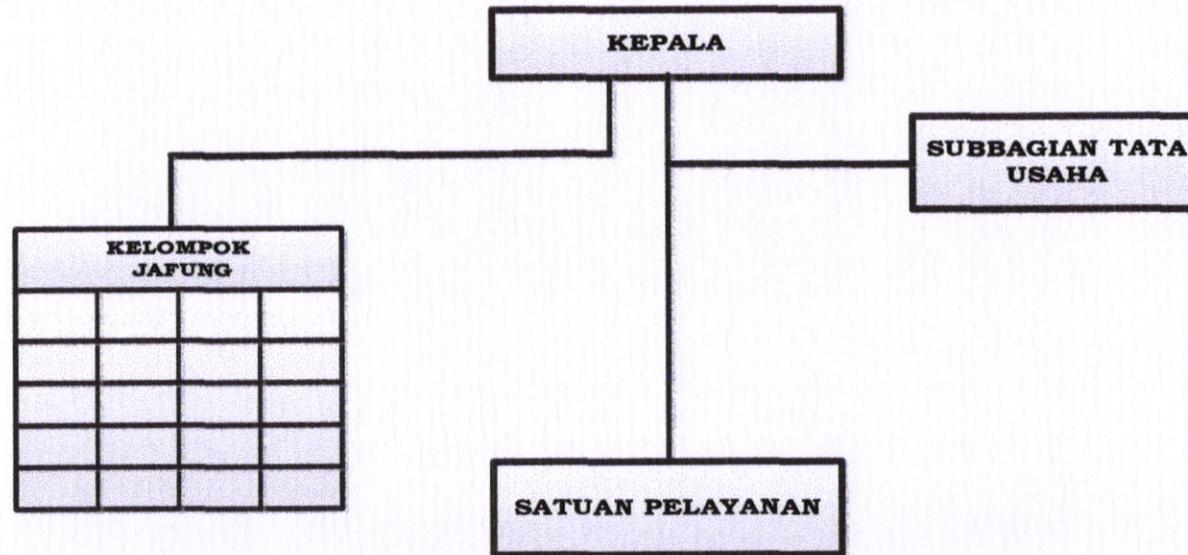
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH UTARA



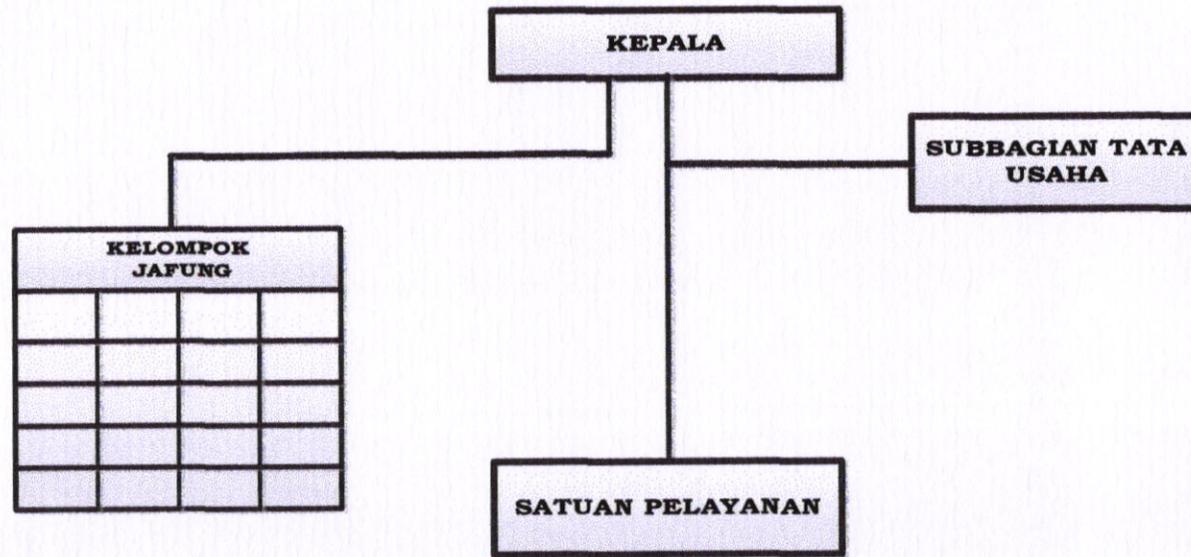
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH SELATAN



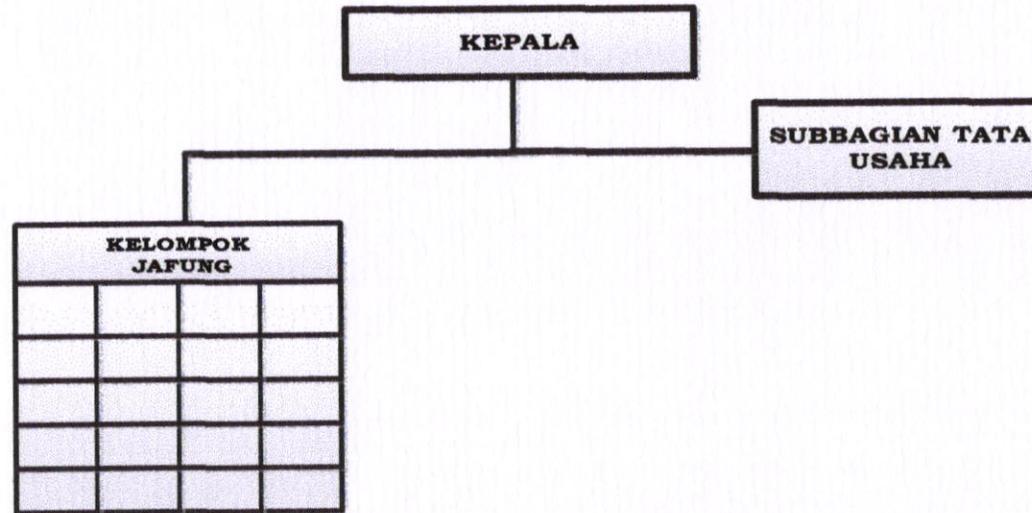
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PERIKANAN AIR PAYAU DAN LAUT WILAYAH SELATAN



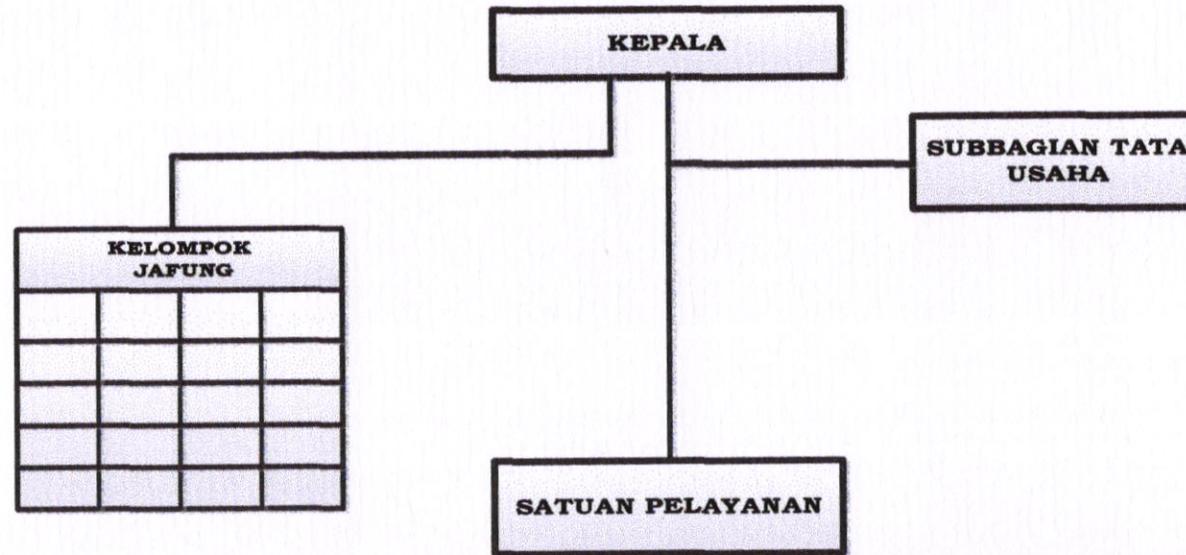
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PERIKANAN AIR PAYAU DAN LAUT WILAYAH UTARA



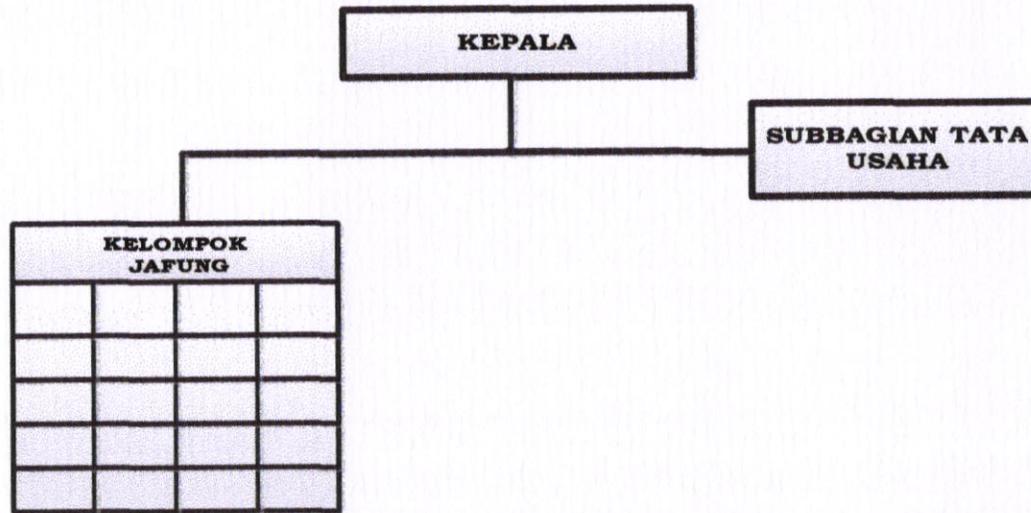
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN



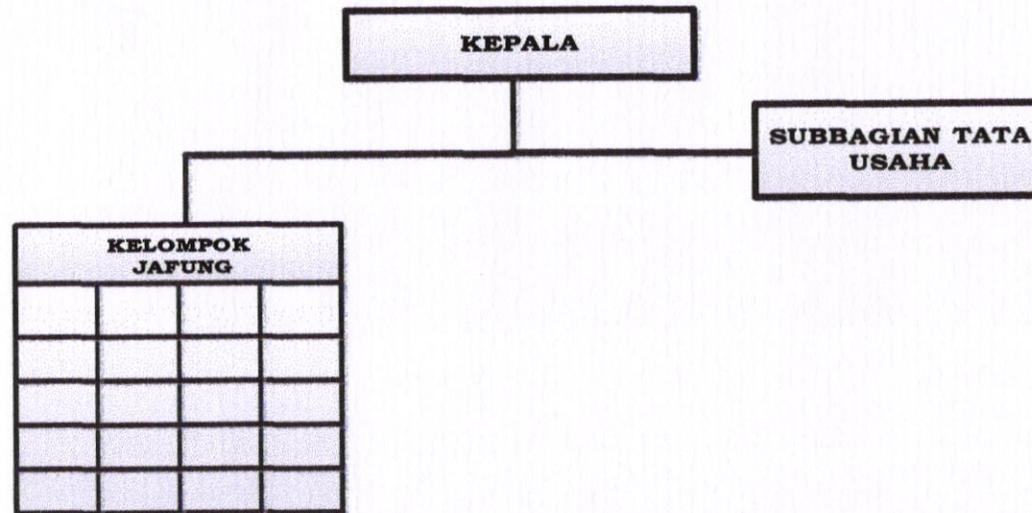
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI PENGUJIAN MUTU DAN KEAMANAN PAKAN/BAHAN PAKAN CIKOLE LEMBANG



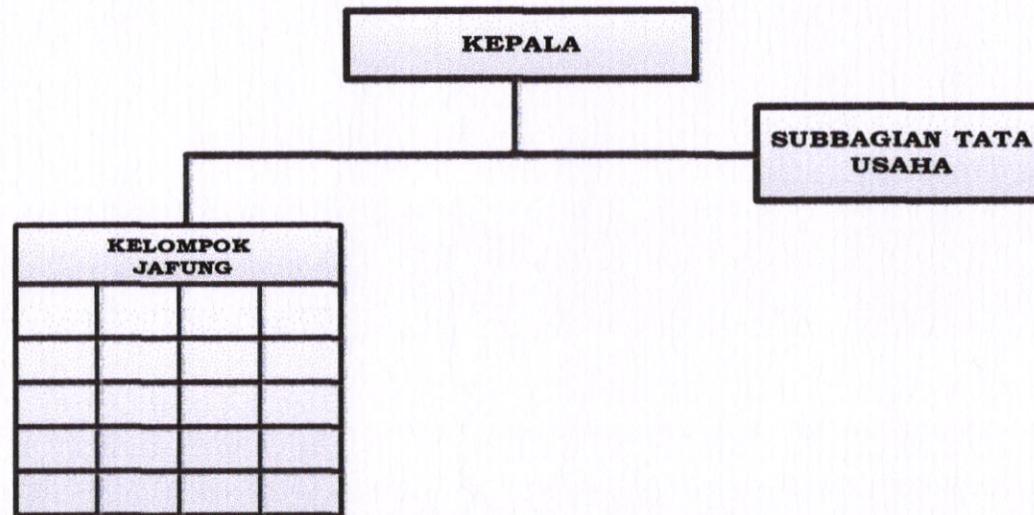
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI PENGEMBANGAN TERNAK SAPI PERAH DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK CIKOLE LEMBANG



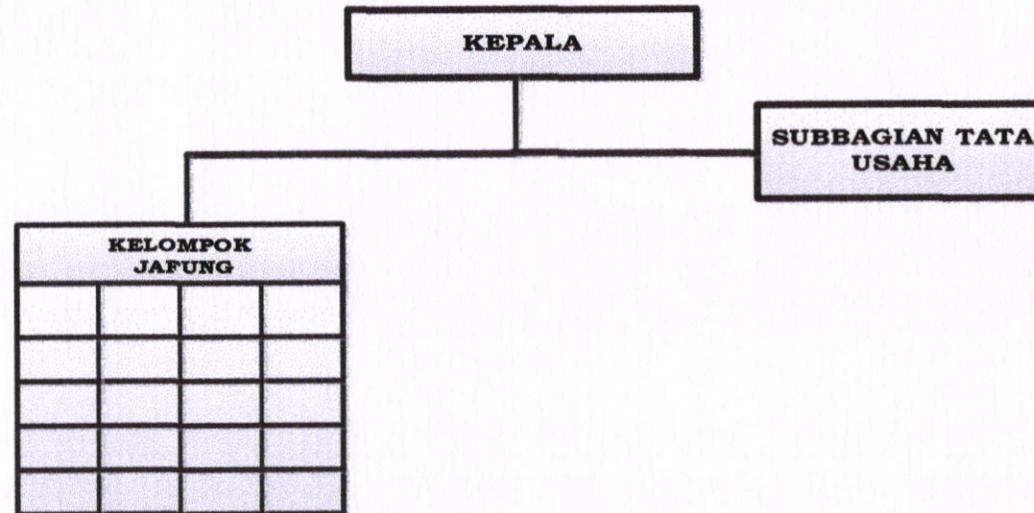
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI PELATIHAN PETERNAKAN DAN KETAHANAN PANGAN CIKOLE LEMBANG



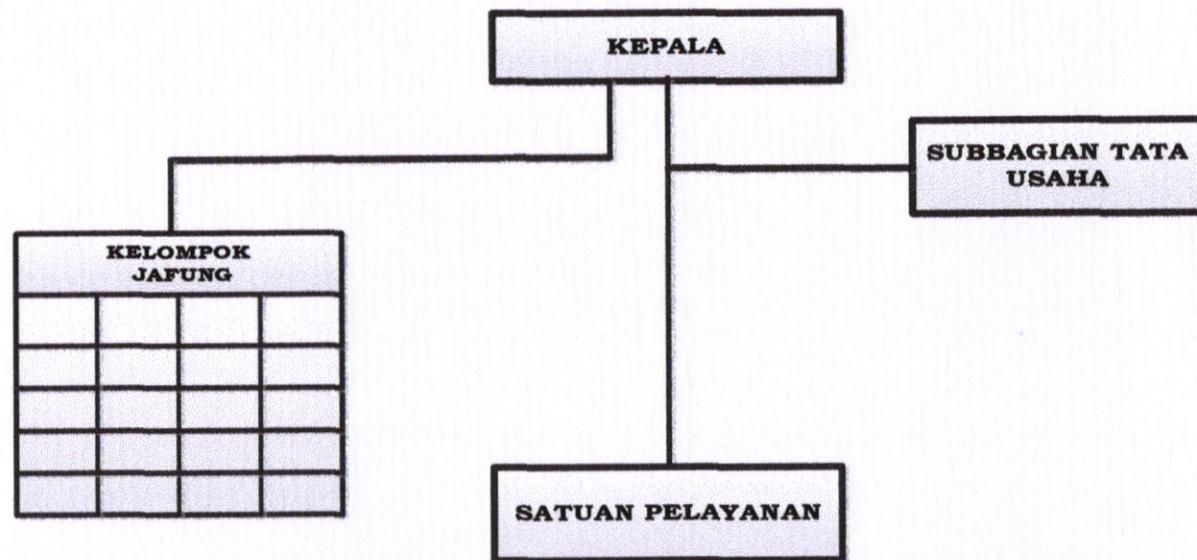
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI PERBIBITAN DAN PENGEMBANGAN INSEMINASI BUATAN TERNAK SAPI POTONG CIAMIS



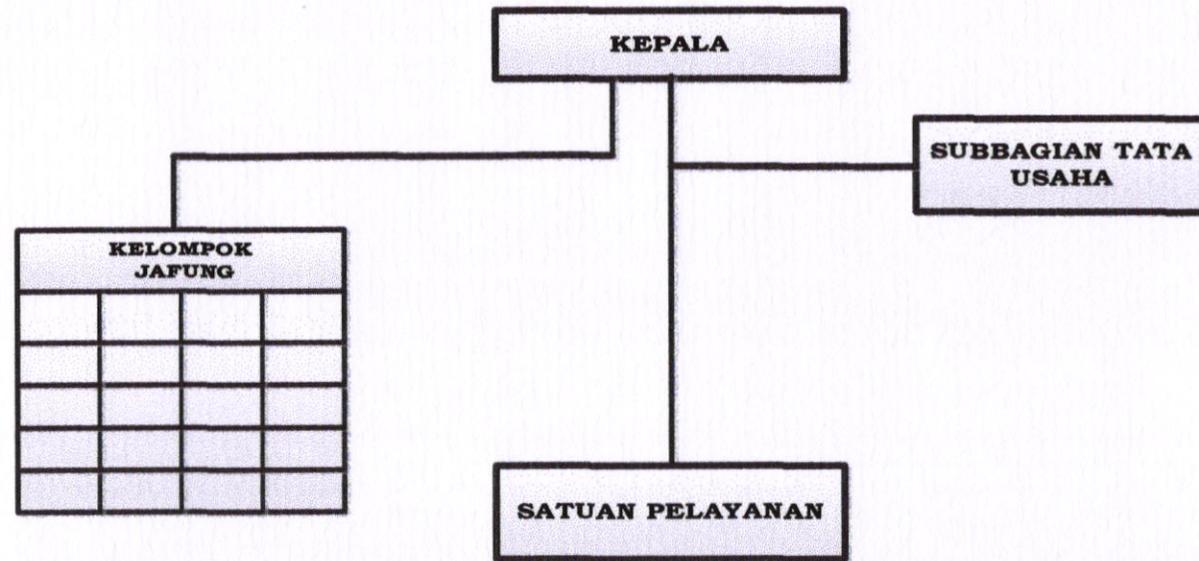
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK UNGGAS JATIWANGI



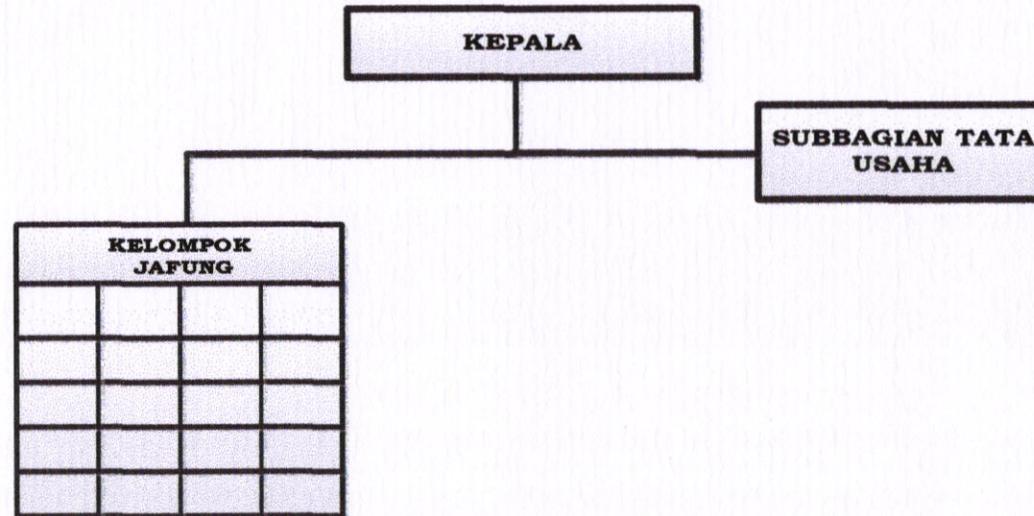
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DOMBA DAN KAMBING MARGAWATI



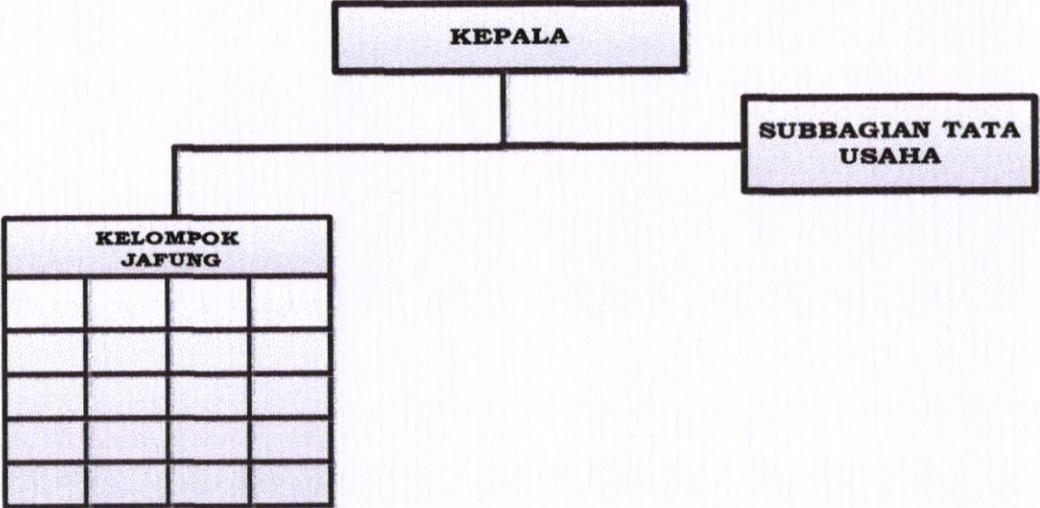
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER



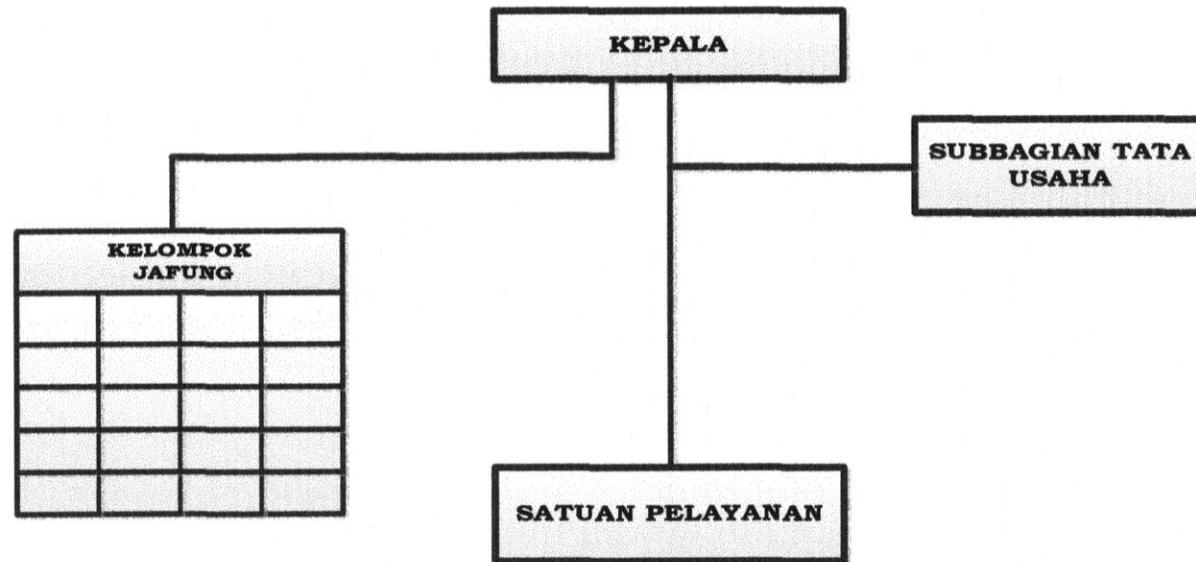
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI PERBIBITAN DAN PENGEMBANGAN INSEMINASI BUATAN TERNAK SAPI PERAH BUNIKASIH



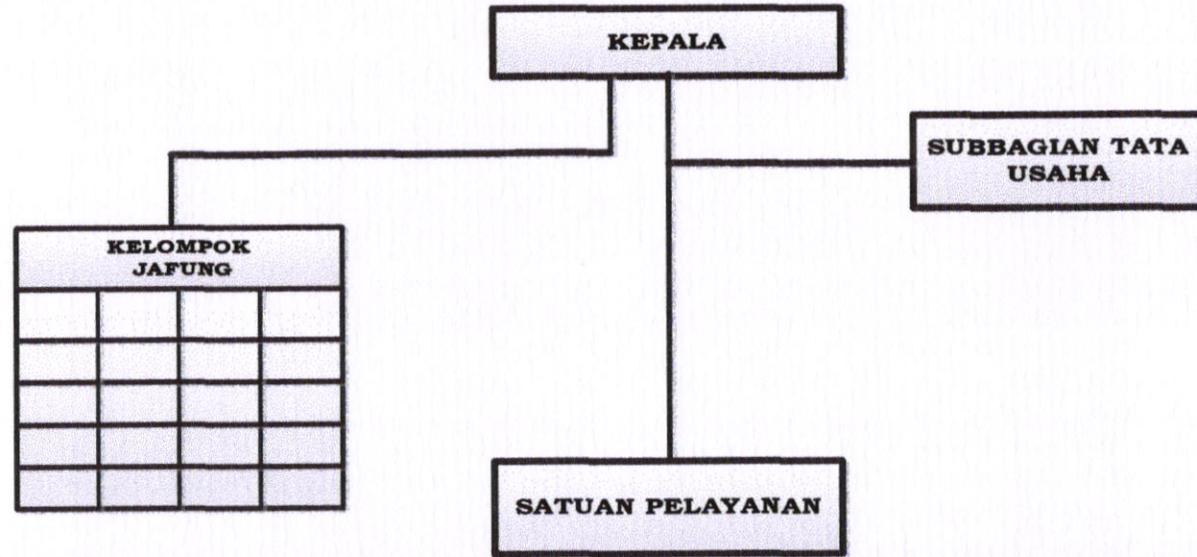
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD RUMAH SAKIT HEWAN



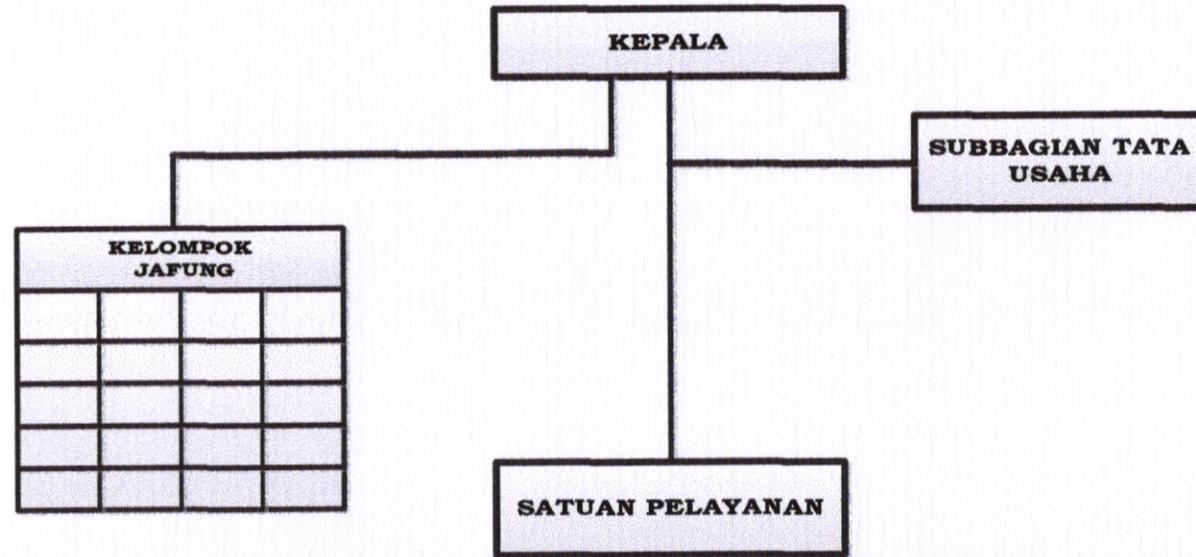
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI BENIH KENTANG



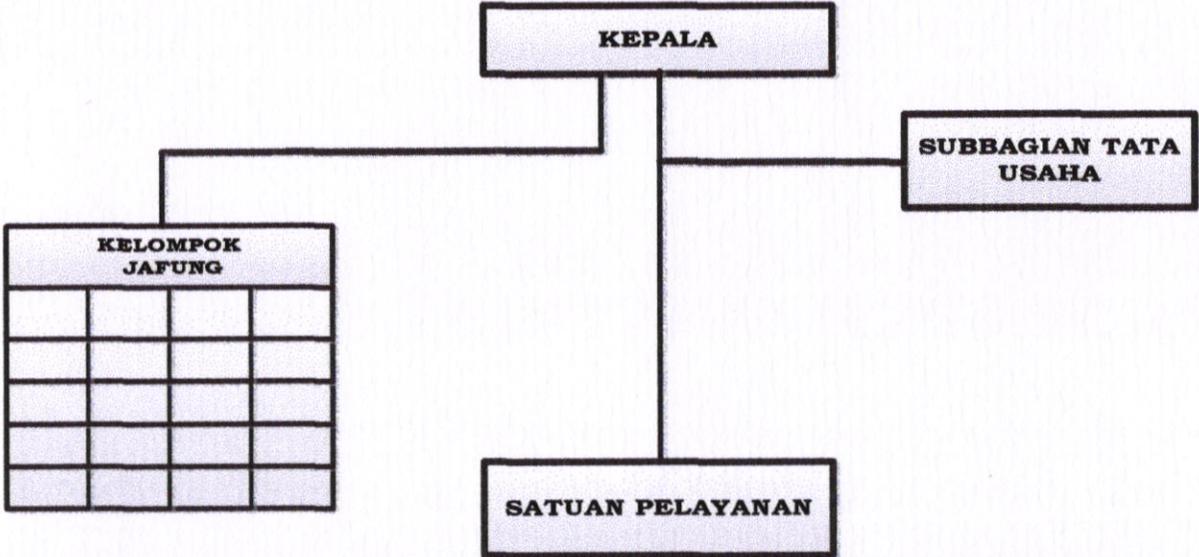
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI BENIH HORTIKULTURA



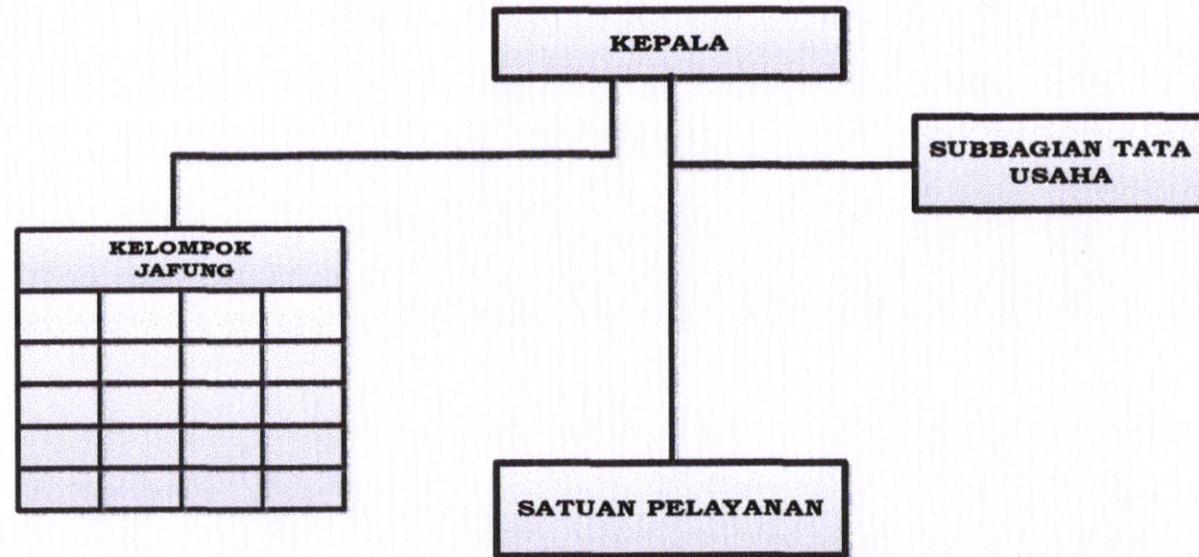
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI BENIH PADI DAN PALAWIJA



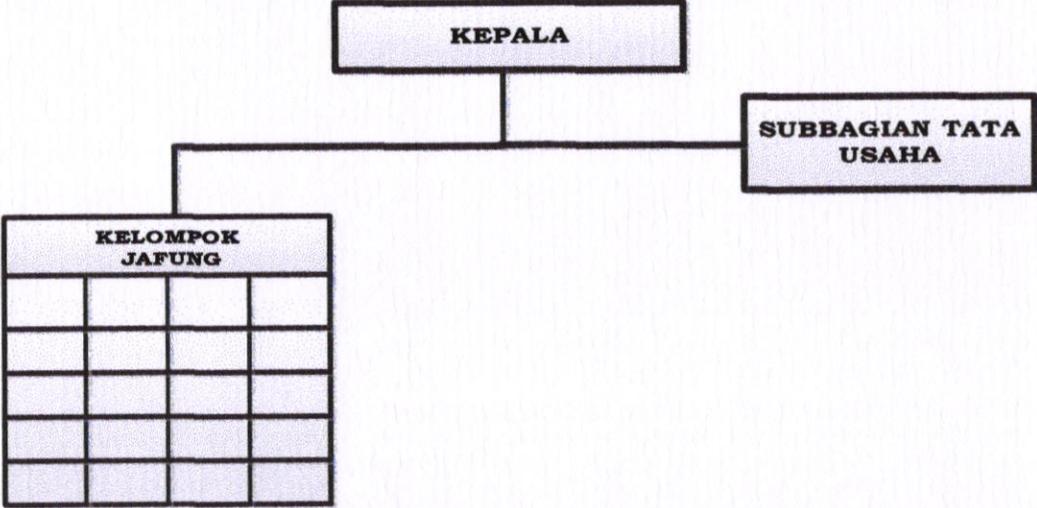
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA



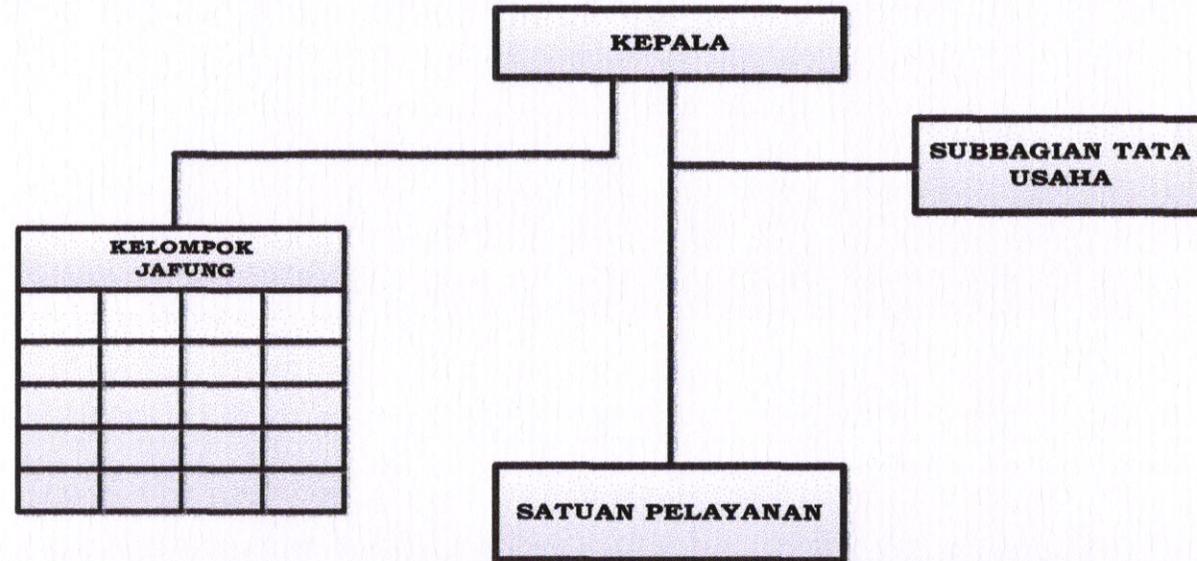
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA



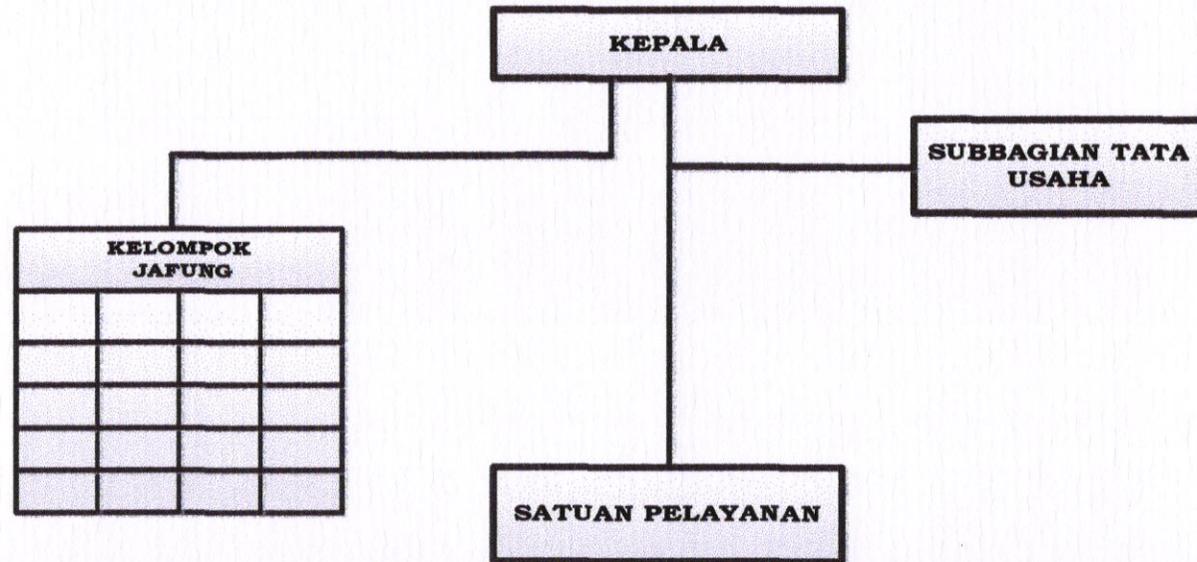
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI PELATIHAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA



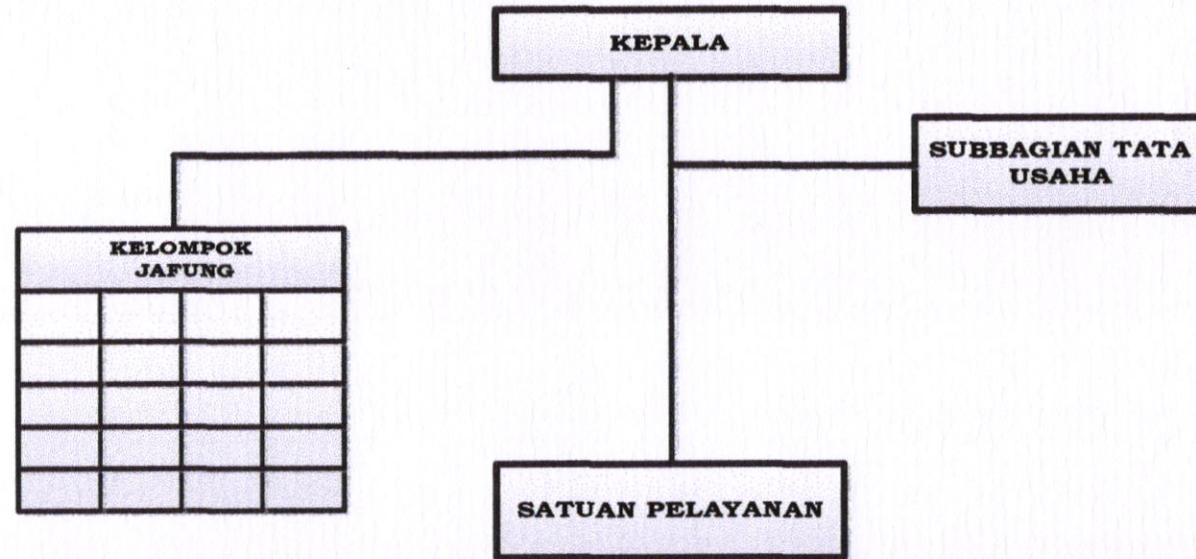
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI PENGEMBANGAN MEKANISME PERTANIAN



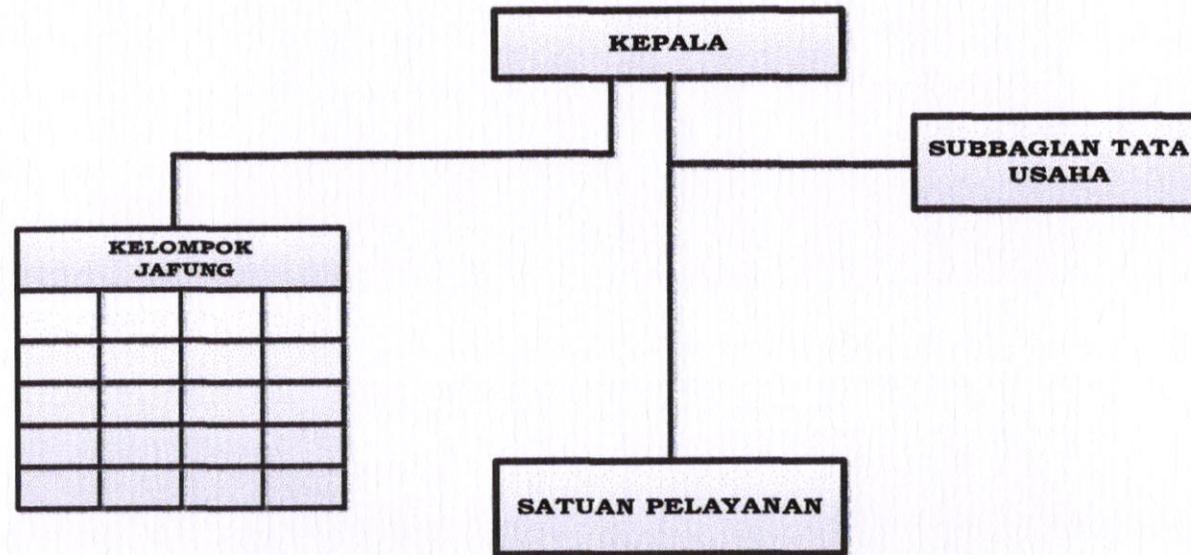
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI PENGEMBANGAN DAN PRODUKSI BENIH PERKEBUNAN



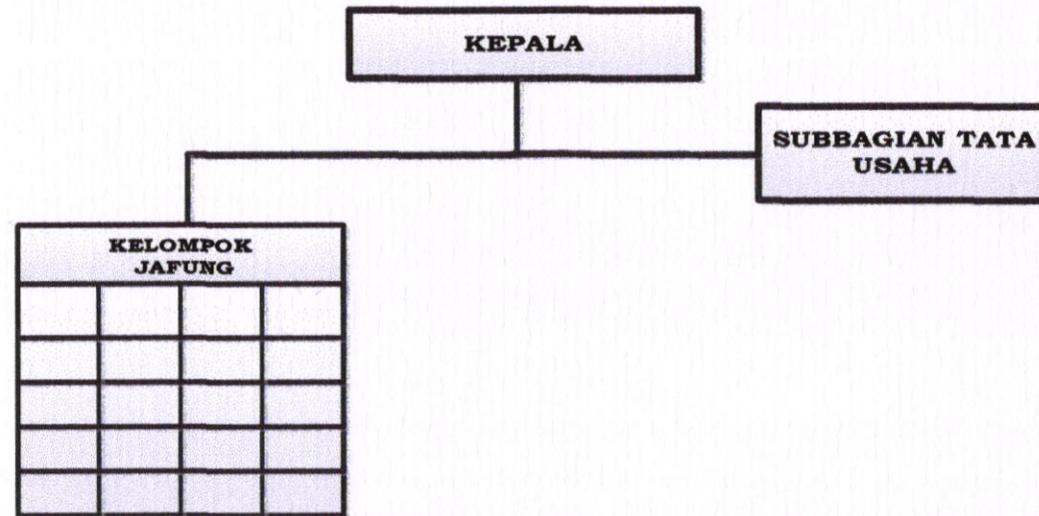
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN



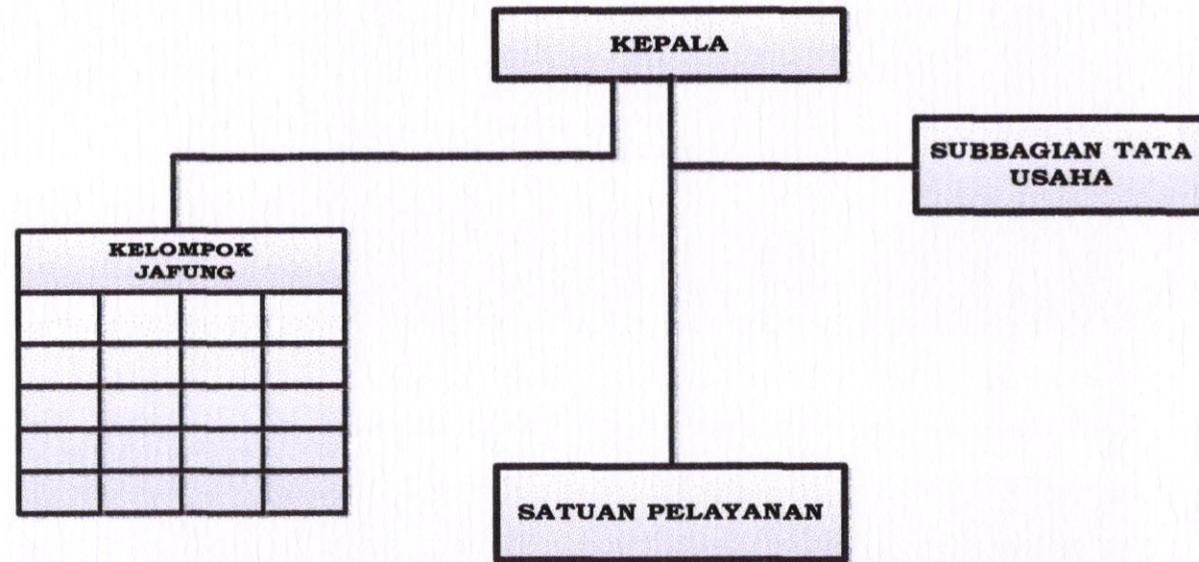
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI PERLINDUNGAN PERKEBUNAN



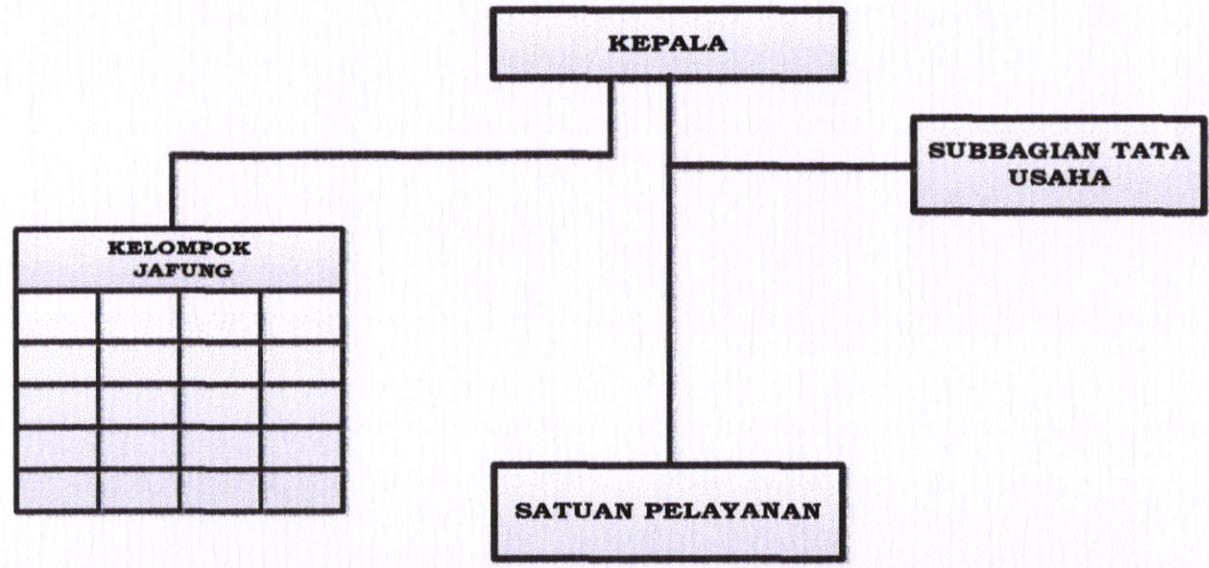
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERUMAHAN JAWA BARAT



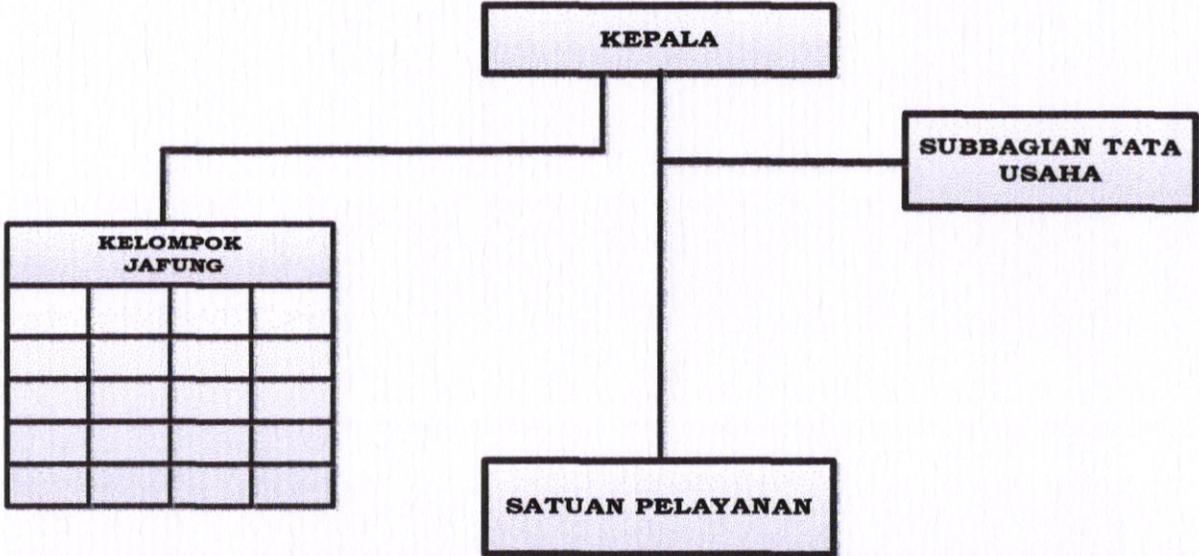
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH I



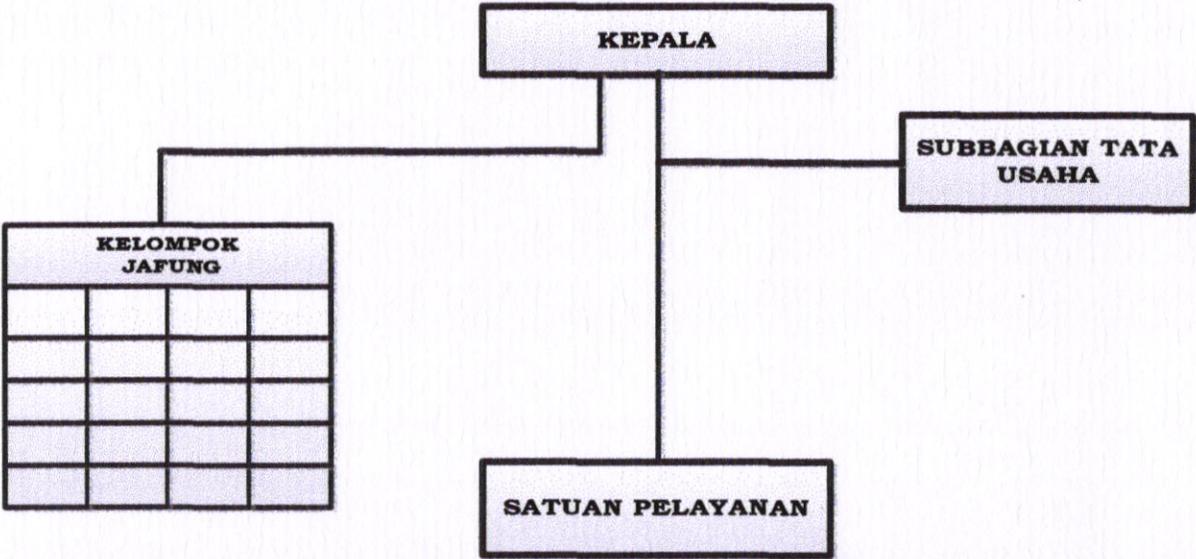
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH II



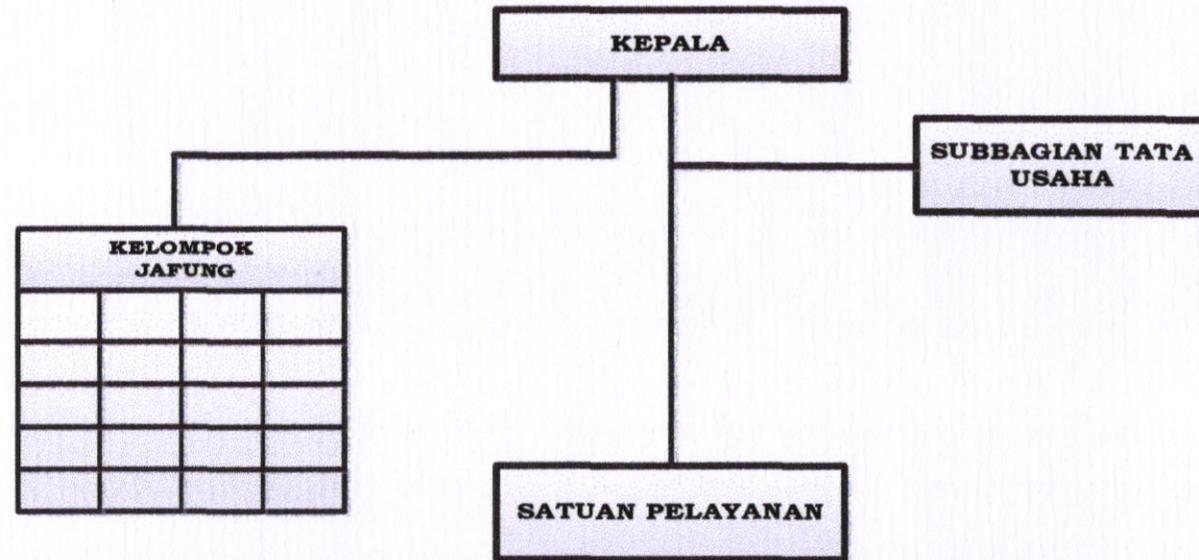
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH III



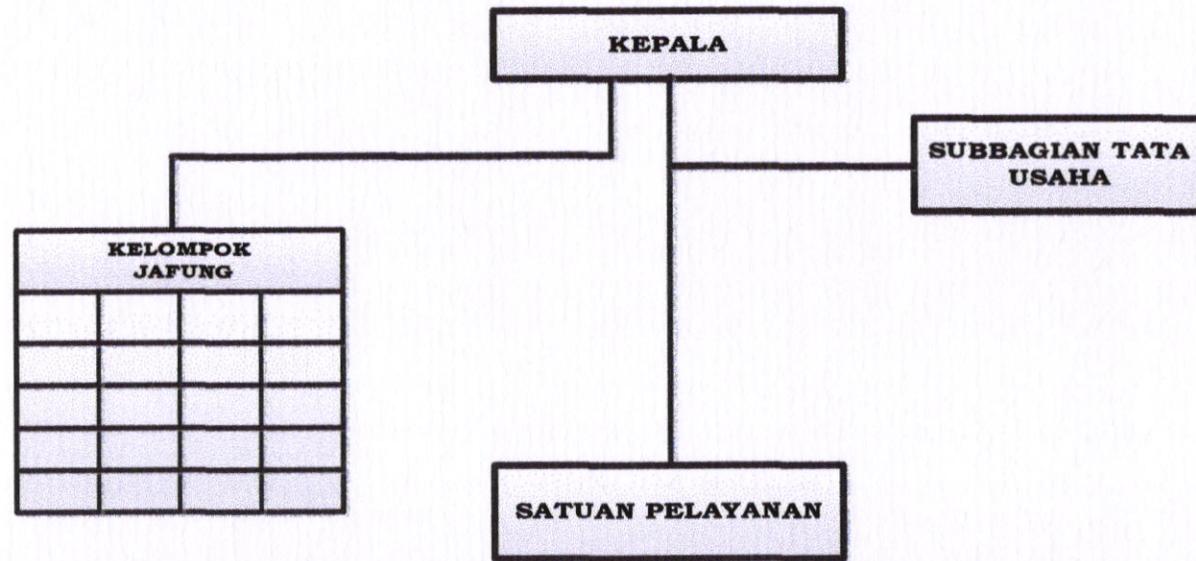
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH IV



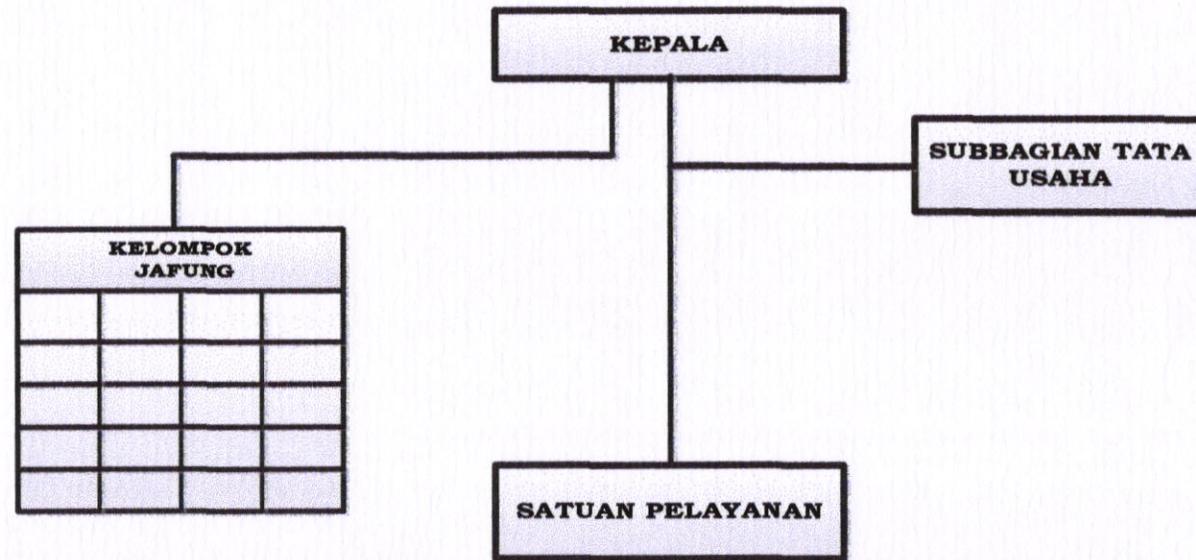
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH V



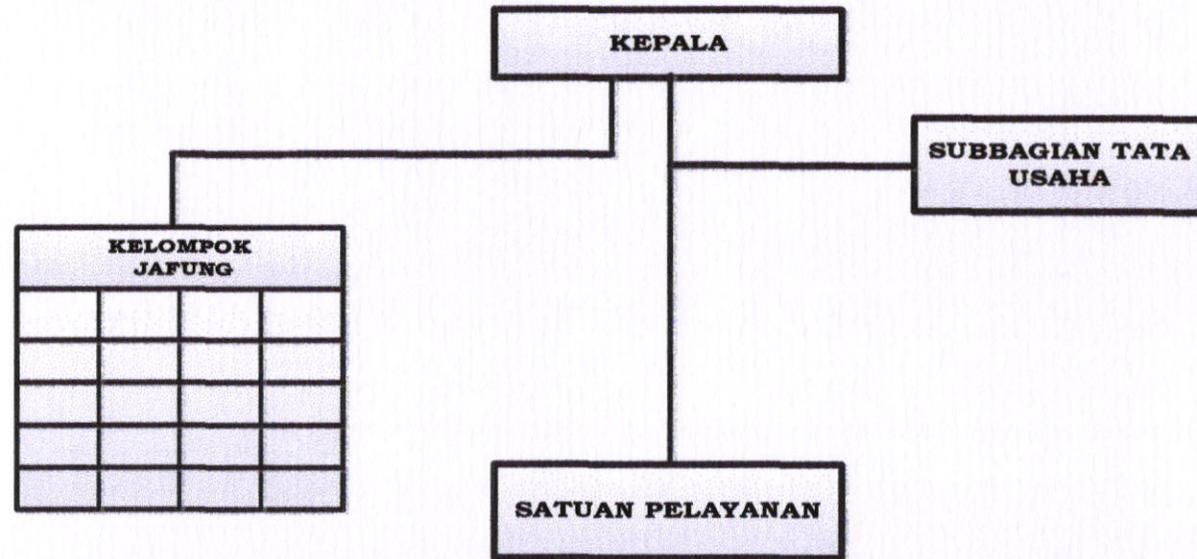
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH VI



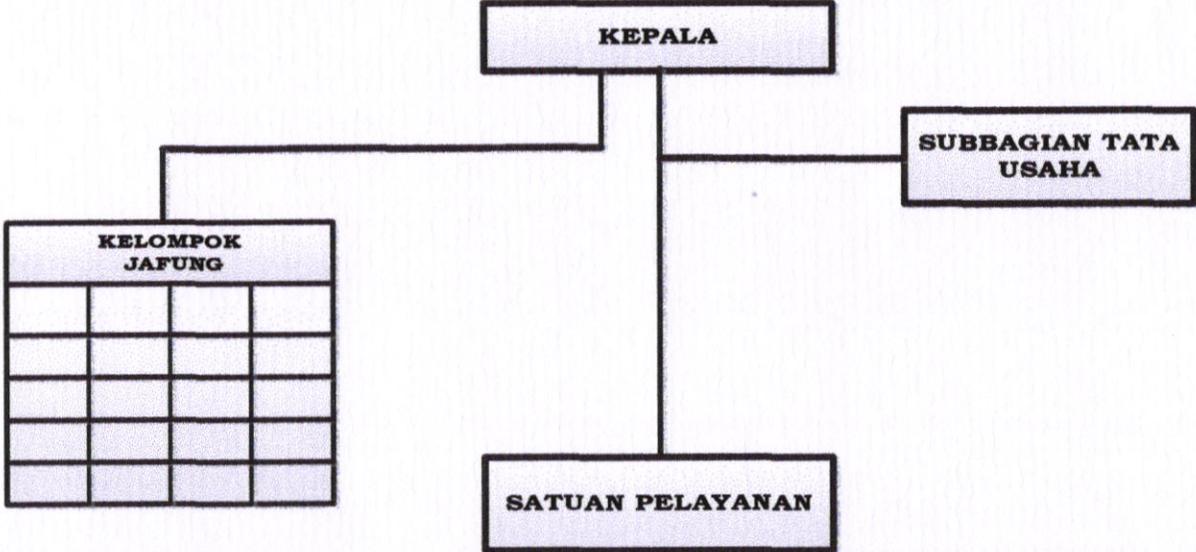
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH VII



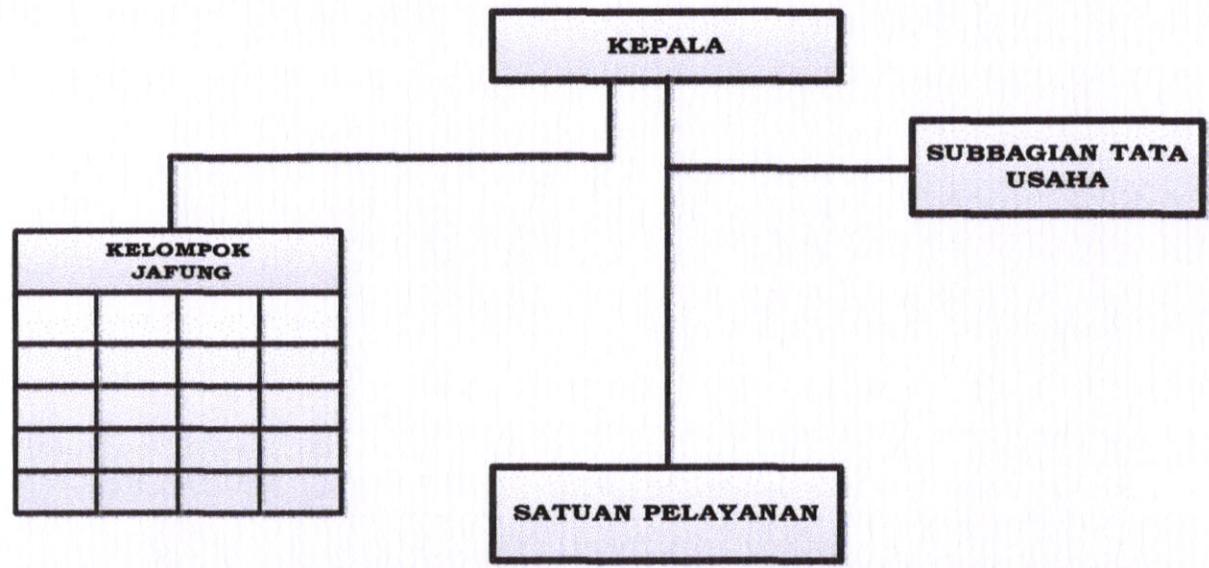
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH VIII



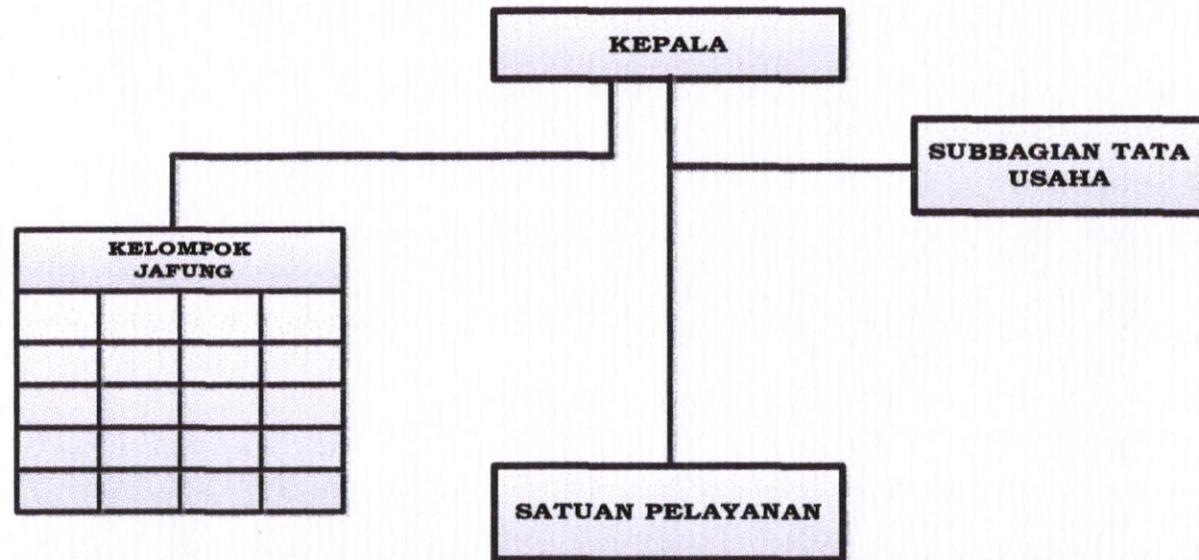
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH IX



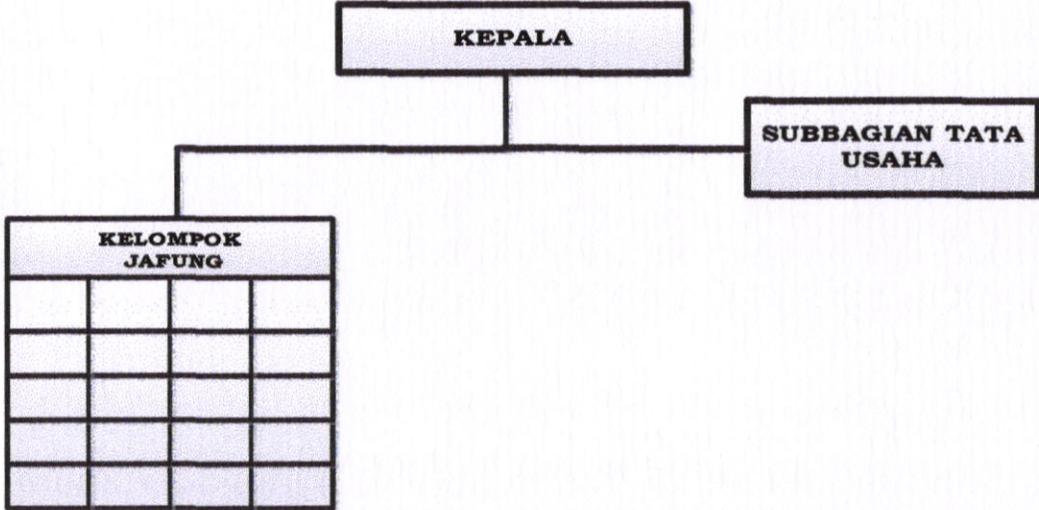
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA) IR.H. DJUANDA



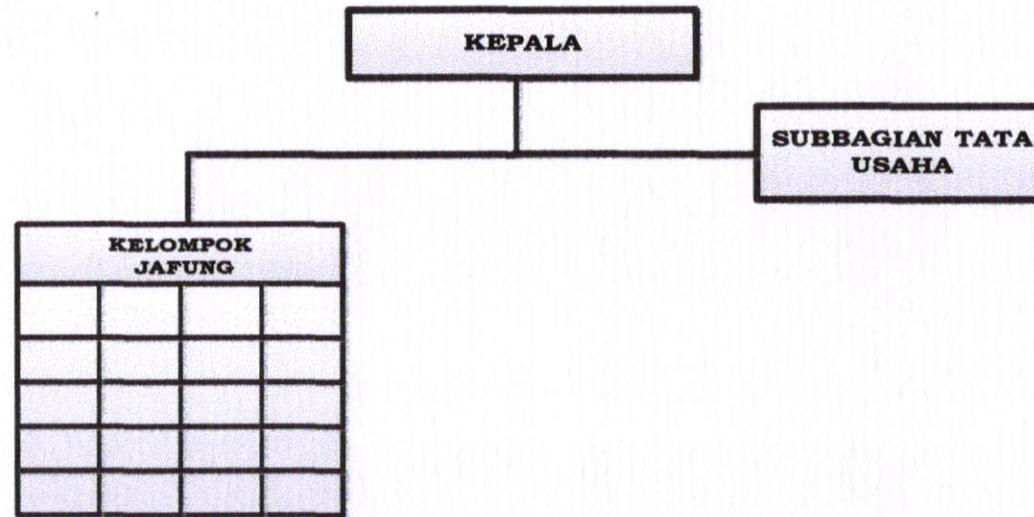
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN



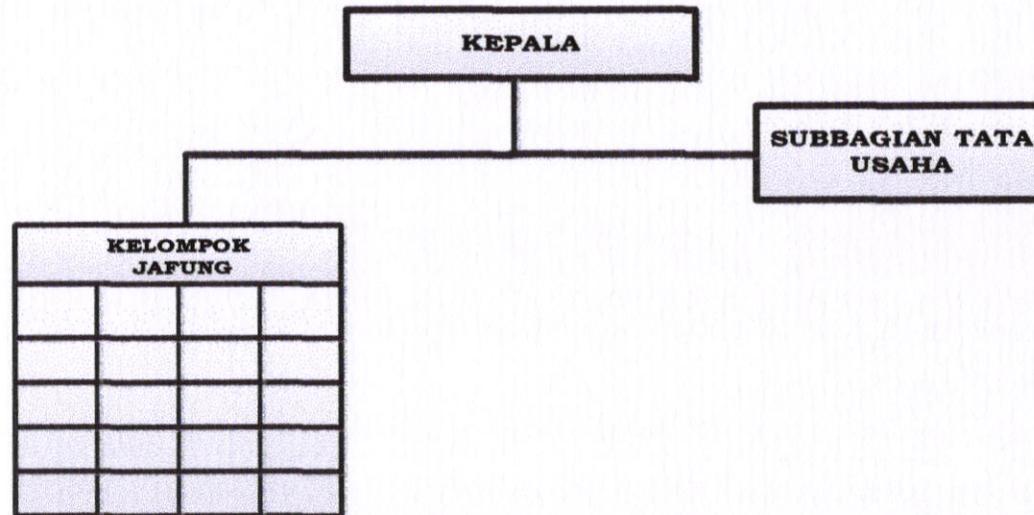
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PELAYANAN PENGOLAHAN HASIL HUTAN



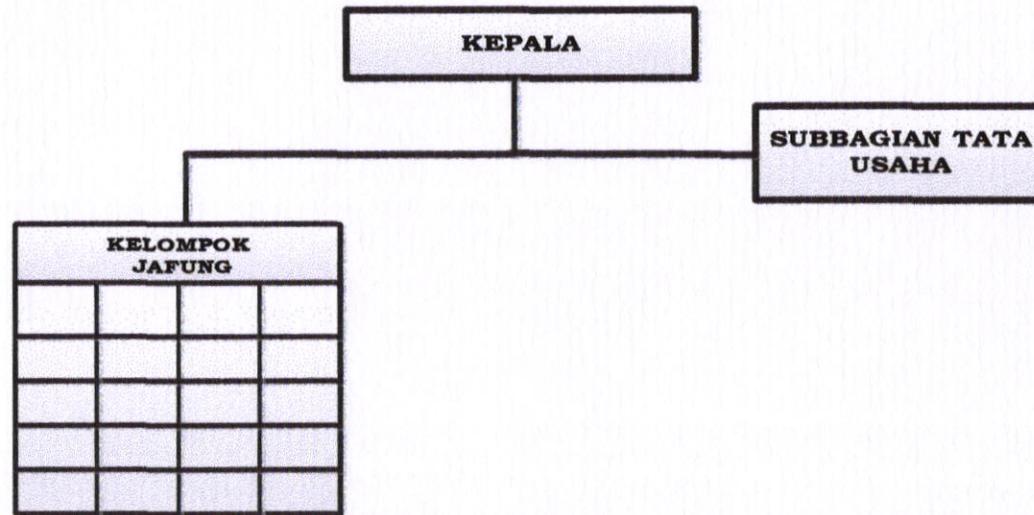
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH I BOGOR



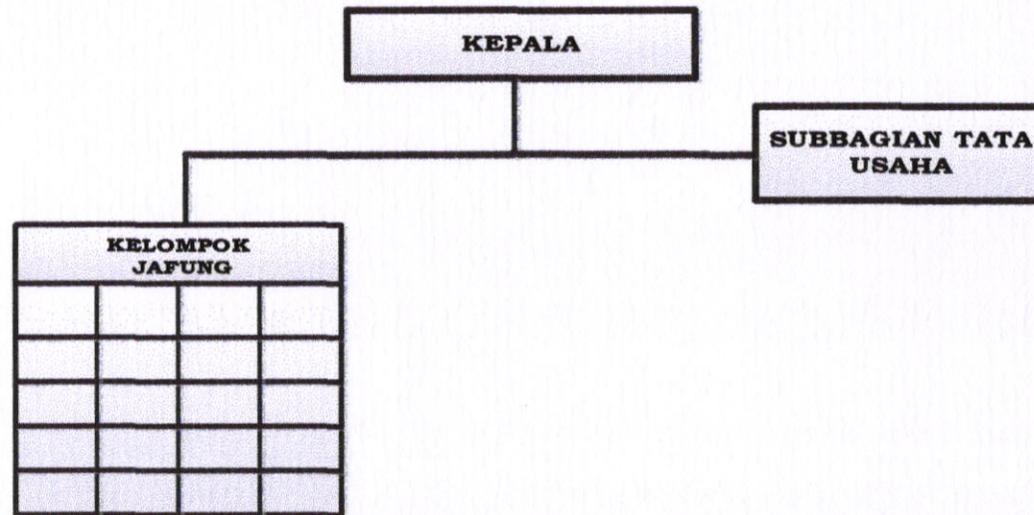
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH II PURWAKARTA



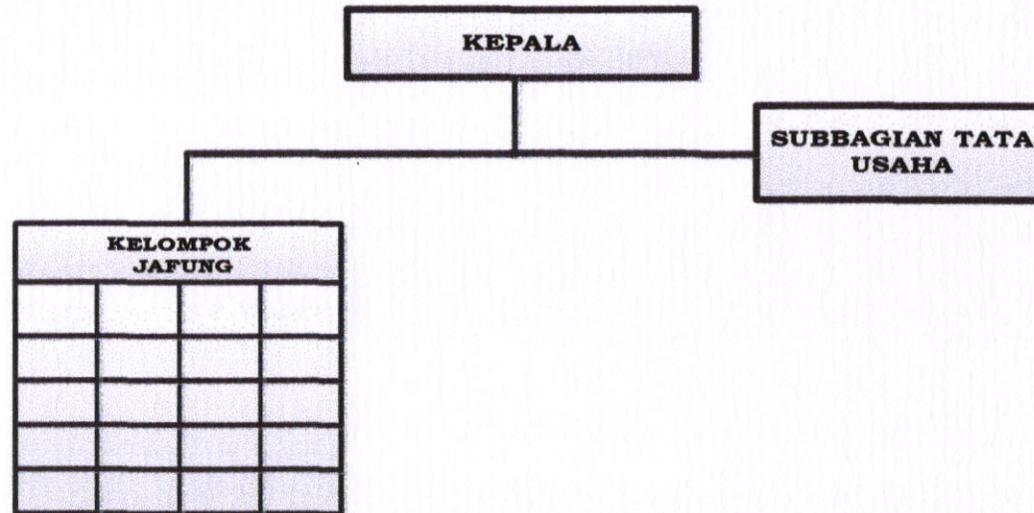
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH III CIANJUR



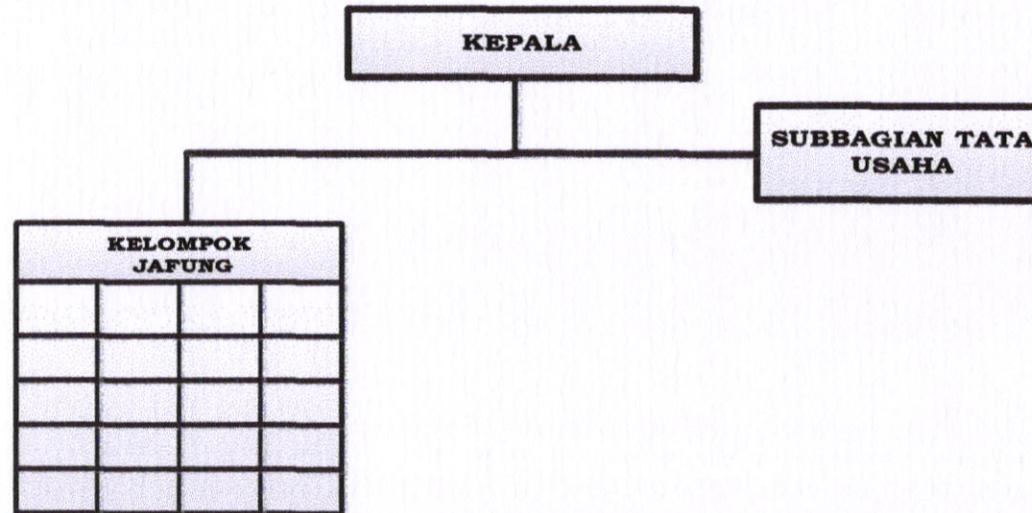
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH IV BANDUNG



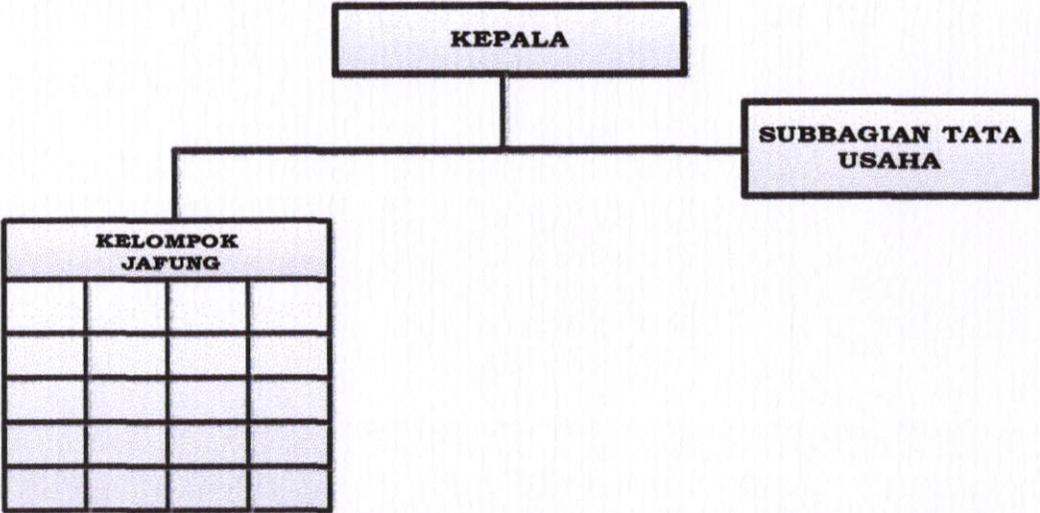
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH V SUMEDANG



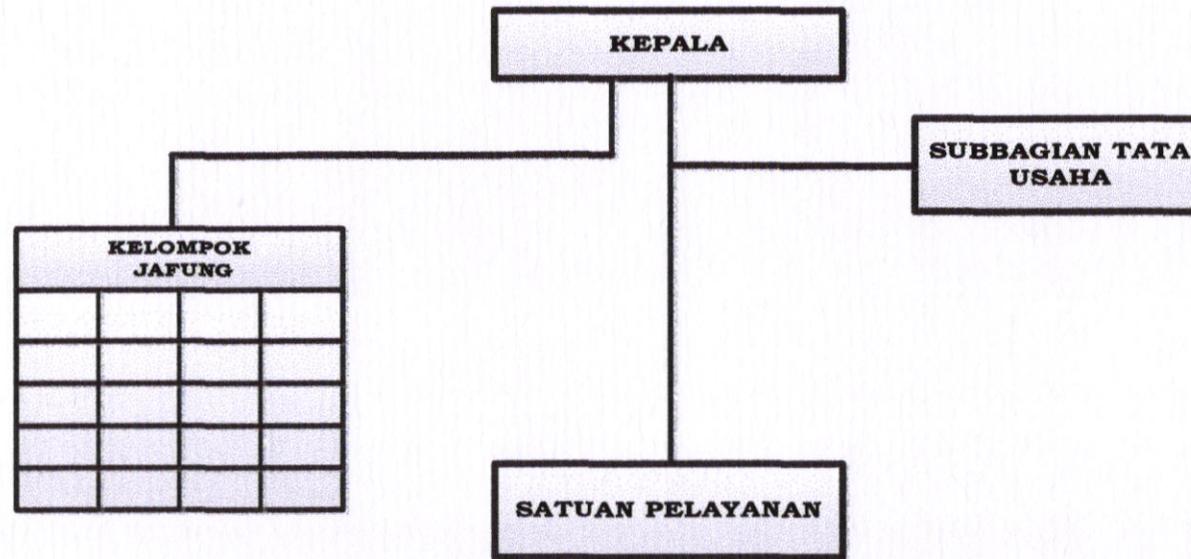
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH VI TASIKMALAYA



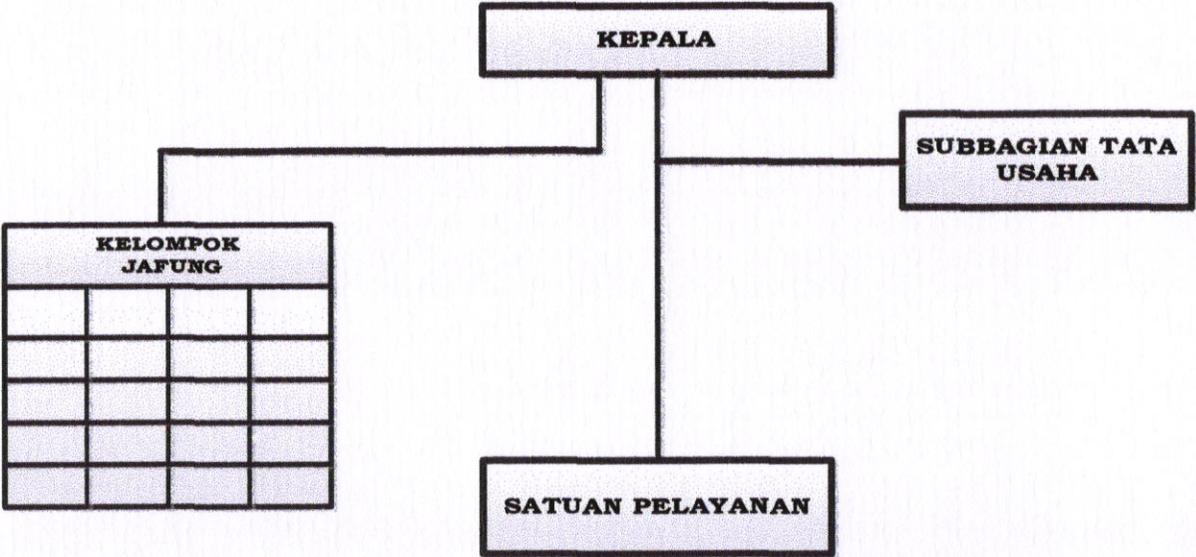
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH VII CIREBON



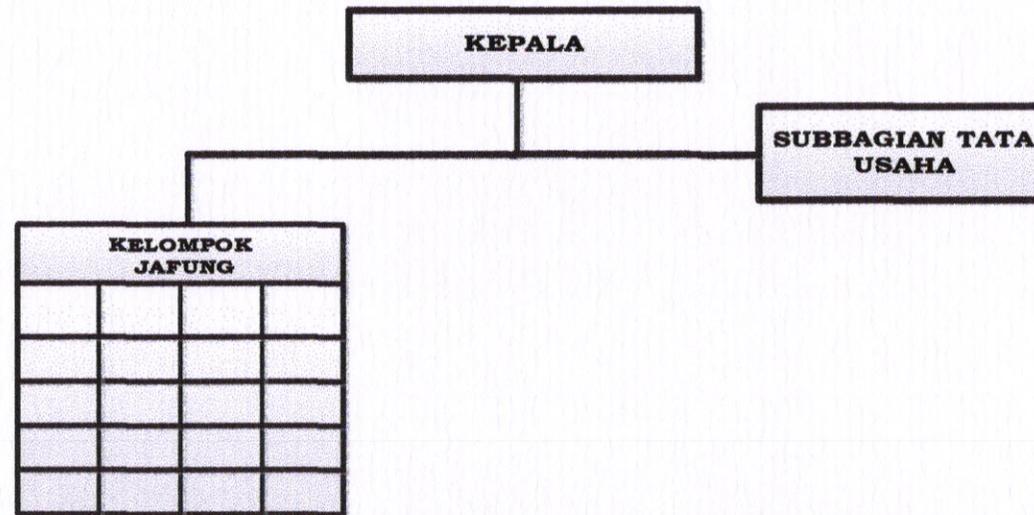
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD INDUSTRI LOGAM



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD INDUSTRI PANGAN, OLAHAN, DAN KEMASAN

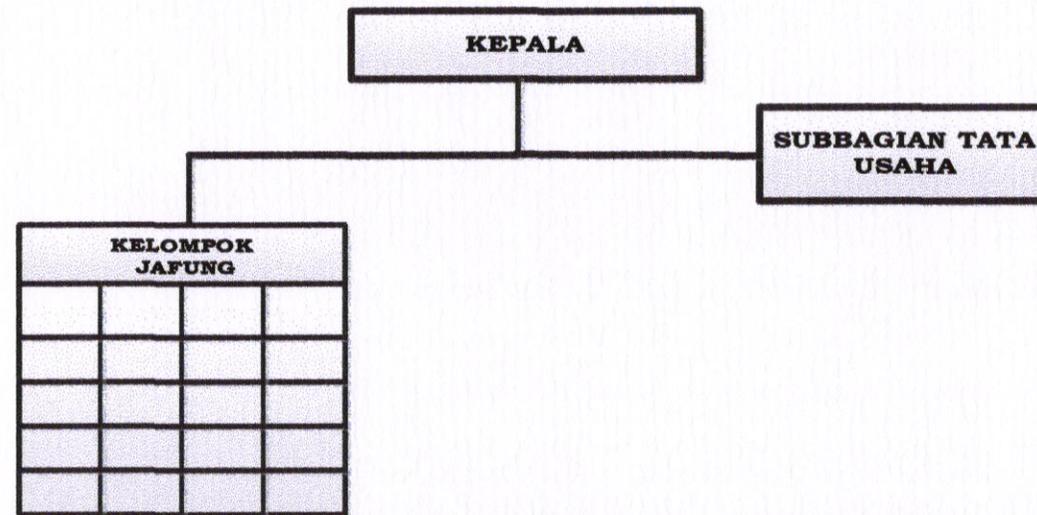


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG LOGAM DAN ELEKTRONIKA KARAWANG



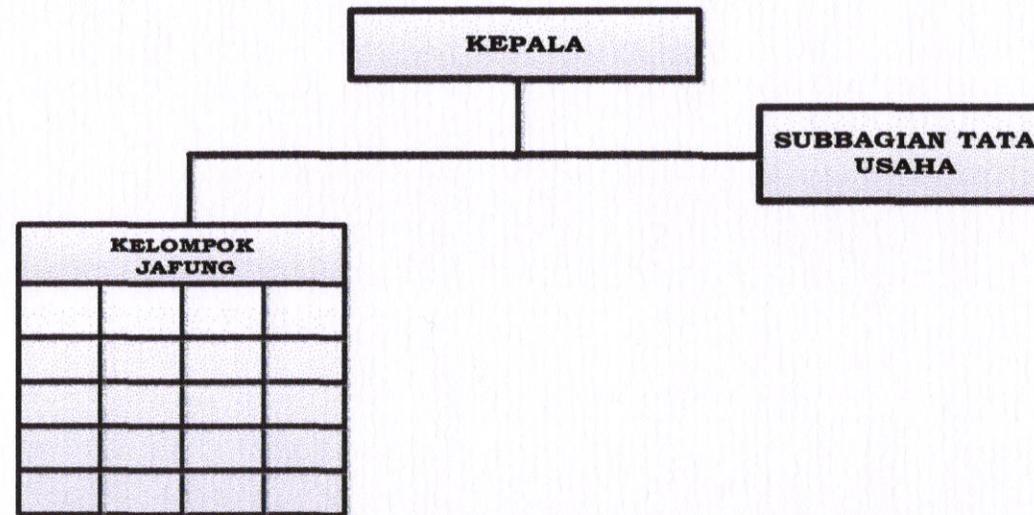
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG KERAMIK DAN TABUNG GAS BOGOR

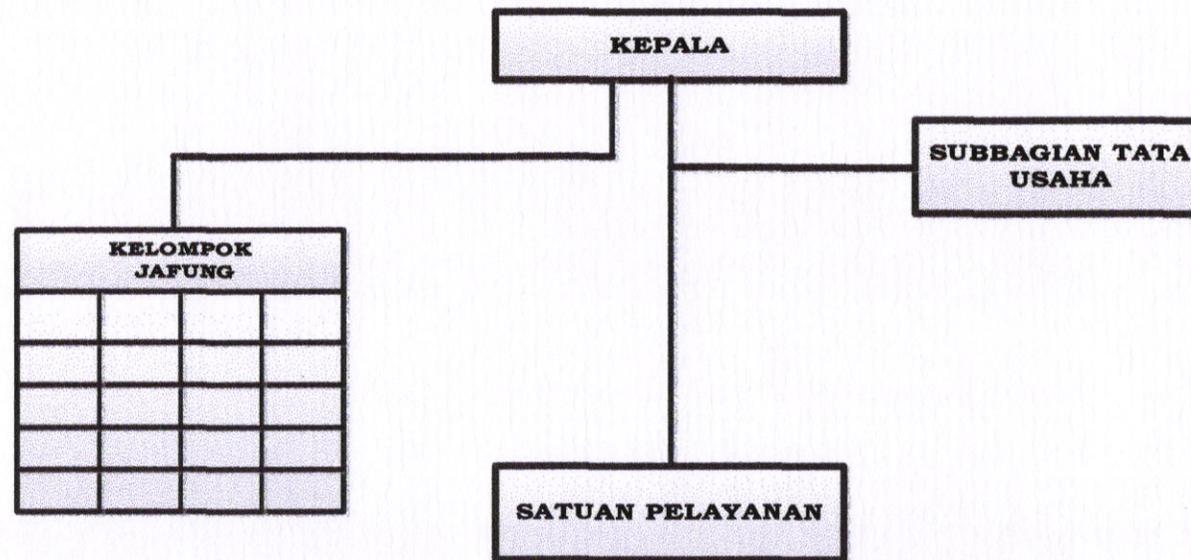


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

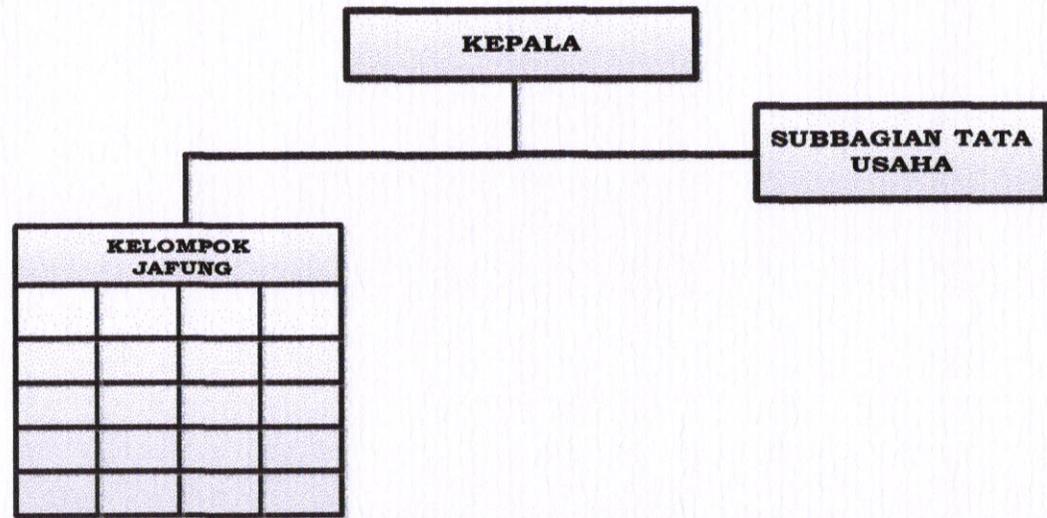
UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG AIR MINUM DALAM KEMASAN CIREBON



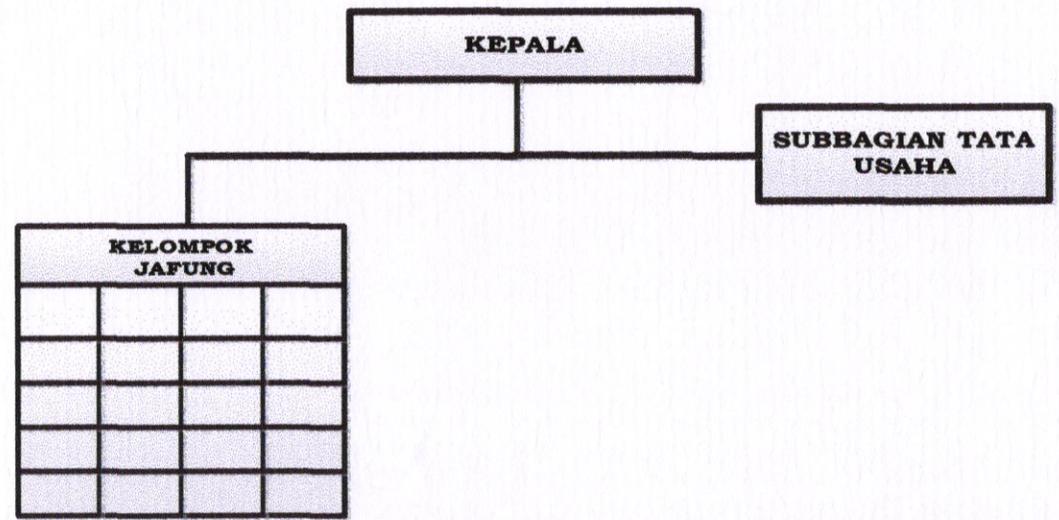
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG AGRO BANDUNG



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGAMANAN DAN PEMANFAATAN ASET

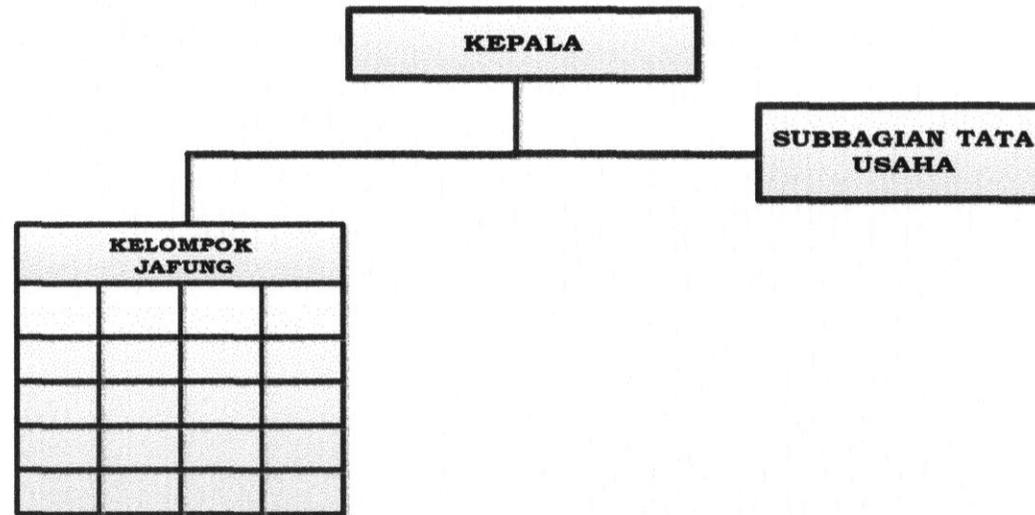


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA DEPOK I

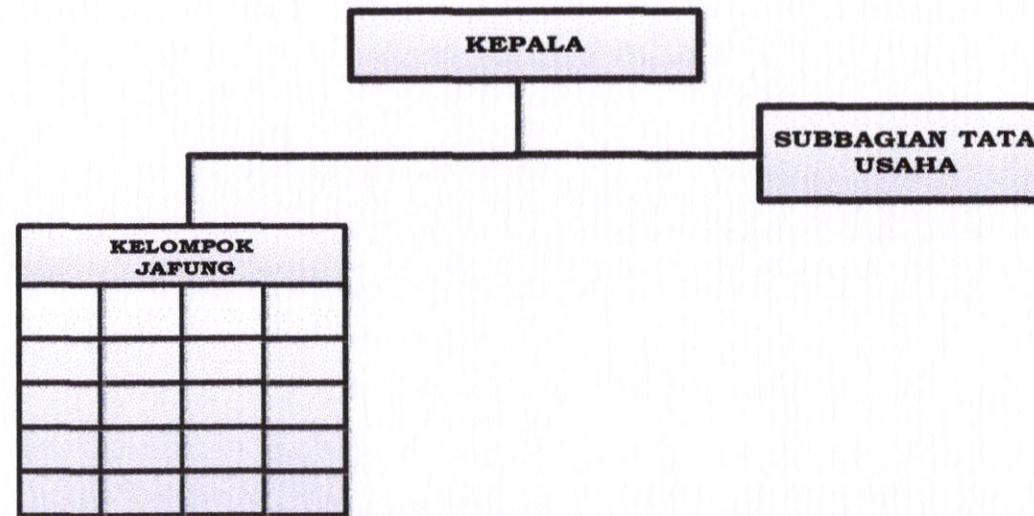


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

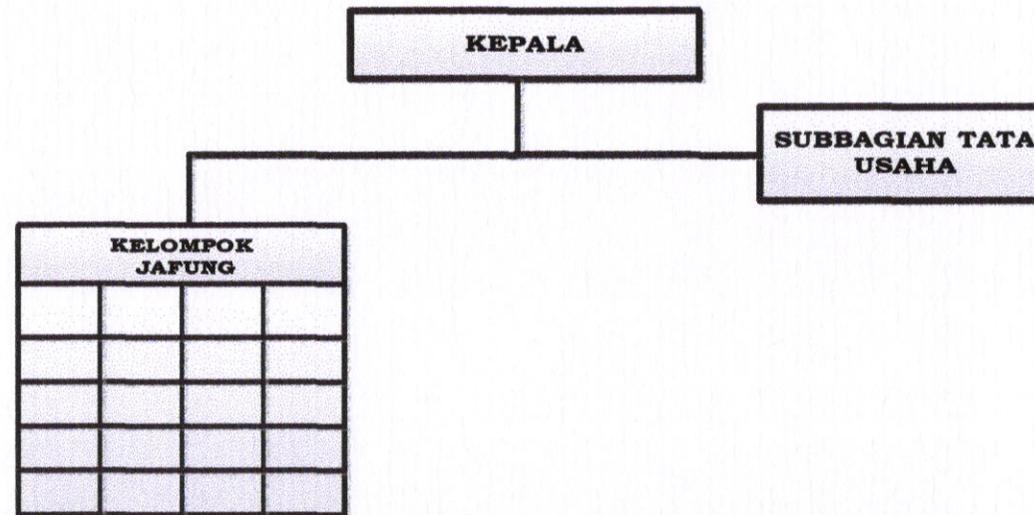
UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA DEPOK II CINERE



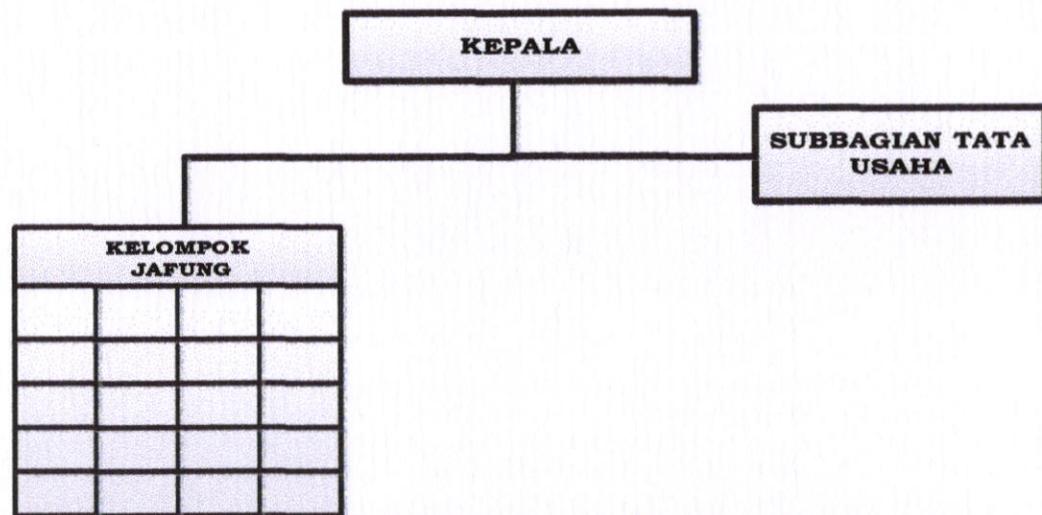
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN BOGOR



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA BOGOR

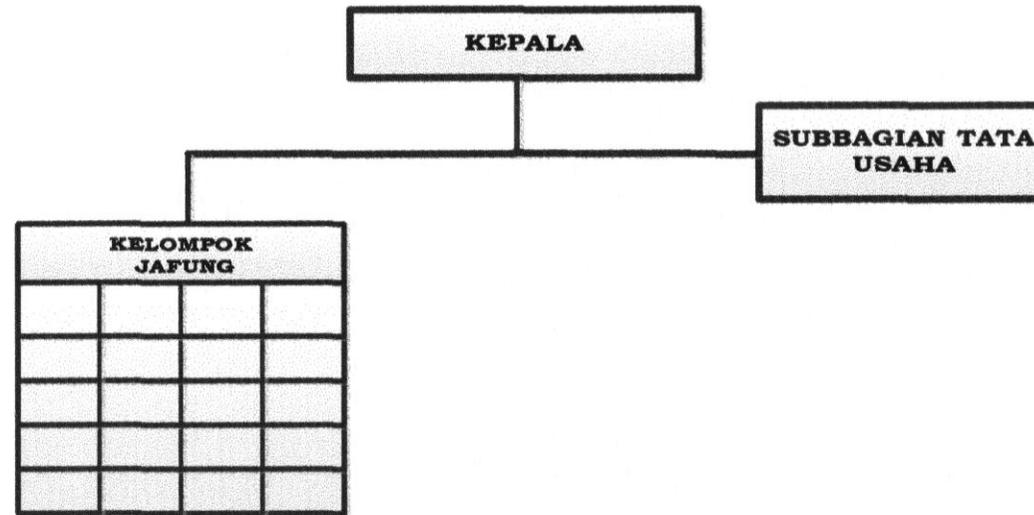


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA SUKABUMI



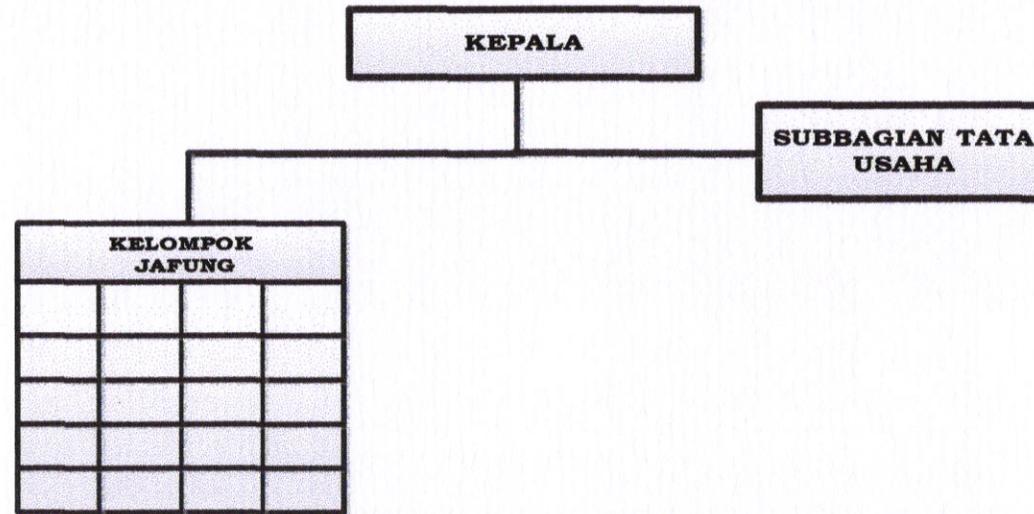
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI I CIBADAK

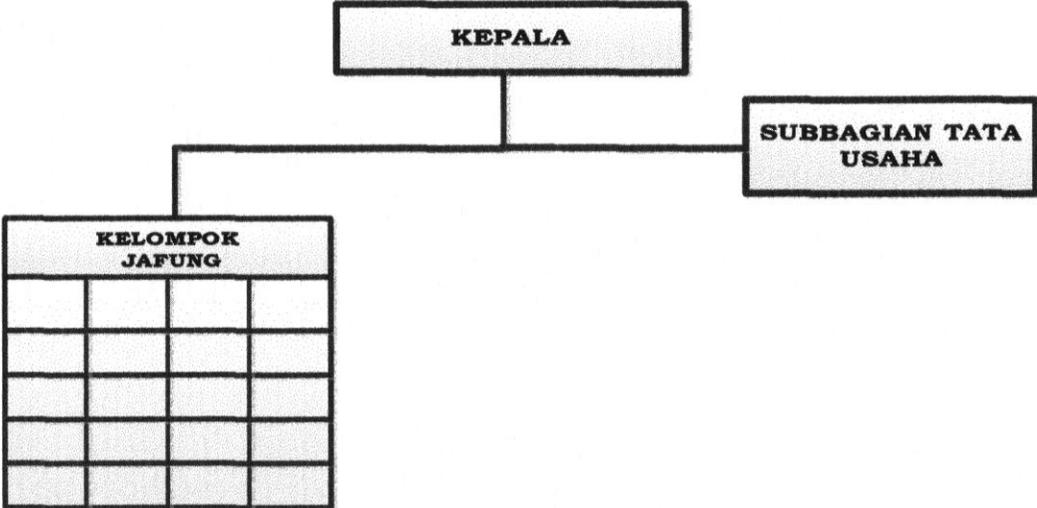


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

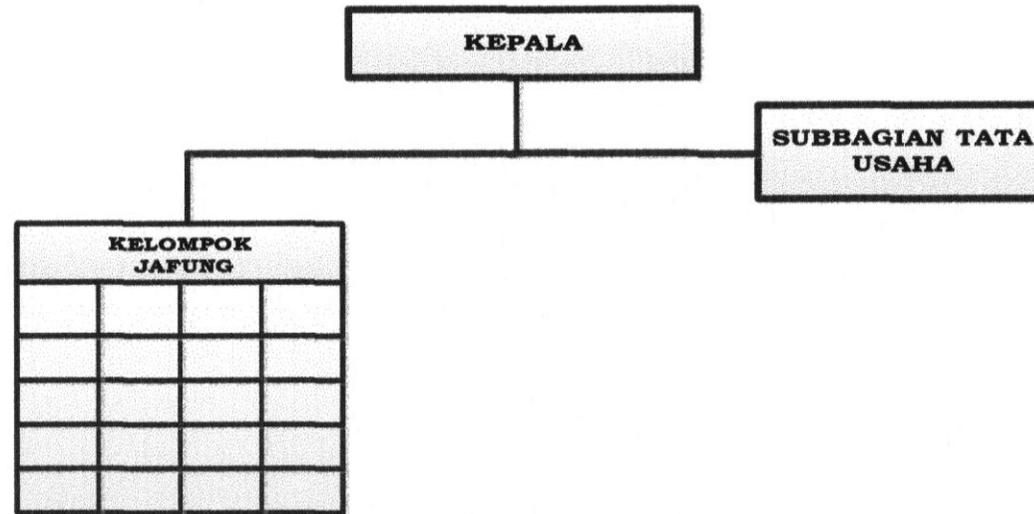
UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI II PALABUHANRATU



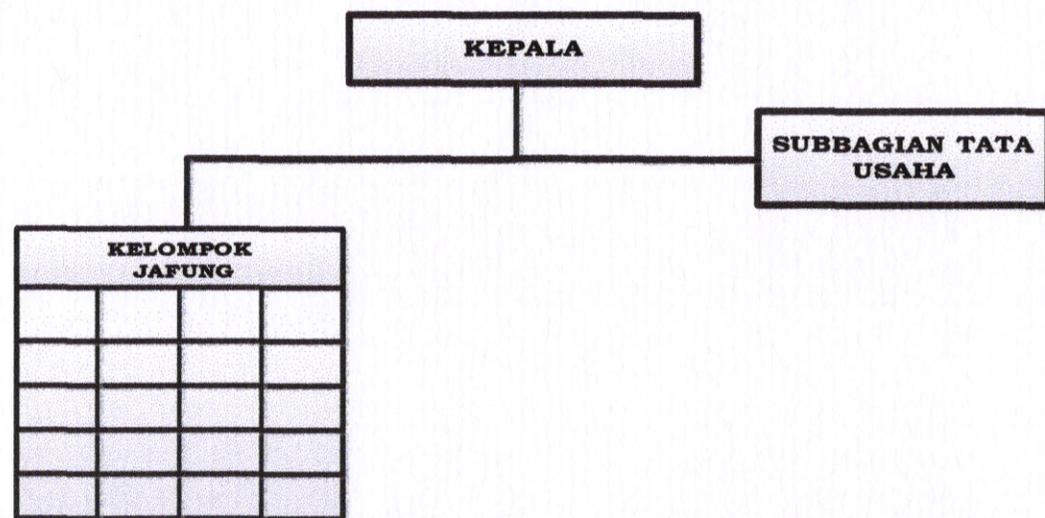
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN CIANJUR



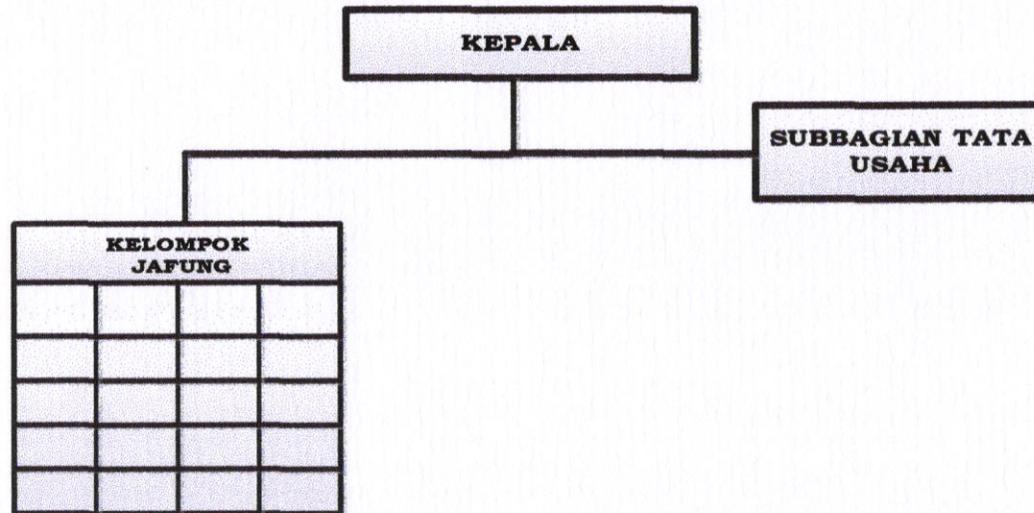
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA BEKASI



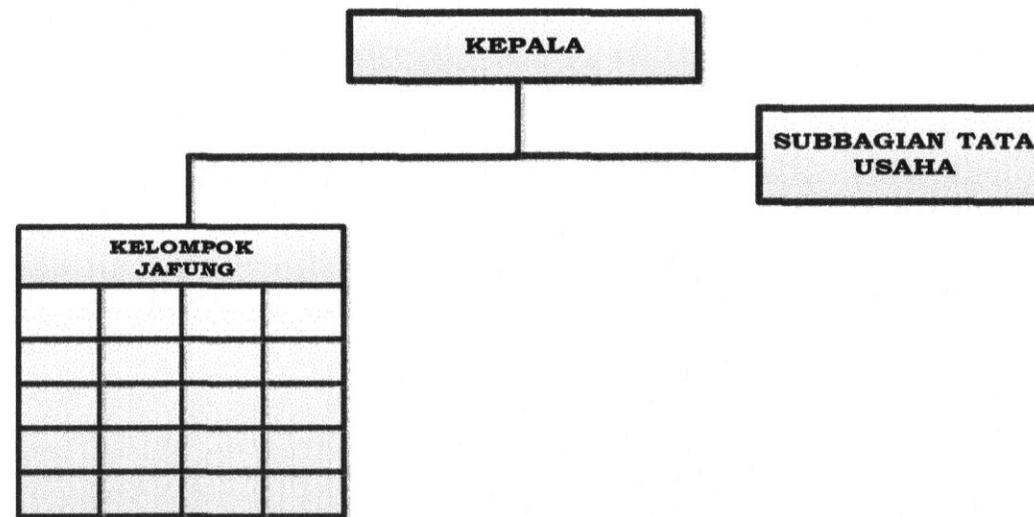
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN BEKASI



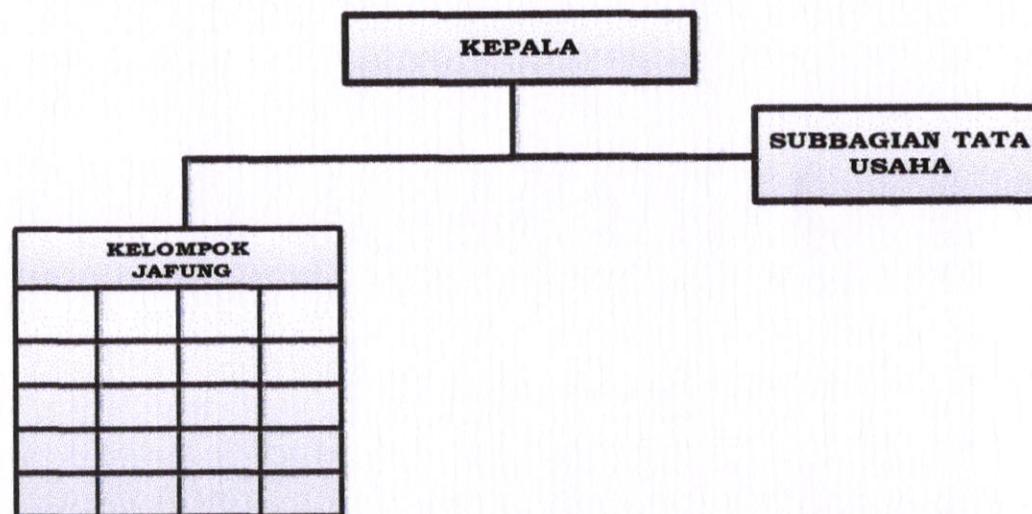
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN KARAWANG



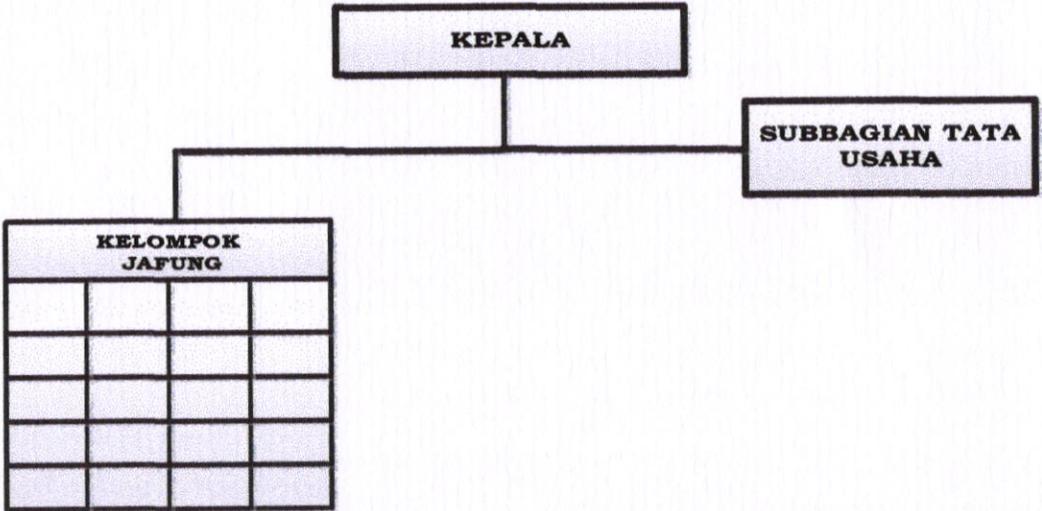
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN PURWAKARTA



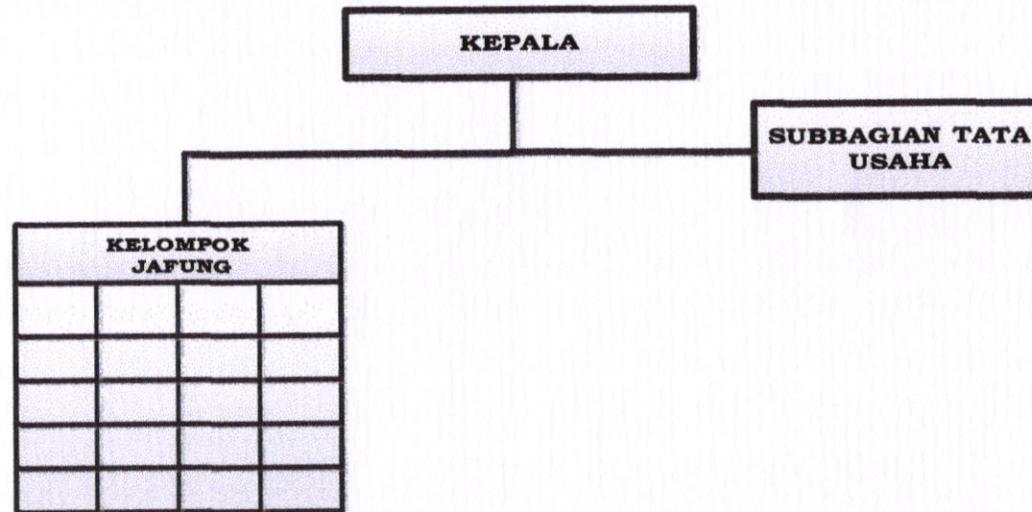
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN SUBANG



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA CIREBON

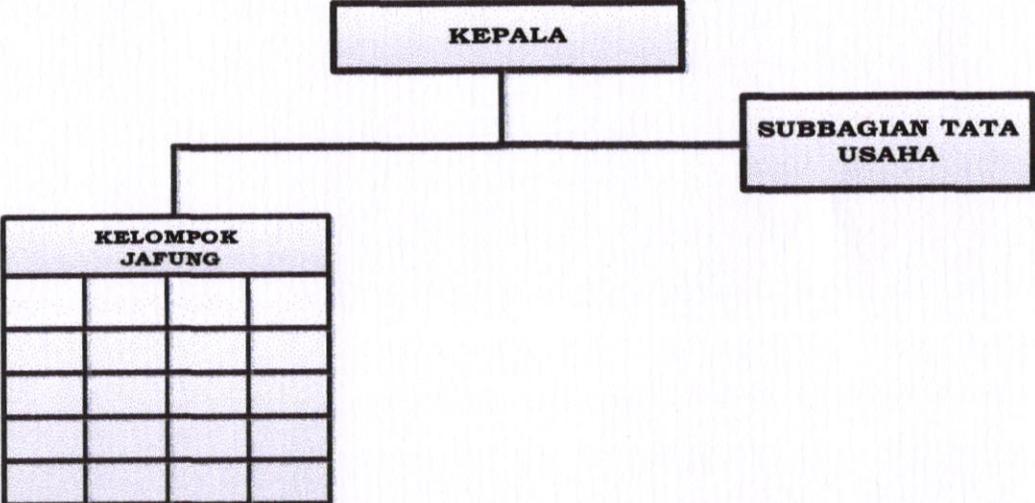


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN CIREBON I SUMBER

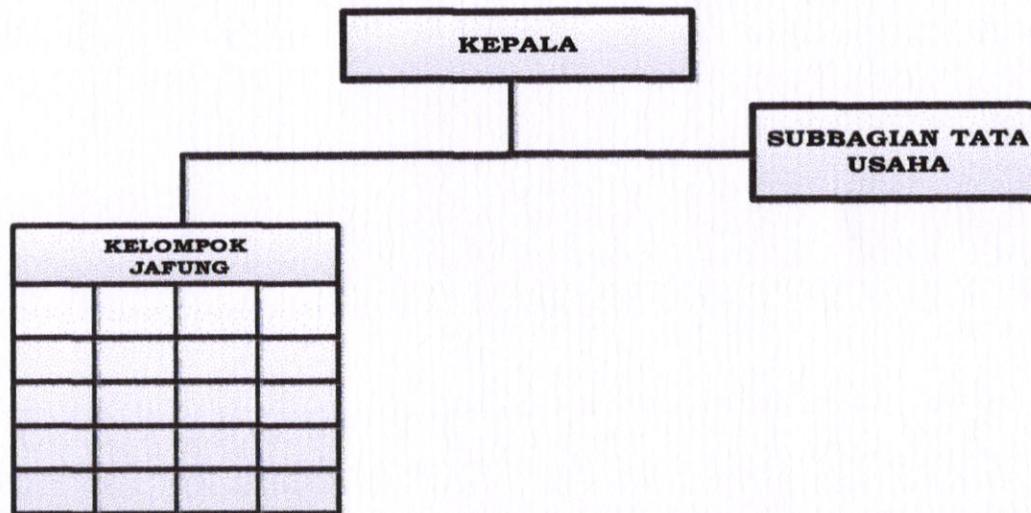


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN CIREBON II CILEDUG

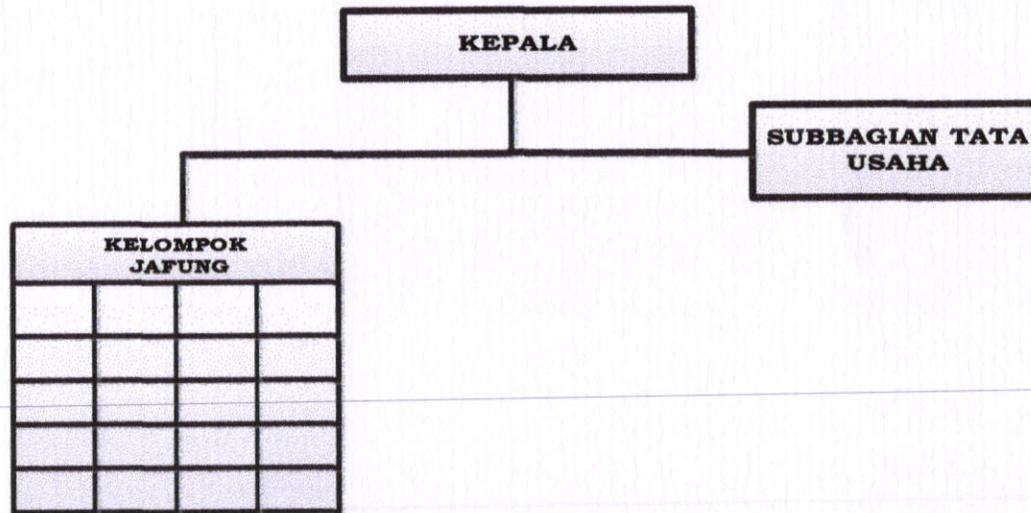


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN INDRAMAYU I

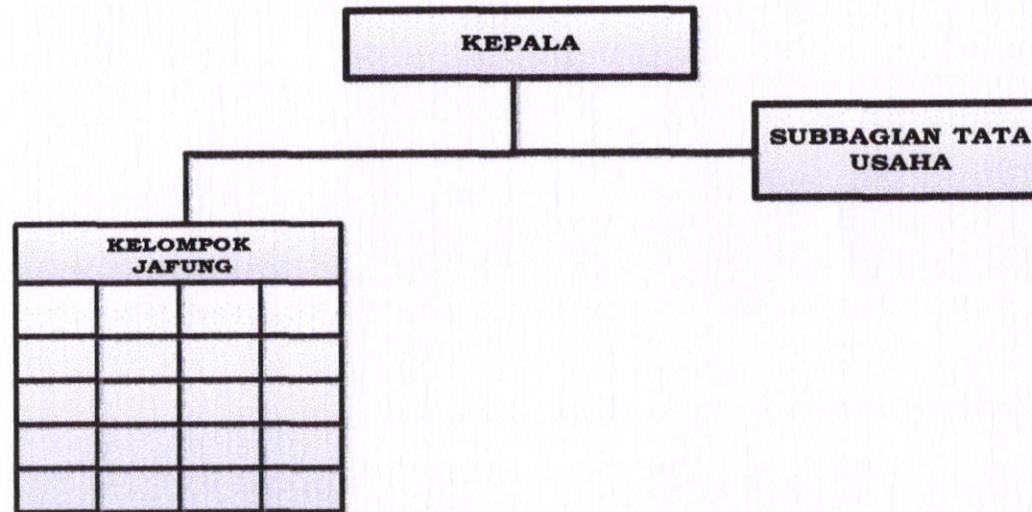


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

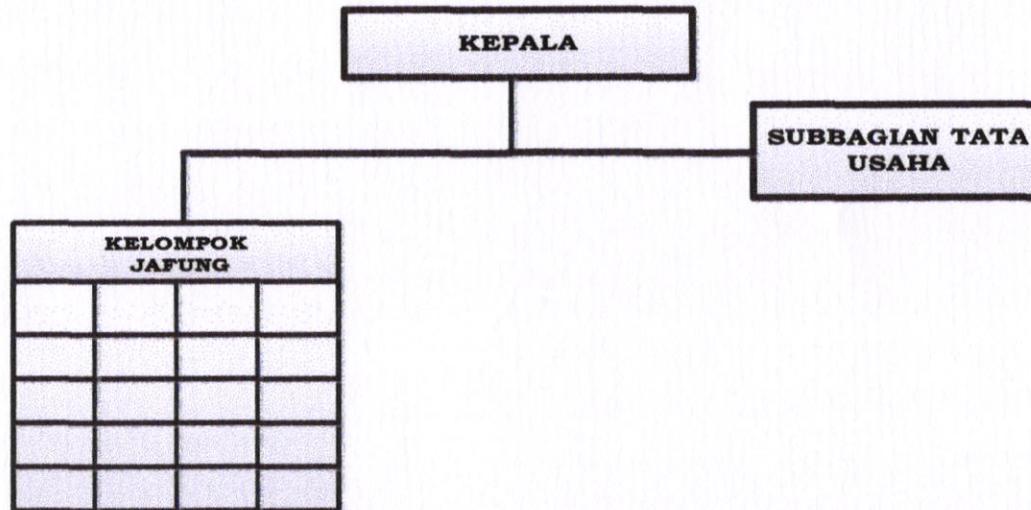
UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN INDRAMAYU II HAURGEULIS



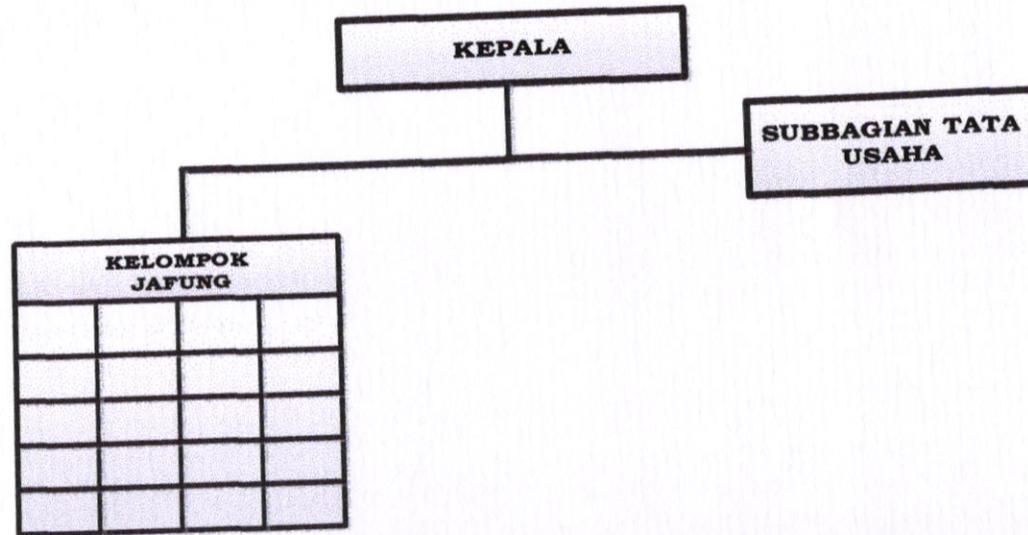
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN KUNINGAN



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN MAJALENGKA

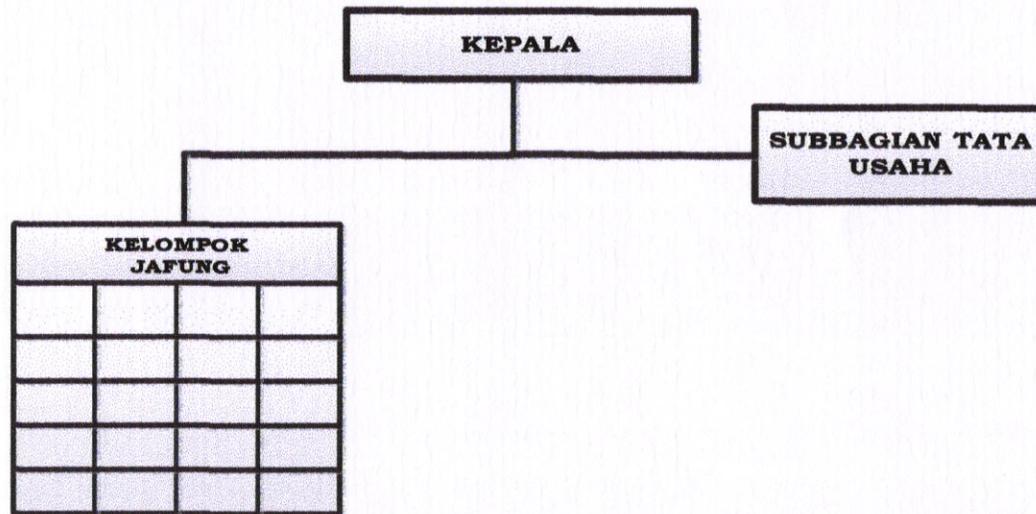


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA BANDUNG I PAJAJARAN

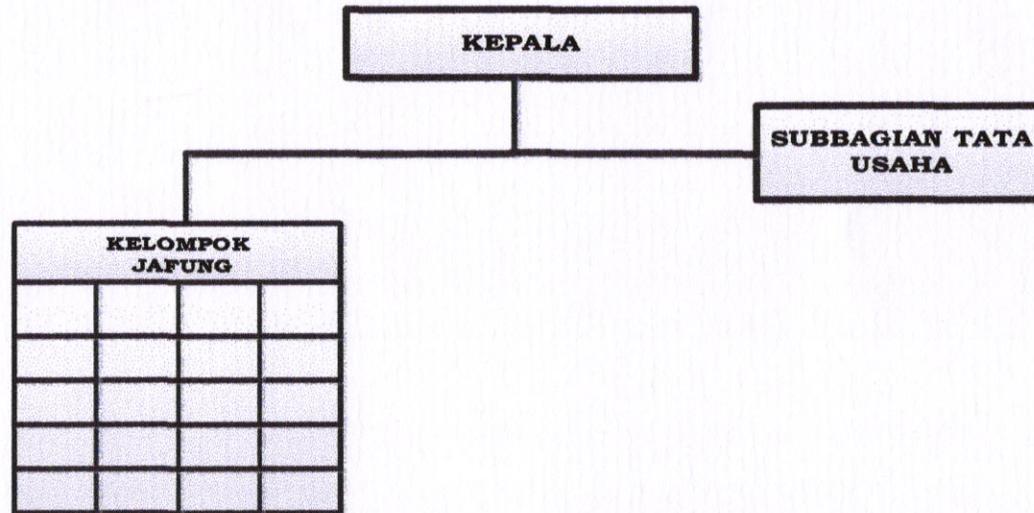


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

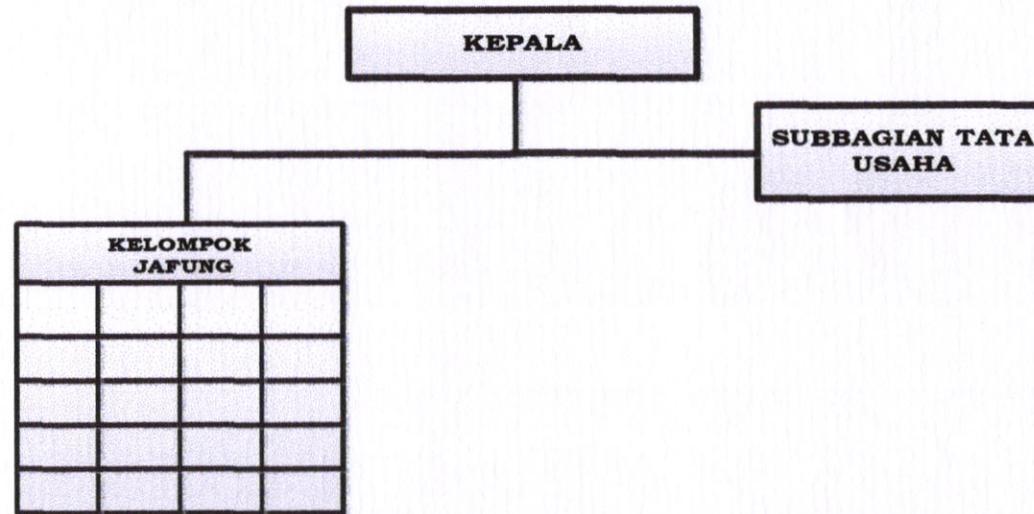
UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA BANDUNG II KAWALUYAAN



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA BANDUNG III SOEKARNO HATTA

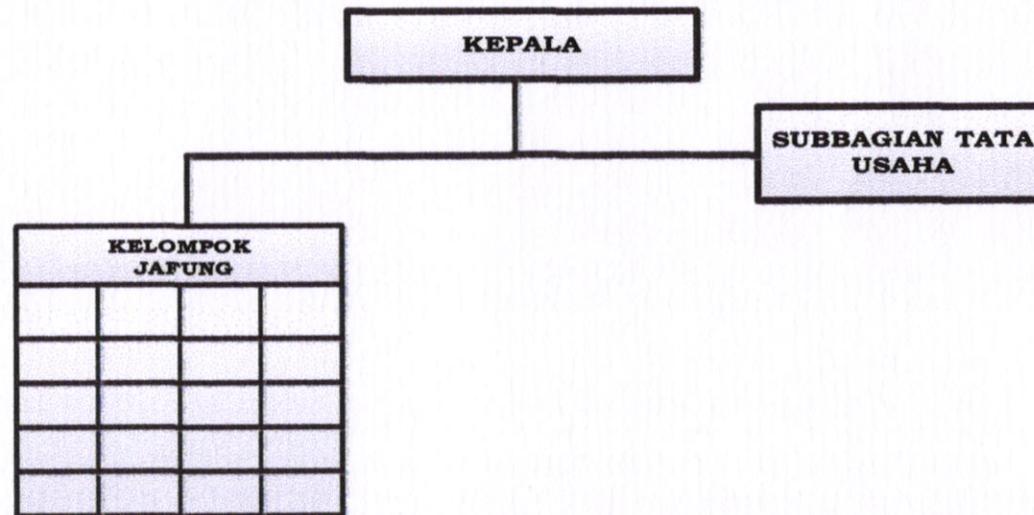


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN BANDUNG BARAT



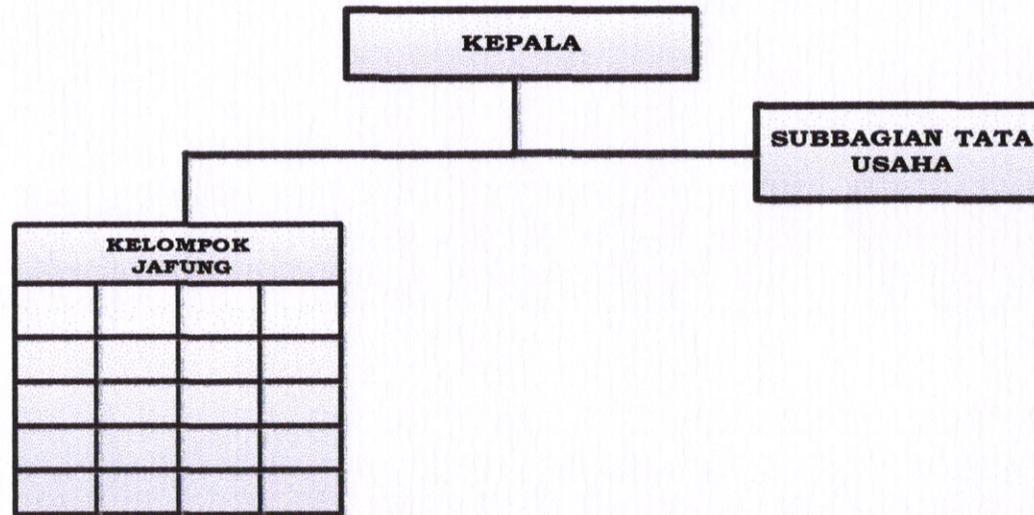
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN BANDUNG I RANCAEKEK

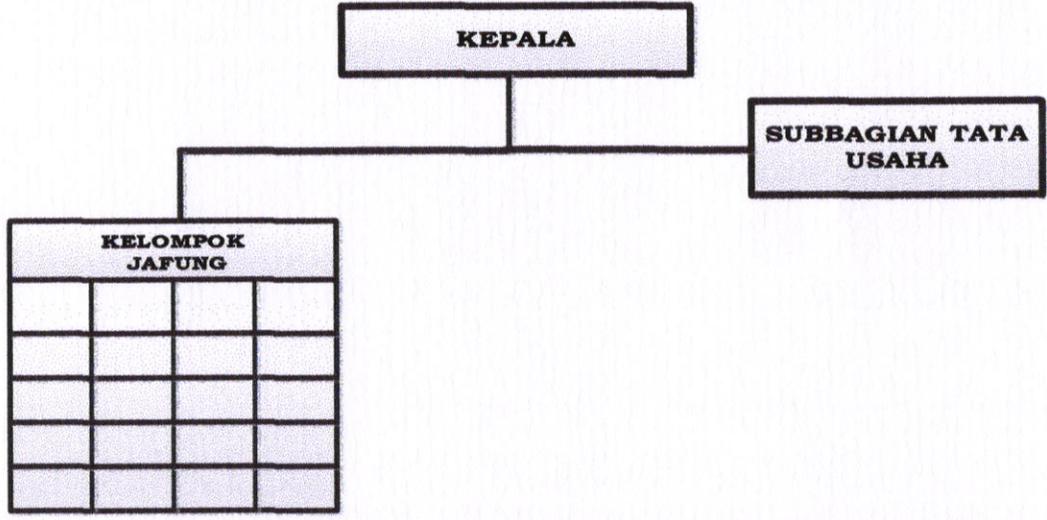


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

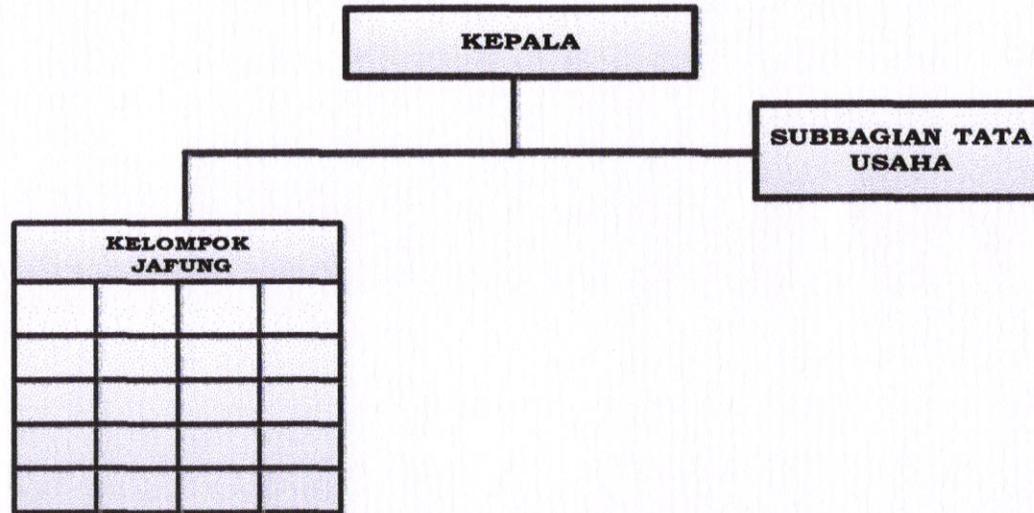
UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN BANDUNG II SOREANG



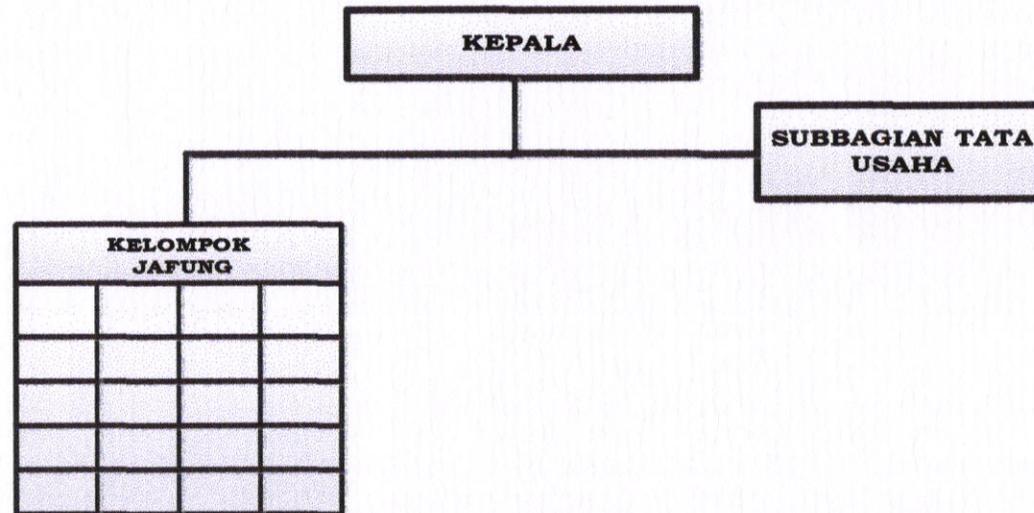
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN SUMEDANG



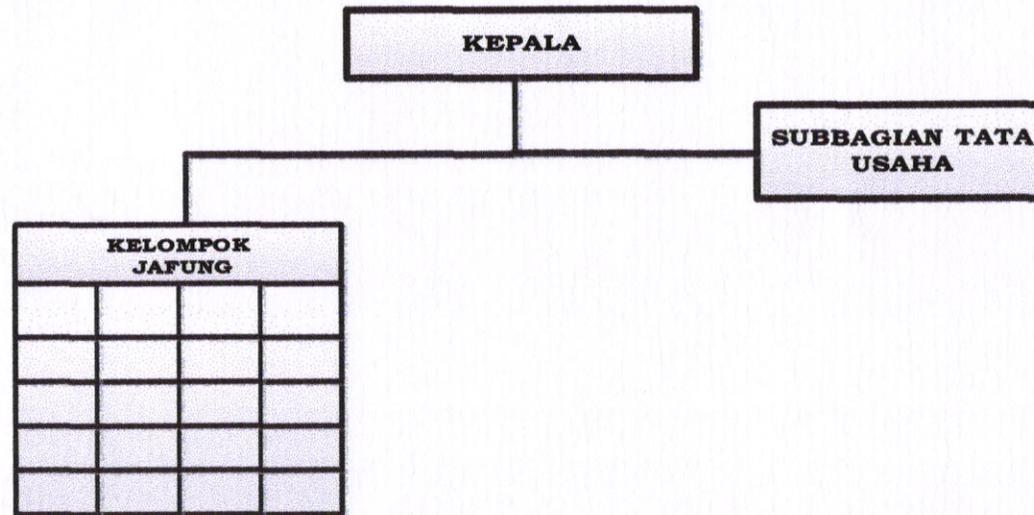
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN GARUT



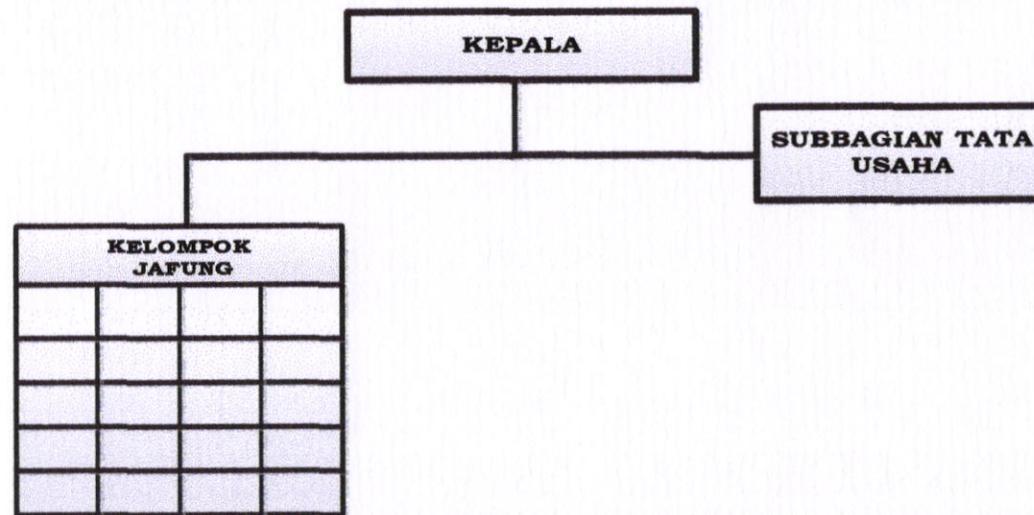
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA TASIKMALAYA



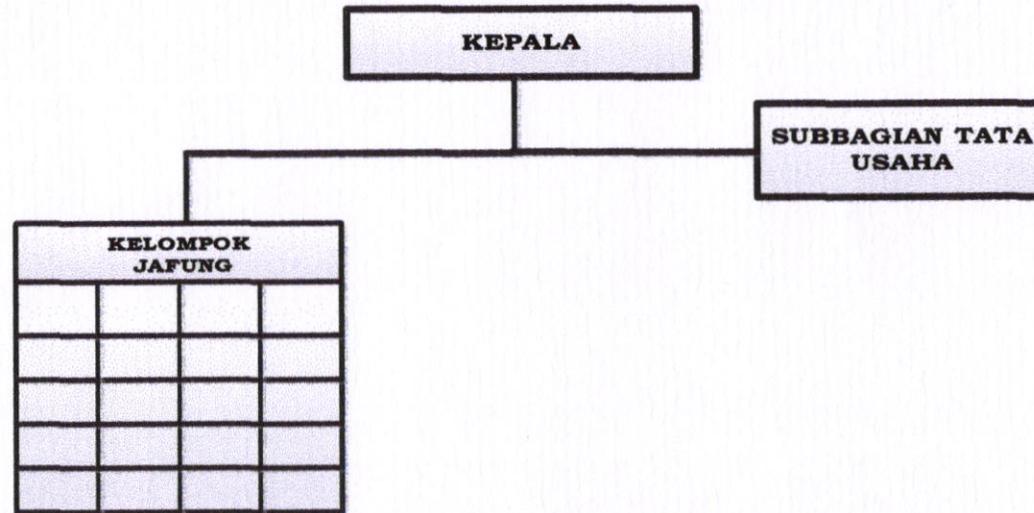
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN TASIKMALAYA



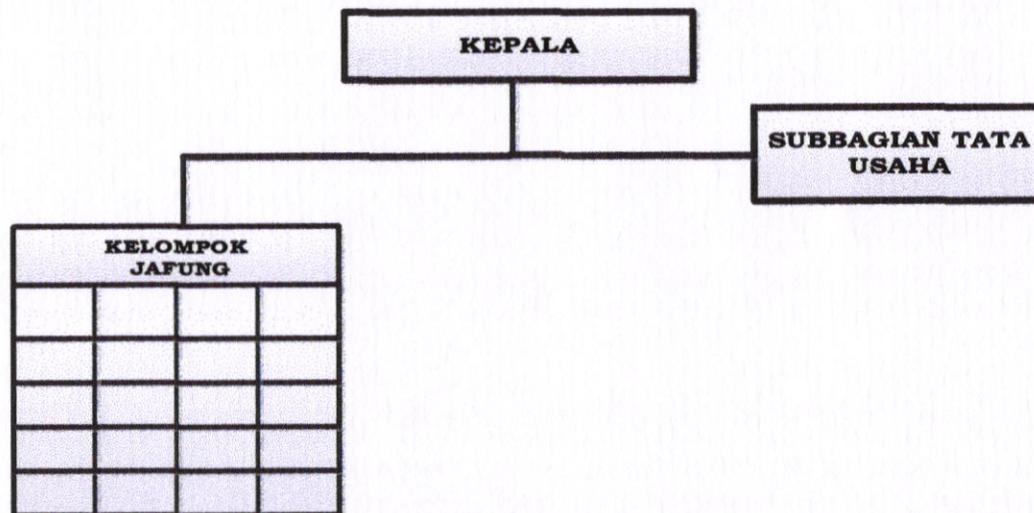
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN CIAMIS



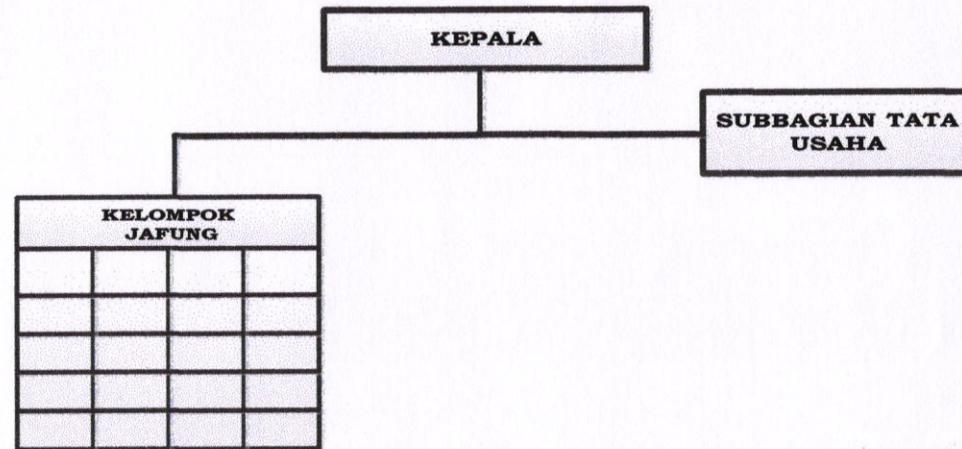
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN PANGANDARAN



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA CIMAHI



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA BANJAR



GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL